

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PERISTIWA 15 JANUARI 1974 DI JAKARTA  
DIPANDANG DARI BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT  
(MILITER, MAHASISWA, DAN PEMERINTAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Ignatius Bayu Sudibyo

NIM : 021314016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2008**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PERISTIWA 15 JANUARI 1974 DI JAKARTA  
DIPANDANG DARI BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT  
(MILITER, MAHASISWA, DAN PEMERINTAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Ignatius Bayu Sudibyo

NIM : 021314016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2008**

SKRIPSI

PERISTIWA 15 JANUARI 1974 DI JAKARTA  
DIPANDANG DARI BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT  
(MILITER, MAHASISWA, DAN PEMERINTAH)



Oleh :

Ignatius Bayu Sudibyo

NIM : 021314016

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal, 30 Mei 2008

Pembimbing II

Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanggal, 30 Mei 2008

SKRIPSI

PERISTIWA 15 JANUARI 1974 DI JAKARTA  
DIPANDANG DARI BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT  
(MILITER, MAHASISWA, DAN PEMERINTAH)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Ignatius Bayu Sudibyo

NIM : 021314016

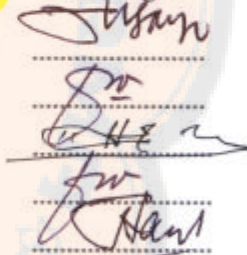
Telah dipertahankan di depan panitia penguji  
pada tanggal 19 Juni 2008  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

- Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd, M.Si.  
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.  
Anggota : Drs B. Musidi, M.Pd.  
Anggota : Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Tanda tangan



Yogyakarta, 19 Juni 2008

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini penulis persembahkan bagi Tuhan yang telah memberikan perlindungan yang sangat luar biasa bagi penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan.*

*Bagi bapak dan ibuku yang telah memberikan segalanya. Semoga penulis dapat memberikan kebanggaan di kemudian hari.*

*Bagi adik-adikku, Tuti, Oni, dan Mas Giri. Terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Keponakanku "Jaret".*

*Kepada dua orang yang pernah mengisi jalan hidupku.*

*Kepada sahabat-sahabatku selama perjuangan di Yogyakarta. Selamat berjuang!*

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

*“Ojo bungah ing pengalem, ojo susah ing penyacat....”* (*jangan terlalu senang ketika mendapat pujian dan jangan terlalu sedih ketika mendapat kesusahan*).

*“Mikul dhuwur mendhem jero....”* (*menjunjung tinggi jasa-jasa dan nama baik orang tua dan mengubur/menyembunyikan dalam-dalam segala keburukannya*).

*“Ajining diri mergo seko obahing lathi....”* (*harga diri dan nama baik seseorang tergantung dari ucapannya*).

*Berbakti bagi orang tuaku, menjadi teladan adik-adikku dan teman-temanku, serta pelindung istri dan anak-anakku.... kelak.*

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **IGNATIUS BAYU SUDIBYO**

Nomor Mahasiswa : **021314016**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERISTIWA 15 JANUARI 1974 DI JAKARTA DIPANDANG DARI  
BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT (MILITER, MAHASISWA, DAN  
PEMERINTAH)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2008

Yang menyatakan



**(IGNATIUS BAYU SUDIBYO)**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

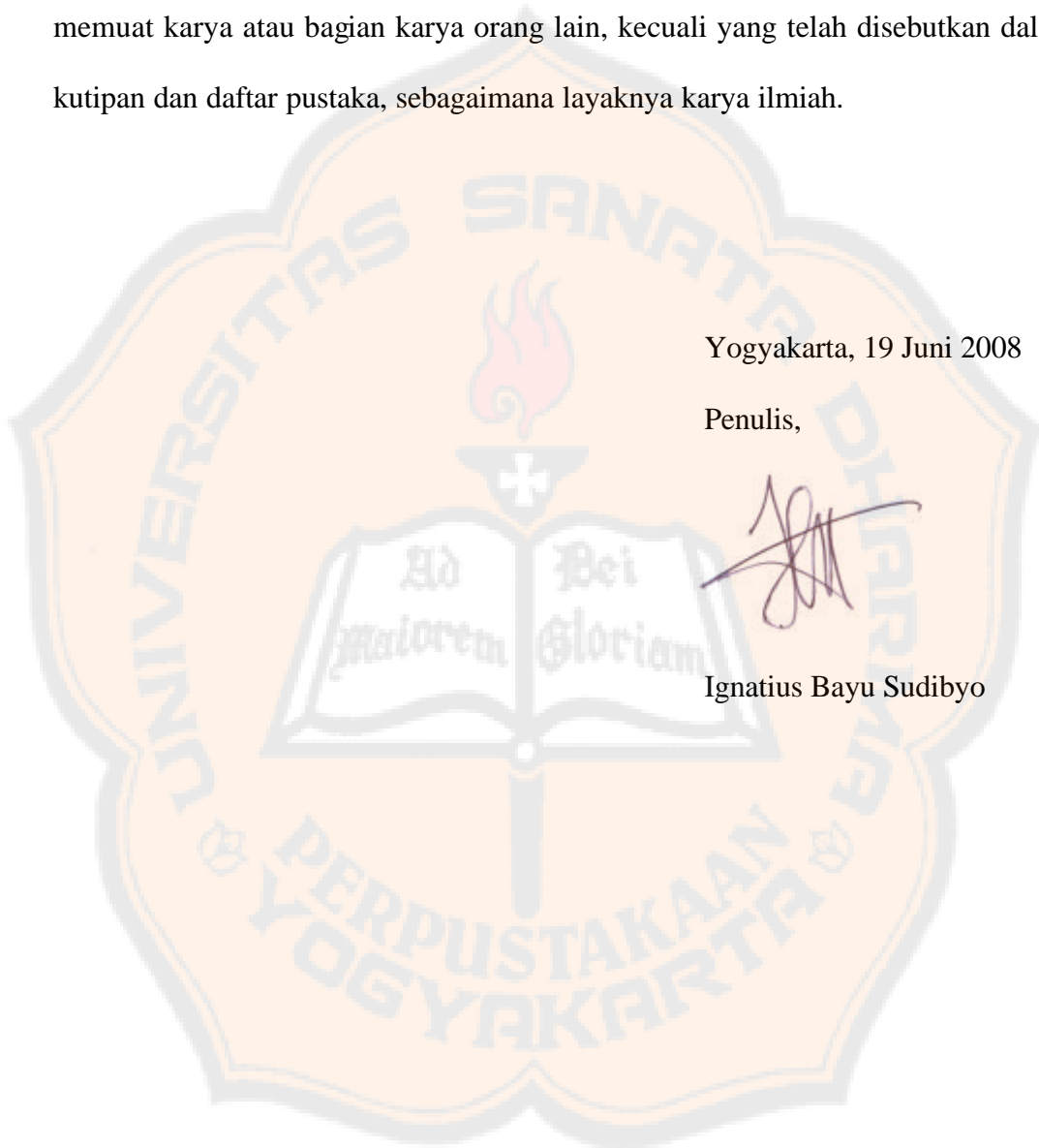
Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 19 Juni 2008

Penulis,



Ignatius Bayu Sudibyo





## ABSTRAK

Ignatius Bayu Sudibyo : Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta  
Dipandang dari Berbagai Komponen Masyarakat (Militer, Mahasiswa, dan Pemerintah).

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis : 1) penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro, 2) faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974, dan 3) kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode historis, pendekatan multidimensional, dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah 1) adanya rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro karena ambisi masing-masing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan sebagai orang terkuat kedua, 2) pengaruh Jenderal Soemitro mendorong keterlibatan mahasiswa untuk menjatuhkan Mayor Jenderal Ali Moertopo, dan 3) Presiden Soeharto menyingkirkan keduanya dengan membubarkan Aspri (Asisten Pribadi Presiden) dan mengambil alih Pangkoptik (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

**ABSTRACT**

Ignatius Bayu Sudibyو : The Incident of January 15, 1974 in Jakarta Perceived from Various Component of Society (Military, University Students, and Government).

The research aims to describe and analyse : 1) the factors caused by rivalry between General Major Ali Moertopo and General Soemitro, 2) the factors supporting the involvement of the university students in the Incident of January 15, 1974, and 3) President Soeharto's policy in reacting the incident.

The research methodologies were historical method, multidimensional approach, and writing using analytical descriptive method.

The results of this research are : 1) the rivalry between General Major Ali Moertopo and General Soemitro caused by their ambition to get influence and power as the second powerful man, 2) General Soemitro's influence triggered the university student's involvement to defeat General Major Ali Moertopo, and 3) President Soeharto eliminated them and dismissed Aspri (President Personal Assistant) and took over Pangkopkamtib (The Commander of Security and Order Reestablishment).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kebesaran kasih dan karunia Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan jenjang strata satu di Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sejarah, Universitas Sanata Dharma, dan bagi para pembaca yang berminat mempelajari sejarah Peristiwa 15 Januari 1974.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis terbantu dengan bimbingan, fasilitas, dan dukungan moral yang telah diberikan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah.
4. Bapak Profesor Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku pembimbing I.
5. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd, selaku pembimbing II.
6. Seluruh dosen Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M., Bapak Drs. Sutardjo Adikusilo, J.R., S.Th, Bapak Drs. Y.R. Subakti, M.Pd, Bapak Drs. A.A. Padi, Ibu Dra. Theresia Sumini, M.Pd, Bapak Drs. H.B. Herry Santosa, M.Hum, Bapak Drs. Silverio Aji Sampurno, M.Hum, Bapak Drs. Sandiwan Suharso, Ibu Dra. Lucia Juningsih, M.Hum, Mas Robertus Marsidig, dan terkhusus kepada sejarawan panutan saya (alm) Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., yang telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis, baik di dalam maupun di luar lorong-lorong perkuliahan.
7. Bapak Wakil Rektor III beserta staf yang memberikan beasiswa untuk membantu studi dan penyusunan skripsi ini serta kepada seluruh karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma.
8. Bapakku dan ibuku yang telah memberikan segalanya bagi penulis. Mohon maaf kalau lama harus menunggu berita kelulusan penulis.
9. Adikku Rosa Delima Indriastuti, S.Pd, Emilda Oktaviani, Mas Heribertus Sugiri, dan keponakanku "Jared".

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Mas Yanto, Mbak Cris, dan Pakde Waluyo yang telah memberikan banyak informasi untuk menyempurnakan skripsi ini. Pak Walidi yang tersenyum mendengarkan penulis menyanyi, kalau tidak salah judulnya *Ono Rondo Ngarep Umahku*, ciptaan Mus Mulyadi. Begitu juga Mbah Ndilah, Agung Sudarmanto, Andre Pepet, Nico, Ari, Vincent, Petrus, Geol “Asisten Pribadi PRT” (Aspri), dan Juniarsih.
11. Teman dan sahabat-sahabat penulis di Pendidikan Sejarah angkatan 2002, Ambon S.Pd, Parut S. Sos, Sigit “Mbah Dharmo Vodka”, Mbunjo S. Pd, Ujang Pantry, Agus Tulasno S.Pd, (alm) Widi Widayat, (alm) Eman Yance Metmey, Wahyu Wirawan S. Pd, Pak Leo S. Pd, Eka Jaya S. Pd, Mellky S. Pd, Hendrikus Cristianus S.Pd. Terkasih Mbak Arum S. Pd dan dik Putri. Begitu juga rekan-rekan angkatan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih juga untuk Vinco dan HMPS yang telah menyelenggarakan diskusi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan serpihan-serpihan hasil skripsi ini.
12. Bapak Joko Wicoyo yang meluangkan waktunya untuk memperbaiki abstrak berbahasa Inggris.
13. Pusat Informasi *Kompas* di Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh data.
14. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas Sanata Dharma, khususnya Nico, Zico, dan Ndaru, S.Pd yang telah membantu terjemahan sumber berbahasa Inggris. Kepada Bapak Melius Ma’u, S.H., sebagai pelatih kepala yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi asisten pelatih dan memimpin tim dalam Turnamen Rektor USD Cup III 2007 dan Kompetisi Sepak Bola Devisi I PSSI cabang Kota Yogyakarta tahun 2008.

“Tak ada gading yang tak retak”, karya ini masih jauh dari sempurna. Kesalahan yang ada sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN KEASLIAN KARYA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kajian Teori .....	18
G. Hipotesis .....	36
H. Metodologi Penelitian .....	36
I. Sistematika Penulisan .....	41

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>BAB II</b>	<b>RIVALITAS ANTARA MAYOR JENDERAL</b>	
	<b>ALI MOERTOPO DENGAN JENDERAL SOEMITRO ..</b>	42
	A. Karir Militer Ali Moertopo dan Soemitro .....	42
	B. Perebutan Pengaruh dan Kedudukan	
	Sebagai Orang Terkuat Kedua .....	50
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR PENDORONG KETERLIBATAN</b>	
	<b>MAHASISWA DALAM PERISTIWA 15 JANUARI 1974</b>	58
	A. Dominasi Modal Jepang .....	58
	B. Soemitro Mempengaruhi Gerakan Mahasiswa .....	66
	C. Memanfaatkan Kunjungan Tanaka .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PRESIDEN SOEHARTO</b>	
	<b>DALAM MENANGGAPI TERJADINYA</b>	
	<b>PERISTIWA 15 JANUARI 1974 .....</b>	79
	A. Membubarkan Aspri dan	
	Mengambil Alih Pangkoptamtib .....	79
	B. Menyingkirkan Soemitro dan Ali Moertopo .....	81
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	88
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	89
	<b>LAMPIRAN .....</b>	94

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Foto Mayor Jenderal Ali Moertopo.

Lampiran 2 : Foto Jenderal Soemitro Sebagai Pangkoptantib.

Lampiran 3 : Foto kerusakan yang terjadi di Pasar Senen dan Jalan Gajah Mada.

Lampiran 4 : Foto kerusakan yang terjadi di Jalan Pecenongan, Sudirman, dan Glodok.

Lampiran 5 : Peta lokasi kerusakan Peristiwa 15 Januari 1974.

Lampiran 6 : Silabus.

Lampiran 7 : Rencana Pembelajaran (RPP).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1968 pejabat Presiden Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti lima tahun (1968-1973) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XLIV tahun 1968.<sup>1</sup> Pemerintahan orde baru mengemban tugas meningkatkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dengan mengubah kebijakan politik luar negeri dari anti neo kolonialisme dan imperialisme (neokolim) menjadi pro modal asing.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan ini, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi pasar dengan menetapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1968.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi di bawah kekuasaan Soeharto telah memberikan keistimewaan bagi sekelompok militer dalam menjalankan praktek politik dan bisnis dengan pengusaha non pribumi yang dikenal dengan istilah *cukongisme*.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap para *cukong* dan intervensi yang terlalu dominan dalam pemerintahan memicu gerakan protes mahasiswa terhadap organisasi Staf Pribadi Presiden (Spri) pada tahun 1968. Anggota Spri terdiri dua tim kelompok sipil dan

---

<sup>1</sup> Lihat Tim Dokumentasi Presiden Republik Indonesia (ed: G Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin), *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*, Jakarta, Citra Lamtoro Gung, 1991, hlm 267.

<sup>2</sup> Lihat Baskara T. Wardaya, *Membongkar Supersemar. Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*, Yogyakarta, Galang Press, 2007, hlm 16.

<sup>3</sup> Lihat Mohtar Mas' oed, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm 99.

<sup>4</sup> Istilah *cukongisme* berasal dari bahasa Hokkien yang berarti "majikan". Di Indonesia penggunaan *cukongisme* terbatas pada hubungan kelompok militer dengan pengusaha Cina (cukong). Lihat Ian Chalmers, *Konglomerasi : Negara Dan Modal Dalam Negeri Industri Otomotif Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm 140.



dua belas orang perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka yang paling populer dari kelompok militer adalah Mayor Jenderal (Mayjen) Alamsjah Ratu Perwiranegara, Brigadir Jenderal (Brigjen) Soerjo Wiryohadiputro, Mayjen Yoga Sugomo, Kolonel Ali Moertopo, dan Brigjen Sudjono Humardhani<sup>5</sup>. Untuk meredam protes, Soeharto kemudian membubarkan Spri pada tahun 1968 dan membentuk Aspri (Asisten Pribadi Presiden)<sup>6</sup> dengan menempatkan kembali Ali Moertopo, Soerjo, dan Sudjono Humardhani sebagai pembantu pribadinya.

Pada tahun 1970 gerakan protes mahasiswa berlanjut dengan isu korupsi dan pola pembangunan “mercusuar”, mengulangi gaya pemerintahan Presiden Sukarno. Mahasiswa menolak proyek Taman Mini Indonesia Indah yang lahir dari gagasan Siti Suhartinah Soeharto (Tien Soeharto). Gerakan protes mahasiswa gagal mencapai sasaran setelah militer melakukan tindak represif terhadap kelompok-kelompok gerakan anti Taman Mini yang dipelopori Arif Budiman dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Hadji Cornelius Princen pada tahun 1972.<sup>7</sup> Gerakan mahasiswa kemudian berlanjut pada periode 1973 sampai 1974 dengan isu *cukongisme*, dominasi modal Jepang, dan penolakan terhadap sekelompok jenderal pembantu pribadi Soeharto.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1973/1974, negara menghasilkan pendapatan yang sangat besar dari sektor minyak (oil boom).<sup>8</sup> Sektor penanaman modal di bidang manufaktur meningkat pesat dan menempatkan Jepang berada pada posisi pertama, baik dalam jumlah

---

<sup>5</sup> Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, *op.cit.*, hlm 178.

<sup>6</sup> Lihat Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986, hlm 346.

<sup>7</sup> “Indonesia. Konflik Dalam Hajat Dan Hambatan”, *Tempo*, Tahun II, 30 Desember 1974, hlm 6.

<sup>8</sup> “Penerimaan RAPBN 1973/1974” *Business News*, Tahun ke XVII, No. 2345, Jum'at, 12 Januari 1973, hlm 2.

nilai modal maupun pembangunan proyek. Dominasi modal Jepang dan keterlibatan sekelompok militer di dalamnya memicu gerakan protes mahasiswa yang tidak pernah putus sejak tahun 1968. Gerakan mahasiswa tahun 1973 sampai 1974 dikenal sebagai periode anti Jepang yang disertai isu rasial terhadap etnis Cina. Situasi saat itu sangat kompleks karena dalam dimensi ruang dan waktu yang bersamaan, muncul rivalitas (persaingan) di kalangan elit Angkatan Darat.

Menurut Mohammad Sadli, dominasi modal asing terjadi karena UU PMA yang ditetapkan pada tahun 1967 memberikan insentif dan jaminan bagi negara-negara industri untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia. Modal Amerika Serikat dan negara Barat masuk di bidang migas dan pertambangan umum, sedangkan Jepang mendominasi sektor penanaman modal di bidang industri. Dampak kesenjangan ekonomi pasar yang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi makro dan memperkuat ekonomi non pribumi membawa keresahan dari dalam kampus. Laju pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan sosial dan sebagian masyarakat bergerak menolak kapitalisme. Gejala ini bersifat regional karena terjadi juga di Bangkok (Thailand).<sup>9</sup>

Ketika suasana anti Jepang semakin meningkat, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta sejak tanggal 14 Januari 1974. Kunjungan Tanaka merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Jepang untuk mempererat hubungan ekonominya dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Menurut keterangan *Tempo*, topik utama

---

<sup>9</sup> M. Sadli, "Tentang Pasar dan Ekonomi Soeharto" dalam *Tempo*, 10 Februari 2008 (Edisi Khusus Soeharto), hlm 73. M. Sadli pada masa awal orde baru menjabat sebagai anggota Spri (Staf Pribadi Presiden) dan Ketua Tim Teknis Penanaman Modal Asing (PMA). Tulisan ini ditulis M. Sadli dua tahun sebelum ia wafat.

kunjungan Tanaka adalah keinginan Jepang untuk mencari sumber minyak bumi sebagai kebutuhan pokok industri di Jepang yang sudah tidak mungkin tergantung pada negara-negara di Timur Tengah.<sup>10</sup>

Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1974 bertepatan dengan pertemuan kenegaraan antara Soeharto dan Tanaka terjadi kerusuhan massal yang dinilai sebagai peristiwa paling menghebohkan setelah “Tritura” (Tiga Tuntutan Rakyat) tahun 1966. Peristiwa yang terjadi di penghujung Repelita I (Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama, 1969-1974) itu dikenal dengan nama “Malari” atau singkatan dari Malapetaka Lima Belas Januari. Peristiwa itu meletus setelah enam bulan lamanya pemerintahan Soeharto mendapatkan tekanan karena kebijakan ekonominya banyak didominasi oleh modal Jepang. Dalam catatan sejarah Jepang, inilah untuk pertama kalinya seorang perdana menteri berkunjung ke suatu negara disambut dengan kerusuhan massal.<sup>11</sup>

Peristiwa itu diawali demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Mahasiswa menolak dominasi modal Jepang, korupsi, dan menuntut dibubarkannya organisasi Aspri yang dinilai sebagai “calo” politik dan bisnis dengan Jepang. Anggota Aspri terdiri dari mantan anggota Spri yang memiliki hubungan dekat dengan Soeharto sejak di Komando Daerah Militer (Kodam) Diponegoro (Jawa Tengah), yaitu Ali Moertopo sebagai Aspri khusus bidang politik, Soerjo bidang keuangan, dan Sudjono Humardhani di bidang ekonomi yang berperan penting dalam hubungan bisnis dengan Jepang. Alamsjah Ratu Perwiranegara yang sebelumnya menjadi koordinator Spri tidak masuk dalam

---

<sup>10</sup> “Ayo, Bermain Dengan Jepang”, *Tempo*, (laporan khusus tentang Peristiwa 15 Januari 1974), 19 Januari 1974, hlm 43.

<sup>11</sup> “Tanahpun Jadi Kokoh”, *Tempo*, 2 Februari 1974, hlm 13.

organisasi ini karena intrik Ali Moertopo dan pada tahun 1971, Alamsjah dikirim sebagai Duta Besar di Negeri Belanda.<sup>12</sup>

Kerusuhan massal terjadi hingga tanggal 16 Januari 1974 dengan pusat pembakaran di Jalan Sudirman, Husni Thamrin, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Matraman sebelah selatan, daerah Roxy di sebelah barat, Cempaka Putih, dan Jakarta By-pass di sebelah timur. Proyek Senen, PT. Astra, dan empat perusahaan asing termasuk *coca-cola* rusak dibakar oleh massa.<sup>13</sup> Menurut keterangan Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Ali Sadikin, sebanyak dua ratus enam puluh sembilan mobil, sembilan puluh empat motor, dan lima bangunan rusak terbakar.<sup>14</sup> Peristiwa itu berdampak bagi masyarakat kecil, tercatat 3.500 orang kehilangan pekerjaan, sebelas orang dinyatakan meninggal dunia, tujuh belas orang luka berat, dan seratus dua puluh orang mengalami luka ringan.<sup>15</sup>

Sepintas kerusuhan itu tampak sebagai puncak sentimen terhadap dominasi modal asing yang gejalanya sudah terjadi sejak awal orde baru. Namun dari berbagai sumber yang diperoleh, kerusuhan itu lebih menunjuk pada puncak rivalitas (persaingan) dua jenderal Angkatan Darat yang paling berpengaruh setelah Soeharto, yaitu Ali Moertopo dengan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro. Rivalitas dua jenderal yang sebenarnya menjadi alat politik Soeharto ini menjadi

---

<sup>12</sup> Lihat David Jenkins, *Suharto and His General : Indonesian Military Politics 1975-1983*, Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1984, hlm 23. Mengenai peran Sudjono Humardhani, lihat secara keseluruhan Michael Malley, "Soedjono Hoemardhani and Indonesian Japanese Relations 1966-1974", *Indonesia*, Southeast Asia Program, Cornell, 1989.

<sup>13</sup> "Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah", *Tempo*, Tahun III, No. 47, tanggal 26 Januari 1974, hlm 5. Lihat pula lampiran 5 peta lokasi kerusuhan Peristiwa 15 Januari 1974, hlm 98.

<sup>14</sup> *ibid.*, hlm 6.

<sup>15</sup> *ibid.*, hlm 7.

perhatian publik setelah Sekber (Sekretariat Bersama) Golkar memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971. Beredar isu, bahwa keduanya sama-sama berambisi untuk menggantikan kedudukan Soeharto di kemudian hari.

Pelaku utama yang menciptakan kerusuhan itu masih menjadi kontroversi. Proses penyelidikan (hukum) tidak berjalan objektif dan menurut sejarawan Asvi Warman Adam, kerusuhan itu menjadi misteri dalam sejarah Indonesia.<sup>16</sup> Berbagai tuduhan ditujukan kepada Ali Moertopo yang telah melakukan skenario dalam menciptakan situasi untuk menjatuhkan Soemitro dan gerakan mahasiswa. Heru Cahyono dalam penelitiannya secara eksplisit menunjuk Ali Moertopo bersama orang-orang binaannya dari unsur eks DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dan anggota tidak resmi GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) sebagai pelaku utama yang menciptakan kerusuhan itu.<sup>17</sup>

Kasus menarik justru terjadi setelah peristiwa itu. Meskipun Soeharto tampak tenang, tetapi ia mengambil kebijakan yang tegas dengan membubarkan Aspri, mengambil alih Pangkopkamtib dan menggeser posisi berapa jenderal terkemuka Angkatan Darat. Ini menunjukkan, bahwa peristiwa itu perlu dilihat dari sisi Soeharto dalam proses pematangan kekuasaannya.

Mengingat peristiwa itu sangat kompleks dan menarik untuk diketahui dari setiap sisinya, maka penulis akan menganalisisnya dalam tiga perspektif, yaitu militer, mahasiswa, dan pemerintah, khususnya bagi Soeharto seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pembahasan yang pertama akan melihat perjalanan karir militer

---

<sup>16</sup> Lihat Asvi Warman Adam, "Malari 1974 Dan Sisi Gelap Sejarah" *Kompas*, Kamis 16 Januari 2003, hlm 5.

<sup>17</sup> Lihat Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980. Dari Pemilu Sampai Malari*, Jakarta, Sinar Harapan, 1992, hlm 164-166.

Ali Moertopo dan Soemitro untuk mengetahui hubungan keduanya dengan Soeharto. Dalam studi politik militer masa orde baru, rivalitas itu mulai tampak dalam Golkar pasca pemilu 1971. Soemitro berpengaruh di Hankam dan menguasai langsung pasukan di lapangan, sedangkan Ali Moertopo berpengaruh di Bappilu dengan menggunakan Opsus, Sekber Golkar,<sup>18</sup> dan CSIS (Center for Strategic and International Studies)<sup>19</sup> sebagai basis kekuatannya.

Pembahasan kedua akan dianalisis faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974 dengan melihat situasi politik pada saat itu. Dalam suasana rivalitas itu, Soemitro sebagai Pangkopkamtib telah membuka ruang bagi gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan Ali Moertopo. Muncul penafsiran yang secara implisit dinyatakan oleh William Lidle, bahwa rivalitas para jenderal kepercayaan Soeharto telah menjadi unsur tambahan yang memicu terjadinya gerakan protes mahasiswa.<sup>20</sup> Karena keterbatasan sumber, penulis tidak akan membahas lebih khusus siapa aktor utama yang menciptakan kerusuhan itu, tetapi lebih melihat pra kondisi dan kebijakan Soeharto dalam menanggapi terjadinya peristiwa itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Lihat Leo Suryadinata, *Golkar Dan Militer*, Jakarta, LP3ES, 1992, hlm 56.

<sup>19</sup> Pusat studi atau *think thank* orde baru lahir dari gagasan Ali Moertopo dan didirikan oleh Harry Tjan Silalahi, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi pada tahun 1971. Lihat tulisan singkat Jusuf Wanandi, "The Center for strategic and International Studies" dalam *Indonesia in the Soeharto Years Issue, Incident and Images*, Jakarta, Lontar, 2005, hlm 64-65.

<sup>20</sup> Lihat William Lidle, *Partisipasi Dan Partai Politik. Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Jakarta, Grafiti Press, 1992, hlm 199.

1. Apa yang menjadi penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974?
3. Bagaimana kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.
3. Untuk mendeskripsi dan menganalisis kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu  
Untuk menghasilkan mutu kualitas penulisan sejarah ilmiah yang kemudian dapat memberikan sumbangan bagi ilmu sejarah.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma  
Untuk menambah koleksi kepustakaan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam merekonstruksi sejarah.
3. Bagi Peneliti



Untuk memperluas wawasan, daya kritis, dan kesadaran sejarah.

### E. Tinjauan Pustaka

Penulis akan mengklasifikasikan sumber-sumber yang diperoleh menjadi dua jenis berdasarkan urutan penyampaiannya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Sejarah*, sumber primer adalah kesaksian yang disampaikan oleh pelaku sejarah atau saksi mata yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut.<sup>21</sup> Melengkapi pendapat di atas, Louis Gottschalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), mengartikan sumber primer sebagai kesaksian dari seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan menggunakan alat mekanis yang dapat merekam peristiwa itu. Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh orang yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut. Sumber primer tidak perlu “asli” dilihat dari keaslian dokumen (bukti fisik). Sumber primer hanya harus “asli” dalam artian, kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari tangan pertama. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata atau seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.<sup>22</sup>

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

*Hati Nurani Seorang Demonstran*, karangan Hariman Siregar. Beberapa bagian buku ini berisi pidato Hariman Siregar selaku Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, misalnya pidato “Pernyataan Diri Mahasiswa” yang disampaikan dalam “malam keprihatinan” pada tanggal 31 Desember 1973.

<sup>21</sup> Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2001, hlm 98.

<sup>22</sup> Lihat Louis Gottschalk (terjemahan Nugroho Notosusanto), *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1985, hlm 35-36.



*Aspri Tidak Punya Wewenang Eksekutif*, wawancara staf *Tempo* George Junus Adicondro dengan tokoh Aspri, Mayor Jenderal Sudjono Humardhani. Wawancara ini dimuat dalam majalah *Tempo* pada tanggal 19 Januari 1974 (tanpa mengalami perubahan). Isi dari wawancara ini adalah pertanyaan tentang peran Aspri dan hubungan bisnis Indonesia dengan Jepang.

Penulis mengelompokkan beberapa artikel penting dari *Kompas* dan *Tempo* yang ditulis mulai tahun 1973 sampai 1974 sebagai salah satu sumber primer. Menurut Helius Sjamsuddin dalam bukunya *Metodologi Sejarah*, surat kabar memberikan kontribusi penting bagi sejarawan dan memiliki lima fungsi, yaitu : (a) surat kabar diklasifikasikan sebagai peninggalan atau dokumen (b) surat kabar mencatat peristiwa atau kejadian penting sehari-hari, (c) surat kabar mencatat pandangan-pandangan politik, sosial, dan sekaligus sebagai medium propaganda, (d) surat kabar melaporkan isu-isu dan analisis- analisis yang tajam mengenai berbagai macam aspek kehidupan, dan (e) surat pembaca dalam surat kabar memuat keluhan dan opini mengenai keadaan masyarakat pada suatu periode tertentu.<sup>23</sup> Meskipun bentuk fisik (jenis kertas) yang penulis peroleh sudah tidak asli (foto copy/print dari komputer),<sup>24</sup> tetapi laporan surat kabar ini dihasilkan oleh orang yang hidup sejaman, dan biasanya wartawan meliput langsung suatu peristiwa besar yang terjadi.

Artikel *Kompas* dan *Tempo* yang menjadi sumber primer adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Lihat Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Ombak, 2007, hlm 113-114.

<sup>24</sup> Artikel *Kompas* yang terbit tahun 1973 sampai 1974 penulis peroleh di Pusat Informasi Kompas, Jalan Kotabaru, Yogyakarta. Sedangkan artikel *Tempo*, penulis peroleh di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, bagian koleksi majalah dan jurnal berkala.

“Presiden Sendiri Sekarang Pangkopkamtib dan Aspri Ditiadakan”, *Kompas* Selasa 19 Januari 1974. Berisi laporan pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Menhankam/Pangab Jenderal Panggabean, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro, Wapangkopkamtib Laksamana Sudomo, Wakil Presiden Hamengku Buwono IX, dan wakil dari partai politik mengenai keputusan presiden berkaitan dengan penyelesaian Peristiwa 15 Januari 1974. Laporan ini berasal dari keterangan Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono pada tanggal 18 Januari 1974.

“Yoga Dan Sutopo Temui Presiden”, *Kompas* Selasa 19 Januari 1974. Berisi laporan pelaksanaan serah terima jabatan antara Kepala Bakin lama Letnan Jenderal Sutopo Juwono dan Mayor Jenderal Yoga Sugomo kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 18 Januari 1974.

“Jenderal Soemitro Meletakkan Jabatan Atas Permohonan Sendiri”, *Kompas* 22 Maret 1974. Berisi laporan penyerahan jabatan (pengunduran diri) Jenderal Soemitro di Aula Departemen Hankam kepada Menhankam/Pangab Jenderal Panggabean pada tanggal 21 Maret 1974, disaksikan oleh Laksamana Sudomo, Jenderal Surono, dan sejumlah pejabat teras Hankam.

“Pengangkatan Sutopo Juwono Jadi Dubes Belanda Disetujui”, *Kompas* 6 April 1974. Berisi laporan singkat pengangkatan Mantan Kepala Bakin Letnan Jenderal Sutopo Juwono menjadi Duta Besar di Negeri Belanda menggantikan mantan koordinator Spri Letnan Jenderal Alamsjah Ratu Perwiranegara. Diumumkan oleh Departemen Luar Negeri R I pada tanggal 4 April 1974.

“Hariman Dituduh Merongrong Pemerintahan Yang Syah”, *Kompas* 2 Agustus 1974. Berisi laporan sidang perkara Hariman Siregar berkaitan dengan

Peristiwa 15 Januari 1974 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 1974.

“Sidang Keempatpuluh tiga Perkara Hariman : Orang Yang Sudah Kena Tampar Jangan Ditampar Lagi!”, *Kompas* Selasa 8 Oktober 1974. Berisi laporan pembatalan pemeriksaan lanjutan saksi Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo) tentang perkara Hariman Siregar dan keterangan saksi Yopie Lassut.

“Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Enam Tahun Penjara Untuk Hariman Siregar”, *Kompas* Senin 23 Desember 1974. Berisi laporan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Hariman Siregar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1974.

“Ada Allahu Akbar Dari Luar”, *Tempo* 6 Oktober 1973. Berisi laporan demonstrasi mahasiswa pada tanggal 27 September 1973 tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Perkawinan di kantor DPR Jakarta.

“UI Dewan Siapa”, *Tempo* 6 Oktober 1973. Berisi laporan singkat pengangkatan Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia.

“Setangkai Bunga Putih Untuk Pronk”, *Tempo* 17 November 1973. Berisi laporan tentang sambutan sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia berkaitan dengan kunjungan Ketua IGGI Jan Pronk di Jakarta dan “kuliah kebun” yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Indonesia bersama Dorajatun Kuntjorojakti.

“Dilema Komunikasi Timbal Balik”, *Tempo* 8 Desember 1973. Berisi laporan tentang kunjungan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro ke berbagai kampus di Jawa pada bulan November hingga Desember tahun 1973. Dalam kunjungannya itu,

Soemitro membuka wacana “komunikasi dua arah” antara pemerintah dan masyarakat.

“H + SG + S = PSI”, *Tempo* 12 Januari 1974. Berisi laporan penolakan sepuluh mahasiswa Universitas Indonesia terhadap kepemimpinan Hariman Siregar sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam laporan *Tempo* ini, sepuluh mahasiswa tersebut diduga orang-orang Ali Moertopo.

“Katakanlah Dengan Senyum”, *Tempo*<sup>25</sup> 19 Januari 1974. Berisi laporan pertemuan mahasiswa dengan Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 11 Januari 1974 dengan pokok permasalahan, perilaku pejabat negara, peran Opsus, dan Aspri.

“Ayo Bermain Dengan Jepang”, *Tempo* 19 Januari 1974. Berisi laporan kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke beberapa negara di Asia Tenggara dan kunjungan terakhirnya ke Jakarta, mulai tanggal 14 Januari 1974. Laporan dari ini juga membahas tentang situasi di Jakarta menjelang kunjungan Tanaka.

“Tri Tura Baru 1974”, *Tempo* 19 Januari 1974. Berisi laporan aksi mahasiswa dan sejumlah eks tokoh laskar Ampera “66” menjelang kunjungan Perdana Menteri Tanaka dengan mengangkat isu “Tri Tura 1974” (korupsi, menolak modal asing, dan bubarkan Aspri).

“Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah”, *Tempo* 26 Januari 1974. Berisi laporan Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta.

---

<sup>25</sup> *Tempo* yang terbit pada tanggal 19 Januari 1974 adalah laporan khusus mengenai Peristiwa 15 Januari 1974 di Jakarta. *Tempo* pada halaman muka memberikan keterangan, bahwa artikel yang diterbitkan merupakan laporan pandangan mata para wartawan, seperti George Junus Adicondro dan Bur Rusuanto sebagai editor yang ikut terjun ke daerah Glodok (Jakarta).

“Setelah Suasana Anarki”, *Tempo* 26 Januari 1974. Berisi laporan kondisi masyarakat di Jakarta pasca terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

“Tanahpun Jadi Kokoh”, *Tempo* 26 Januari 1974. Berisi tentang laporan pertemuan terakhir antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka selama kunjungannya di Jakarta.

“Presiden Adalah Pangkoptim (Dan Tanpa Aspri)”, *Tempo* 2 Februari 1974. Berisi laporan pertemuan Presiden Soeharto berkaitan dengan penyelesaian masalah Peristiwa 15 Januari 1974 bersama Jenderal Panggabean, Jenderal Soemitro, Laksamana Sudomo, Wakil Presiden Hamengku Buwono IX, dan wakil dari partai politik pada tanggal 18 Januari 1974.

“Hidup Sederhana. Yang Dagang & Pemegang Saham”, *Tempo* 16 Maret 1974. Berisi laporan tentang kebijakan Presiden Soeharto tentang pola hidup sederhana bagi instansi dan pejabat negara berkaitan dengan Peristiwa 15 Januari 1974.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

*Militer Dan Politik Di Indonesia* (terjemahan), karangan Harold Crouch. Buku ini membahas peran politik militer dari demokrasi terpimpin hingga awal orde baru. Pada bagian akhir, Crouch lebih memberikan penekanan pada kegiatan bisnis perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang mendapatkan keistimewaan dari Soeharto. Crouch membahas rivalitas internal Angkatan Darat yang dinilai sebagai rivalitas kelompok antara Aspri yang dipimpin Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Hankam yang dipimpin Jenderal Soemitro. Menurut analisis

Crouch, dua tokoh ini sama-sama berpengaruh dan berambisi untuk menjadi yang terpopuler di lingkaran elit Angkatan Darat.

*Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980. Dari Pemilu Sampai Malari*, karangan Heru Cahyono. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah peran Ali Moertopo dan Sudjono Humardhani dalam konsolidasi Golkar menjelang pemilu 1971. Ali Moertopo dan Sudjono Humardhani berhasil menarik organisasi-organisasi Islam, yaitu GUPPI yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap pemerintah orde baru. Buku ini juga membahas tentang keterlibatan Ali Moertopo dan anggota tidak resmi GUPPI dalam Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Meskipun, secara organisatoris GUPPI tidak terlibat secara langsung, tetapi beberapa anggotanya menjadi orang-orang binaan Ali Moertopo.

*Memori Jenderal Yoga*, karangan B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin. Buku ini merupakan catatan pengalaman penting di luar pribadi Jenderal Yoga Sugomo. Pasca Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), Yoga Sugomo diangkat menjadi Kepala Bakin menggantikan Letnan Jenderal Sutopo Juwono, dan salah satu tugasnya adalah menyusun laporan tentang Peristiwa 15 Januari 1974. Buku ini kurang objektif, karena beberapa kisah sengaja tidak diceritakan oleh Jenderal Yoga. Secara eksplisit, buku ini menunjuk mahasiswa sebagai penggerak terjadinya kerusuhan yang didukung oleh kelompok eks Partai Sosialis Indonesia (PSI).

*Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, karangan Ramadhan K.H. Buku ini adalah otobiografi Jenderal Soemitro yang isinya adalah penuturan Soemitro tentang karir militer, isu rivalitasnya dengan Ali Moertopo,

dan Peristiwa 15 Januari 1974. Buku ini menjadi referensi penting karena Soemitro adalah salah satu tokoh utama dalam Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari).

*Politik Dan Ideologi Mahasiswa. Pembentukan Dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, karangan Francois Raillon. Buku ini merupakan hasil penelitian seorang sarjana dari Prancis, yaitu Francois Raillon mengenai gerakan mahasiswa pada masa awal orde baru hingga Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Sumber yang digunakan dalam penelitian Raillon adalah kumpulan artikel dari surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* yang terbit di Bandung.

*Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*, karangan Rum Aly. Pembahasan dalam buku ini dimulai pada kurun waktu aktifnya gerakan mahasiswa dalam menentang kebijakan pemerintah orde baru. Buku ini banyak berbicara tentang gerakan mahasiswa Bandung menjelang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari).

*Bisnis Dan Politik. Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, karangan Yahya Muhaimin. Buku ini membahas tentang kebijakan ekonomi Indonesia yang dimulai pada era demokrasi parlementer (1950-1957) hingga orde baru. Buku ini menyajikan analisis dan catatan-catatan penting tentang kebijakan ekonomi orde baru terhadap modal asing, utang luar negeri, dan aktivitas bisnis kelompok militer dan para *cukong*.

*Indonesia 1974 : A Momentous Year*, dalam *Asian Survey* karangan Gary Hansen. Tulisan Gary Hansen membahas situasi politik di Indonesia pada tahun 1974. Menurut analisis Gary Hansen, tahun 1974 merupakan saat yang panas bagi



Indonesia, setidaknya muncul banyak konflik yang terlempar ke permukaan. Demonstrasi mahasiswa lebih menunjuk pada penolakan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi orde baru yang dinilai hanya menguntungkan kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan.

*Toward A Class Analysis Of The Indonesian Military Bureaucratic State*, dalam *Indonesia*, karangan Richard Robinson. Tulisan ini menerangkan tema yang cukup menarik dan sangat membantu dalam menganalisis birokrasi militer di Indonesia, yaitu “*kapitalisme dan birokrasi negara di Indonesia : 1965-1975*”. Tulisan ini menyajikan data-data aktifitas bisnis militer di Indonesia, termasuk Presiden Soeharto beserta keluarganya.

*Suharto and His Generals Indonesian Military Politics 1975-1983*, karangan David Jenkins. Salah satu bagian dari buku ini yang sangat membantu dalam menganalisis perpecahan para jenderal di lingkungan dalam Soeharto adalah sub bab “the core group around Suharto” atau “tim inti di sekitar Suharto”. Menarik dari analisis David Jenkis adalah kelompok jenderal-jenderal terkemuka yang berada di dalam lingkaran inti kekuasaan Soeharto itu pecah menjadi dua antara kelompok “inti sebelah luar” dengan tokohnya antara lain Soemitro dan kelompok “pragmatis-politis” atau inti sebelah dalam yang diwakili oleh kelompok Ali Moertopo.

*Indonesia 1972 : The Solidification Of Military Control*, karangan Allan A. Samson, dimuat dalam *Asian Survey*, February 1973. Tulisan ini membahas tentang penyatuan kontrol militer di Indonesia pada tahun 1972. Dalam tulisannya, Allan A. Samson melihat persaingan perwira-perwira tinggi Angkatan



Darat berawal dari usaha pengendalian Golkar pasca Pemilu 1971. Dalam analisisnya, Allan A. Samson menyebut tiga kekuatan itu adalah Mayor Jenderal Ali Moertopo di Bappilu, Jenderal Amirmachmud di Depdagri, dan Jenderal Soemitro di Hankam.

*Soedjono Hoemardhani And Indonesian-Japanese Relations 1966-1974*, dalam *Indonesia*, karangan Michael Malley. Tulisan ini diterbitkan oleh majalah ilmiah *Indonesia*, Cornell Southeast Asian Program. Tulisan ini berbicara tentang peran Sudjono Humardhani dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang. Sudjono Humardhani adalah anggota Aspri bidang ekonomi yang menjadi orang kepercayaan Soeharto, termasuk sebagai pembantu spiritualnya.

“The Military : Structur Procedures and Effects on Indonesia Society”, karangan Ulf Sundhaussen, dalam *Political Power and Communication in Indonesia* (ed Karl D. Jackson and Lucian Pye). Karangan Ulf Sundhaussen ini lebih banyak membicarakan organisasi internal militer di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Ulf Sundhaussen juga membicarakan organisasi Kopkamtib yang lahir pada masa kudeta Letnan Kolonel Untung pada tahun 1965 dan organisasi-organisasi kecil di sekitar Soeharto.

## **F. Kajian Teori**

### 1. Persaingan

#### 1.1. Terminologi

Persaingan atau rivalitas dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, di mana perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian publik. Persaingan

menunjuk pada tindakan dari manusia itu untuk memperoleh kedudukan tertentu atau *rivalry*. Dalam suasana persaingan, perorangan atau kelompok akan mencari usaha-usaha yang menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.<sup>26</sup>

Dalam buku *Sosiologi. Teks Pengantar Dan Terapan* dengan editor J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, persaingan diartikan sebagai kompetitif. Persaingan dikategorikan sebagai proses sosial yang bersifat *disosiatif*, sebagai lawan dari proses sosial yang *asosiatif* (kerja sama atau kooperatif). Persaingan diartikan sebagai perjuangan dalam memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat untuk mempertahankan suatu kelestarian hidup. Sebagai proses sosial yang bersifat *disosiatif*, persaingan akan diuraikan dalam kajian teori ini dengan melihat tipe dan fungsinya, dilanjutkan dengan memahami kontravensi (contravention) sebagai tahapan menuju terjadinya konflik.<sup>27</sup>

## 1.2. Tipe dan Fungsi Persaingan

### 1.2.1. Tipe Persaingan

Persaingan memiliki dua tipe, yaitu : a) persaingan yang bersifat pribadi atau personal, dan b) persaingan yang tidak bersifat pribadi atau impersonal. Persaingan yang bersifat pribadi dapat digambarkan dengan persaingan dua orang secara langsung untuk memperoleh kedudukan dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan persaingan yang tidak bersifat pribadi digambarkan pada persaingan antar kelompok-kelompok manusia, tetapi tidak menyangkut masalah pribadi,

---

<sup>26</sup> Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm 85.

<sup>27</sup> Lihat J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 64-65.

misalnya persaingan dua perusahaan besar untuk mendapatkan monopoli dagang di suatu wilayah tertentu.<sup>28</sup>

Tipe-tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk persaingan, misalnya : a) persaingan di bidang ekonomi. Persaingan ini dapat terjadi karena terbatasnya persediaan barang bila dibandingkan dengan jumlah konsumen atau terbatasnya jumlah konsumen yang berdaya beli dibandingkan dengan jumlah barang yang didistribusikan ke pasar oleh para produsen, b) persaingan di bidang kebudayaan. Dua kebudayaan yang bertemu dapat saling bersaing, seperti persaingan di bidang pendidikan dengan dikenalkannya sistem evaluasi dan kurikulum yang baik, dan c) persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. Persaingan model seperti ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat keinginan untuk diakui sebagai pribadi atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpendang.<sup>29</sup>

### 1.2.2. Fungsi Persaingan

Fungsi persaingan dalam batas-batas tertentu mempunyai lima fungsi, yaitu :

a) menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif. Semakin banyak sesuatu yang dihargai (nilai), maka semakin tinggi pula keinginan manusia untuk memperolehnya, b) merealisasikan suatu jalan di mana nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian publik dapat tersalurkan dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing, c) alat seleksi sosial untuk menempatkan orang pada kemampuan serta kedudukannya, dan d) menyaring manusia dengan kemampuan masing-masing sehingga terdapat

---

<sup>28</sup> *loc.it.*,

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 86-87.

pembagian kerja (fungsional) yang efektif. Emile Durkheim menggambarkan sebagai “the social division of labor”.<sup>30</sup>

### 1.3. Pertentangan atau Pertikaian

Persaingan mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi pertentangan atau pertikaian. Sebelum memasuki tahap pertentangan atau pertikaian, muncul gejala-gejala, seperti perasaan tidak senang yang disembunyikan, kebencian terhadap orang lain, dan memiliki rencana sesuatu terhadap seseorang. Dalam ilmu sosial, gejala ini disebut sebagai *contravention*. Pada hakekatnya, *contravention* merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dengan pertikaian atau pertentangan. Gejala ini lebih menunjuk pada sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain, akan tetapi belum mencapai tahap pertikaian atau pertentangan yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan. *Contravention* sifatnya agak tertutup atau rahasia. Sebagai contoh adalah Perang Dingin (cold war). Dalam hal ini, lawan tidak diserang secara fisik, tetapi diserang secara psikologis untuk membuat lawan tidak tenang, karena itu sering disebut *psychological warfare* (perang urat syarat).<sup>31</sup>

Dalam persaingan, seseorang akan mencari dukungan dengan mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut *Kamus Analisa Politik*, pengaruh (influence) adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada sikap, keyakinan atau tingkah laku. Pihak yang berpengaruh

---

<sup>30</sup> *ibid.*, hlm 87-88.

<sup>31</sup> *ibid.*, hlm 90-93.

mempunyai ciri-ciri tertentu yang menyebabkan pihak lain terpengaruh olehnya, misalnya : a) kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki, b) sikap yang dapat dijadikan pedoman, dan c) mempunyai kekuasaan.<sup>32</sup>

Apabila mereka yang terlibat dalam persaingan tidak dapat mengendalikan diri, maka persaingan akan berubah menjadi bentuk pertentangan atau pertikaian. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial, di mana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan. Akar permasalahan dari pertentangan antara lain : a) perbedaan pendirian, b) perbedaan kebudayaan yang menunjuk pada pola-pola kebudayaan yang menjadi dasar pembentukan kepribadian, c) bentrokan antara kepentingan-kepentingan, misalnya kepentingan dalam bidang ekonomi, dan d) perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang menyebabkan disorganisasi sosial.<sup>33</sup>

Pertentangan ataupun pertikaian disebut juga sebagai konflik, meskipun ada yang diwujudkan dalam bentuk non fisik maupun kontak fisik. Apabila tidak dapat diselesaikan, bentuk non fisik akan berubah menjadi kontak fisik.<sup>34</sup> Ted Robert Gur melihat pertentangan dapat disebut sebagai konflik bila memiliki beberapa kriteria sebagai berikut : a) konflik harus melibatkan dua orang atau lebih, b) saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi, c) cenderung menjalankan perilaku *koersif* (kekerasan) untuk menghadapi musuh, dan d) interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas,

---

<sup>32</sup> Lihat Jack C. Plano, dkk. *Kamus Analisa Politik*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 112. Lihat pula Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 296.

<sup>33</sup> *ibid.*, hlm 94-95.

<sup>34</sup> Lihat Maswadi Rauf, *Konflik dan Konsensus Politik*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hlm 2.

artinya pertentangan itu dapat diamati oleh pengamat yang tidak terlibat di dalamnya.<sup>35</sup> Dalam bentuk yang ekstrem, konflik juga bertujuan sampai ke taraf pembinasan eksistensi seseorang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.<sup>36</sup>

Dalam konflik politik, Roger W. Cobb dan Charles D. Elder mengungkapkan tiga dimensi penting dalam konflik politik, yaitu : a) luas konflik, b) intensitas konflik, dan c) ketampakan konflik. Luas konflik menunjuk pada jumlah pihak yang terlibat di dalamnya dan menunjuk pada skala konflik. Intensitas konflik menunjuk pada sempit luasnya komitmen sosial yang mampu terbangun akibat konflik. Sedangkan ketampakan konflik menunjuk pada tingkatan kesadaran dari masyarakat di luar pihak-pihak yang berkonflik.<sup>37</sup>

Perilaku *koersif* diwujudkan dalam bentuk-bentuk kontak fisik atau tingkah laku yang nyata dan dapat diamati. Dengan demikian, konflik haruslah berwujud tindakan (behavior) yang berbentuk tindakan-tindakan konkrit.<sup>38</sup> Bentuk-bentuk kekerasan politik (kerusuhan) bukan hanya didasari oleh ekspresi emosional saja, tetapi dilatar belakangi oleh tindakan rasional dari yang memobilisasi massa untuk mencapai kepentingan politiknya. Artinya, kekerasan politik adalah hasil kalkulasi politik.<sup>39</sup>

Untuk menganalisis tindakan manusia di masa lampau, penulis menggunakan pendekatan perilaku atau *behavior approach*, meminjam teori

---

<sup>35</sup> Lihat Eep Saefulloh Fatah, "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi", dalam *Prisma*, Tahun XXIII, No. 8, 8 Agustus 1994, hlm 47.

<sup>36</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *op.cit.*, hlm 68.

<sup>37</sup> Eep Saefulloh Fatah, "Manajemen Konflik Politik Dan Demokrasi", *op.cit.*, hlm 49.

<sup>38</sup> Maswadi Rauf, *Konflik dan Konsensus, op.cit.*, hlm 8.

<sup>39</sup> Mohtar Mas' oed (ed), *Kekerasan Kolektif. Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta, P3PK Universitas Gadjah Mada, 2000, hlm 8.

sejarawan Amerika Robert F. Berkhofer dalam bukunya *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. Menurut Berkhofer, perilaku manusia terjadi dalam situasi yang di dalamnya merupakan tanggapan pada rangsangan situasi itu. Dalam tugasnya, pengamat atau ahli sejarah harus melakukan interpretasi situasi, melihat tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang diperoleh, kemudian memahami hubungan di antara keduanya.<sup>40</sup>

Prosedur semacam ini serupa dengan apa yang diungkapkan Karl Popper dengan sebutan logika situasi (*logic of the situation*). Logika situasi merupakan usaha untuk menggambarkan situasi sebagaimana yang dihadapi oleh individu yang menuntunnya untuk bertindak dengan cara yang ia lakukan. Pendekatan ini menyerupai konsepsi R. G. Collingwood's, bahwa sejarah sebagai penghidupan kembali masa lalu. Logika situasi dan penghidupan kembali imajinatif pada dasarnya bergantung pada analisis bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Orang akan berperilaku jika mereka secara keseluruhan dituntut oleh kepentingan yang sudah jelas. Dengan demikian para pelaku akan memutuskan suatu pilihan dalam setiap situasi yang dihadapi, menggunakan semua informasi yang tersedia dan mengkalkulasi hasilnya dalam situasi serta mengharapkan hasil dengan resiko yang dihadapi.<sup>42</sup> Beberapa hal yang perlu diperhatikan sejarawan untuk mencapai keberhasilan analisisnya itu adalah a) interpretasi situasi yang

---

<sup>40</sup> Istilah *behavioral approach* pertama kali diciptakan psikolog John B. Watson pada tahun 1913 yang dideklarasikan di USA. *Behavioral approach* mengalihkan pengamatan dari susunan konstitusi/lembaga ke pengamatan tentang tindakan individu. Tugas pendekatan ini adalah mendefinisikan hubungan individu dengan berbagai jenis kelompok. Lihat Robert F. Berkhofer, Jr. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, New York, The Free Press, 1969, hlm 46-47.

<sup>41</sup> *ibid.*, hlm 48.

<sup>42</sup> *ibid.*, hlm 53.



dihadapi pelaku, b) tujuan dari tindakan-tindakan yang dilakukan, dan c) konsekuensi atau timbal balik dari tindakan pelaku.<sup>43</sup>

## 2. Gerakan

### 2.1. Terminologi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gerakan adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan program dan ditujukan pada suatu perubahan atau perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.<sup>44</sup> Sedangkan *Webster New World Dictionary*, mendefinisikan *movement* atau gerakan sebagai perbuatan teorganisir oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.<sup>45</sup>

Mengutip Teuku Kemal Fasya, istilah gerakan (*movement*) dipahami secara umum sebagai keinginan orang untuk bergerak, menolak sebuah tatanan yang sudah ada demi mencari atau membuat tatanan yang baru. Kata *movement* diambil dari bahasa Prancis kuno, *mouvoir*, yang berarti bergerak, memutar (stir), atau mendesak (impel). Menurut kamus *Oxford*, istilah *movement* mengacu pada *a series of actions and endeavors of body of person for special object* (serangkaian tindakan dan usaha keras dari suatu lembaga atau perorangan untuk mencapai sebuah tujuan khusus).<sup>46</sup>

Fenomena ini dikategorikan sebagai gerakan sosial yang diartikan sebagai usaha-usaha dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan ikatan solidaritas untuk membawa perubahan melalui tindakan sosial. Para partisipan

---

<sup>43</sup> *ibid.*, hlm 69.

<sup>44</sup> Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 356.

<sup>45</sup> Lihat *Webster New World Dictionary*, Oxford, IBH Publishing co, 1975, hlm 491.

<sup>46</sup> Lihat Teuku Kemal Fasya, *Ritus Kekerasan Dan Libido Nasionalisme*, Yogyakarta, Buku Baik, 2005, hlm 25.



dalam gerakan-gerakan sosial mengambil bagian dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari demonstrasi hingga tindakan-tindakan simbolis sebagai tanda protes. Mereka disatukan nilai-nilai atau kepentingan bersama, identitas, dan disatukan oleh solidaritas.<sup>47</sup>

Kondisi politik dan sosial-ekonomi dalam skala yang luas merupakan faktor penting bagi lahirnya suatu gerakan sosial. Munculnya gerakan-gerakan sosial dapat dianalisis dengan melihat ketegangan-ketegangan (kontradiksi) struktural terhadap susunan atau keorganisasian formal yang telah dibentuk dalam masyarakat dan pandangan-pandangan atau harapan (aspek kultural) yang hidup dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat agraris tradisional, ketegangan struktural dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat telah melahirkan suatu gerakan sosial untuk mengharapkan datangnya jaman *millenium*.<sup>48</sup>

Dalam masyarakat tradisional, pandangan atau harapan itu telah membentuk ikatan solidaritas yang kemudian memicu terjadinya aksi kolektif. Gerakan-gerakan sosial ini memiliki ideologi-ideologi kuno, seperti *millinearisme* atau harapan akan datangnya jaman kebahagiaan, *nativisme* yang menekankan harapan akan kembalinya kejayaan kerajaan lama yang telah runtuh, dan *revivalisme* yang menghidupkan kembali tradisi lama untuk melawan pengaruh kebudayaan asing yang hidup dalam masyarakat agraris tradisional. Ideologi kuno ini mengajarkan

---

<sup>47</sup> Lihat Suzanne Staggenborg, *Gender, Keluarga, dan Gerakan-Gerakan Sosial*, Jakarta, Mediatar, 2003, hlm 4.

<sup>48</sup> Bayangan atau harapan masa depan yang makmur dan tenteram, seperti yang disebut *kertayuga* dalam tradisi Hindu atau tradisi jaman kerta dalam tradisi Jawa.

paham-paham yang bersifat revolusioner, sehingga mempengaruhi sikap masyarakat yang ikut ambil bagian di dalamnya.<sup>49</sup>

## 2.2. Gerakan Massa

Eric Hoffer melihat suatu gerakan dengan kekuatan massa (gerakan massa) yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a) kerelaan para anggotanya untuk berkorban, bahkan sampai mati, b) kecenderungan untuk beraksi secara kompak, c) fanatisme, d) harapan berapi-api, dan e) kesetiaan tunggal. Anggota-anggota gerakan massa diidentifikasi sebagai orang yang tidak puas, kelompok marginal di lingkungan masyarakat, dan kelompok minoritas tertekan.<sup>50</sup> Dalam membentuk kekuatan, gerakan massa dipersatukan oleh kesamaan keyakinan, fanatisme, doktrin, dan kepemimpinan. Apabila suatu gerakan itu memiliki kapasitas yang terpadu dan digerakkan oleh kelompok intelektual yang mendorong adanya perubahan secara total, menyeluruh, dan memiliki kecenderungan untuk bertindak secara radikal, maka akan terjadi *revolusi*.<sup>51</sup>

Kekuatan massa terorganisir memiliki kecenderungan untuk berbuat radikal apabila aksi protes dan penentangan (resistensi) dari suatu kelompok gerakan yang fanatisme itu terus berjalan dan berubah menjadi perlawanan terbuka. Dalam gerakan masyarakat tradisional, pemimpin kharismatik mengambil peran sentral

---

<sup>49</sup> Lihat Djoko Suryo, "Gerakan Petani", dalam *Prisma*, Tahun XIV, 1985, hlm 20-22.

<sup>50</sup> Lihat kata pengantar Yap Thiam Hien dalam Eric Hoffer, *Gerakan Massa*, Jakarta, Obor, 1988, hlm viii.

<sup>51</sup> *Revolusi* dipahami sebagai proses yang sangat luar biasa untuk menciptakan suatu tatanan sosial baru, sangat kasar, dan merupakan gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apapun. Revolusi juga terjadi karena pergeseran atau ketimpangan sosial yang sangat fundamental. Akibat atau pengaruh dari revolusi : a) perubahan secara kekerasan terhadap pemerintahan yang sudah ada, b) pergantian elit politik, c) perubahan secara mendasar, d) keputusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau, e) memberikan kekuatan ideologis dan orientasi kebangkitan. Lihat penjelasan mengenai revolusi dalam buku Eisentadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 3.

dengan menyampaikan kepercayaan akan segera datangnya *milenium* atau jaman kebahagiaan.<sup>52</sup> Pemimpin dari sebuah gerakan akan memobilisasi massa dengan ideologi-ideologi kuno sebagai landasan dan pembenaran dari gerakan itu.<sup>53</sup>

Gerakan sosial yang mengandalkan pada kekuatan massa tidak selalu diwujudkan secara radikal, tergantung dari komitmen setiap kelompok. Contohnya adalah tradisi *nggogol* dalam masyarakat Jawa tradisional yang dilakukan dengan arak-arakan menuju rumah bupati. Mereka menuntut perlindungan berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial, seperti wajib kerja dan beban pajak.<sup>54</sup> Gerakan lainnya adalah aksi *pepe* pada masa Kerajaan Mataram II yang merupakan bentuk permohonan rakyat terhadap raja, berkaitan dengan hukum dan kesejahteraan hidup. Kelompok gerakan ini duduk di alun-alun kraton dengan menggunakan pakaian putih hingga raja berkenan menerimanya.<sup>55</sup>

### 2.3. Faktor kesempatan

Gerakan sosial lahir dari kondisi-kondisi tertentu atau faktor kesempatan yang ada. Para ahli yang mempelajari gerakan sosial menggunakan teori “struktur kesempatan politik” untuk menangkap tanda-tanda, bahwa suatu aspek tertentu akan mendukung atau menghambat gerakan itu. Salah satu faktor kesempatan itu adalah a) lingkungan politik, dan b) nilai-nilai yang dipromosikan oleh suatu kelompok. Lingkungan politik lebih melihat situasi yang terjadi di lingkaran elit,

---

<sup>52</sup> Lihat Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, Jakarta, Obor, 2003, hlm 132.

<sup>53</sup> Lihat Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan Jawa, Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta, Aditya Media, 1995, hlm 104.

<sup>54</sup> Lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta, Grafiti Press, 1997, hlm 23.

<sup>55</sup> Lihat Soemarsaid Moertono, *Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau. Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX*, Jakarta, Obor, 1985, hlm 89.

sedangkan nilai-nilai lebih melihat isu-isu yang ada, kemudian melihat hubungannya dengan kondisi masyarakat sesungguhnya.<sup>56</sup>

Teori “struktur kesempatan” yang dipakai Tarrow, McAdam, dan Boudreau, sebagaimana dikutip oleh Sutoro Eko Yunanto melihat tiga unsur di dalamnya, yaitu: a) waktu atau kesempatan untuk melampiaskannya, b) disharmoni sosial, dan c) mobilisasi sumber daya.<sup>57</sup> Pandangan pertama menjelaskan, bahwa gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi atau situasi yang memberikan kesempatan pada gerakan itu untuk muncul dan berkembang. Faktor ini dapat dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi, maupun sosial. Pandangan kedua berkaitan dengan pandangan pertama dan pandangan ketiga menekankan kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan inspirasi pada anggotanya.<sup>58</sup> Kemampuan seorang pemimpin dalam memobilisasi sangat dominan dalam gerakan masyarakat tradisional.

Dari penjelasan di atas, pandangan pertama menjadi perhatian utama untuk melihat suatu gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa. Kondisi yang memberikan kesempatan dapat berupa dukungan dari elit politik atau kelompok militer tertentu yang mempengaruhi gerakan mahasiswa demi kepentingan politiknya. Kondisi ini terjadi dalam gerakan mahasiswa pada Peristiwa 15 Januari 1974 yang secara terang-terangan sudah terpengaruh oleh kepentingan politik.<sup>59</sup> Elit militer memberikan ruang gerak bagi gerakan mahasiswa, namun tidak ada

---

<sup>56</sup> Suzanne Staggenborg, *op.cit.*, hlm 5.

<sup>57</sup> Lihat Sutoro Eko Yunanto, “Mendobrak Otoritarianisme Orde Baru di Medan Mahasiswa”, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXVII, No. 4, Oktober-Desember 1998, hlm 383-384.

<sup>58</sup> Lihat Dedy Djamiludin Malik (ed), *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*, Bandung, Zaman, 1998, hlm 43-44.

<sup>59</sup> Lihat Masmiar Mangiang, “Mahasiswa, Ilusi, Tentang Sebuah Kekuatan”, dalam *Prisma*, Tahun X, No. 12, Desember 1981, hlm 103.

*conspiracy* (konspirasi)<sup>60</sup> di antara keduanya karena hubungan itu dirancang secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

### 3. Kepemimpinan

Kajian teori ini tidak akan membahas tentang pemerintah sebagai suatu lembaga atau organisasi, tetapi lebih pada individu. Penulis merasa lebih efisien untuk menganalisisnya dengan konsep kepemimpinan dan bagaimana kebijakan yang diambil pemimpin dalam menghadapi tantangan di sekitar dirinya. Menurut Sartono Kartodirdjo, konsep kepemimpinan perlu dilihat dalam hubungannya dengan proses sistematis yang mencakup interaksi antara pemimpin dan konteks situasional.<sup>61</sup> Dalam membahas konsep ini, pendekatan tingkah laku (*behavioral approach*), sebagaimana dikemukakan sebelumnya menjadi salah satu acuan.

#### 3.1. Terminologi

Kepemimpinan seperti dikatakan George R. Terry adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat diarahkan demi tercapainya suatu tujuan. Artinya, kegiatan untuk mempengaruhi itu memiliki tujuan bagi individu.<sup>62</sup> Menurut Chung dan Magginso, sebagaimana dikutip oleh Silvia Diana Purba, kepemimpinan adalah kesanggupan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu.<sup>63</sup> Gibson memberikan definisi, bahwa kepemimpinan adalah

---

<sup>60</sup> *Conspiracy* diartikan sebagai rencana rahasia yang disusun oleh beberapa orang atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang ilegal atau berbahaya. Lihat *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 1995, Oxford University Press, hlm 246 (ed : Jonathan Crowther).

<sup>61</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo (penyunting), *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1984, hlm VI.

<sup>62</sup> Lihat Abdusamad Noor, "Tipe Kepemimpinan Alternatif Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17, Tahun 1996-1997, hlm 69.

<sup>63</sup> Lihat Silvia Dian Purba, "Mengenal Kekuasaan Dalam Kepemimpinan", dalam *Media Unika*, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Tahun 4 No. 11-12, September-Desember 1993, hlm 59.

suatu usaha mempengaruhi orang antar perseorangan (interpersonal) melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>64</sup>

Eksistensi penguasa sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dalam menghadapi situasi yang terjadi. Menurut Sondang P. Siagian, mutu kepemimpinan dapat dilihat melalui tujuh kriteria, yaitu : (a) memahami berbagai faktor yang merupakan kekuatan organisasi, (b) mengenali secara tepat berbagai kelemahan, (c) memanfaatkan berbagai peluang, (d) menghilangkan berbagai bentuk ancaman, (e) memiliki sifat yang proaktif dan antisipatif terhadap perubahan, (f) mendorong bawahan untuk bekerja keras, dan (g) menciptakan cara dan iklim kerja yang mendukung usaha pencapaian tujuan.<sup>65</sup>

### 3.2. Tipe.

Dalam teori kepemimpinan dikenal adanya lima tipe (tipologi) kepemimpinan yang diartikan sebagai cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang (pemimpin) dalam usaha mempengaruhi orang lain. Untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bersedia diarahkan sesuai dengan tujuan pribadinya, pemimpin secara berencana memilih cara atau teknik tertentu. Dengan demikian tipe kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan seseorang dalam upaya mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>66</sup>

Kelima tipologi kepemimpinan ini adalah : *pertama*, tipe otokratik. Tipe kepemimpinan model ini lebih mendasarkan pada kekuatan dan kekuasaannya. Pemimpin otokratik cenderung menganut nilai yang membenarkan segala cara

---

<sup>64</sup> *loc.it.*,

<sup>65</sup> Lihat Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hlm 4.

<sup>66</sup> Abdusamad Noor, *op.cit.*, hlm 71.

untuk pencapaian tujuan. Pemimpin otokratik akan menggunakan gaya kepemimpinan yang dicirikan sebagai berikut : a) tuntutan ketaatan bawahannya, b) keras dalam memberikan perintah, dan c) menggunakan pendekatan punitif apabila terjadi penyimpangan oleh bawahannya,<sup>67</sup>

*Kedua*, tipe paternalistik. Kepemimpinan model seperti ini banyak terdapat di lingkungan masyarakat tradisional agraris. Popularitas pemimpin paternalistik biasanya disebabkan oleh adanya kehidupan masyarakat yang komunalistik dan peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Persepsi seorang pemimpin paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi diwarnai oleh harapan para pengikut kepadanya. Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh petunjuk.<sup>68</sup>

*Ketiga*, tipe kharismatik. Karakteristik yang khas adalah daya tarik yang mampu mengikat, sehingga memiliki banyak pengikut. Menurut Max Weber istilah “karisma” dipakai untuk mengacu pada suatu kualitas tertentu dari kepribadian individual, dengan kekuatan itu dia dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang mendapatkan kekuatan secara khusus (adi kodrati). Karisma pada dasarnya adalah karunia, yang dalam istilah Weber disebut sebagai *Gottesgnadentum* atau rahmat Allah. Karisma menurut Max Weber dapat dibuat menjadi “rutin” dengan kualitas rutinitas yang luar biasa, seperti komunitas yang diciptakan dan pola hubungan yang sudah dibangun.<sup>69</sup> Menurut Sondang P.

---

<sup>67</sup> Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm 31-33.

<sup>68</sup> *ibid.*, hlm 34-36.

<sup>69</sup> Dhaniel Dakidae, *op.cit.*, hlm 264-265.



Siagian, penampilan fisik, gaya, ataupun perilaku bukan ukuran dan usia tidak selalu dapat dijadikan ukuran.<sup>70</sup>

*Keempat*, tipe *laissez faire*. Seorang pemimpin yang memiliki tipe ini cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasinya berjalan menurut temponya sendiri tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi harus dijalankan dan digerakkan. Nilai yang tepat dalam hubungan atasan-bawahan adalah nilai yang didasarkan pada sikap saling mempercayai.<sup>71</sup> Sedangkan *kelima* adalah tipe demokratis. Pemimpin dengan tipe seperti ini biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Singkatnya, seorang pemimpin yang demokratis melihat bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang merupakan kenyataan hidup harus dijamin kebersamaannya.<sup>72</sup>

Kelima tipe di atas ditambah oleh Kartini Kartono dengan tipe militeristis. Menurut Kartono, tipe kepemimpinan militeristis tidak diidentikkan dengan seorang pemimpin yang berasal dari militer. Sifat-sifat pemimpin yang memiliki tipe ini adalah : a) menggunakan sistem perintah (komando), b) menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya, c) menyenangi formalitas yang berlebihan, d) menuntut disiplin yang keras, e) tidak menghendaki kritik dari bawahannya, dan f) komunikasi hanya berlangsung searah saja.

#### 4. Kebijakan

Dalam buku *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 8* kebijakan diartikan secara umum sebagai kearifan untuk mengelola. Dalam ilmu-ilmu sosial,

---

<sup>70</sup> Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm 37.

<sup>71</sup> *ibid.*, hlm 38-39.

<sup>72</sup> *ibid.*, hlm 40.



kebijakan diartikan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan.<sup>73</sup> Senada dengan pendapat di atas, *Kamus Analisa Politik* mengartikan kebijakan sebagai suatu keputusan, tetapi lebih dipandang sebagai perangkat atau serangkaian keputusan yang menyangkut tujuan dan cara yang menunjukkan tujuan jangka panjang tindakan seseorang atau suatu lembaga (pemerintah).<sup>74</sup>

Kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa tidak hanya bertujuan untuk mengatur suatu organisasi atau lembaga yang dipegangnya, tetapi bertujuan juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengacu pada pendapat Maswadi Rauf dan Miriam Budiardjo seperti dikemukakan di atas, bahwa kebijakan yang diambil penguasa akan menentukan eksistensi atau kualitas sebagai seorang pemimpin, termasuk dalam mengendalikan orang lain atau kontrol politik sebagai syarat mutlak untuk keselamatan sendiri.<sup>75</sup> Pemimpin dikatakan memiliki kualitas yang baik, apabila ia tanggap terhadap situasi disekitar dirinya.

Tanggapan terhadap situasi yang dihadapi para aktor atau pelaku politik adalah reaksi yang sangat mendasari pada pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Mohtar Mas' oed memberikan penjelasan untuk melihat suatu keputusan yang diambil seorang pemimpin dengan melihat faktor dari dalam atau psikologis. Mengapa Presiden Sukarno memilih tindakan konfrontasi dengan Malaysia? Faktor dari luar kiranya dapat dijelaskan adalah sebagai tanggapan terhadap sikap Malaysia dan Inggris yang tidak memperdulikan kepentingan Indonesia atau

---

<sup>73</sup> Lihat *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Indeks k, Jilid 8*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990, hlm 263.

<sup>74</sup> Lihat Jack C. Plano, dkk, *op.cit.*, hlm 200-201.

<sup>75</sup> Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm 35.

akibat pengaruh penasehat politiknya yang anti Barat. Sedangkan faktor dari dalam kiranya dapat dijelaskan, bahwa kebijakan itu berkaitan dengan citra diri Sukarno di mata dunia internasional untuk menunjukkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara.<sup>76</sup>

Penjelasan di atas kiranya dapat menjelaskan kebijakan Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974. Kebijakan yang diambil merupakan tanggapan terhadap situasi yang terjadi di sekitar dirinya demi kepentingan politiknya. Dengan meminjam pendapat Robert F. Berkhofer, pengamat atau ahli sejarah harus melihat situasi yang terjadi di sekitar pelaku, tindakan-tindakan yang diambil, dan hasil yang diperoleh.

Kebijakan seorang pemimpin dalam menghadapi situasi atau tekanan di sekitar dirinya adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Soeleman Soemardi menilai kekuasaan adalah pengaruh atau pengawasan untuk mengikat semua golongan dan mengatur bawahannya untuk tujuan tertentu.<sup>77</sup> Mempertahankan kekuasaan merupakan bagian yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Menurut Machiavelli, sebagaimana ditulis oleh Maswadi Rauf, tujuan terpenting bagi penguasa adalah mempertahankan kekuasaannya itu. Ukuran keberhasilan seorang penguasa terletak pada keberhasilannya mempertahankan kekuasaannya itu dalam waktu yang cukup lama.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Lihat Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm 321-322.

<sup>77</sup> Lihat Soeleman Soemardi, "Cara-Cara Pendekatan Terhadap Kekuasaan Sebagai Gejala Sosial", dalam Miriam Budiardjo (penyunting), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, hlm 33 & 39.

<sup>78</sup> Lihat Maswadi Rauf, "Kekuasaan Politik Sang Penguasa Menurut Machiavelli", dalam *Ilmu dan Budaya*, Tahun XIII, No. 10, Juli 1991, hlm 803.

## G. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kalau Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro sama-sama berambisi untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan sebagai orang terkuat kedua setelah Soeharto maka akan terjadi rivalitas.
2. Kalau gerakan mahasiswa berhasil dipengaruhi oleh Jenderal Soemitro untuk menjatuhkan Mayor Jenderal Ali Moertopo maka mahasiswa akan terlibat dalam Peristiwa 15 Januari 1974.
3. Kalau Presiden Soeharto merasa kedudukannya terancam akibat Peristiwa 15 Januari 1974 maka Presiden Soeharto akan menyingkirkan Mayor Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro dari pusat kekuasaan.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan dan *logos* yang berarti ilmu.<sup>79</sup> Dalam *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, metodologi didefinisikan sebagai kerangka metode, peraturan, atau kumpulan prosedur.<sup>80</sup> *Dictionary of Concept in History*, mendefinisikan metodologi sebagai kumpulan perlengkapan teknik yang digunakan untuk menafsirkan bukti atau bingkai keterangan (orientasi teoritikal) yang digunakan untuk menafsirkan masa lalu.<sup>81</sup> Sedangkan William Leo Lucey dalam bukunya *History : Method and Interpretation*, mendefinisikan metodologi sejarah sebagai serangkaian program sistematis yang berisi aturan dan prosedur untuk

---

<sup>79</sup> Igbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 20.

<sup>80</sup> Lihat *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, USA, Miriam Webster inc, 1986, hlm 747.

<sup>81</sup> Lihat Herry Ritter, *Dictionary of Concept in History*, No. 3, USA, Greenwood Press, inc, 1986, hlm 269.

mengumpulkan sebanyak mungkin saksi mata dari suatu peristiwa sejarah dan kesaksian itu dievaluasi kembali untuk membuktikan fakta (fact) dalam hubungan sebab akibat.<sup>82</sup> Metodologi penelitian ini terdiri dari:

### 1. Metode Penelitian Sejarah.

Untuk memperoleh data dan menghasilkan jawaban dalam suatu penelitian, metodologi memiliki aturan, cara atau proses yang lebih spesifik yang biasa disebut dengan metode.<sup>83</sup> Dalam penelitian sejarah, aturan atau cara itu disebut dengan metode penelitian sejarah (metode sejarah). Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide To Historical Method*, mendefinisikan metode sejarah sebagai dasar-dasar dan aturan sistematis yang dirancang untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menafsirkan secara kritis, dan mensintesis (dalam format tertulis) hasil yang dicapai.<sup>84</sup> Sedangkan Louis Gottschalk mendefinisikan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan manusia di masa lampau.<sup>85</sup>

Menurut Kuntowijoyo metode penelitian sejarah terdiri dari: 1) pemilihan topik, 2) heuristik, 3) verifikasi, 4) interpretasi, dan 5) historiografi.<sup>86</sup>

#### 1.1. Pemilihan Topik

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional terkait dengan ketekunan pada periode sejarah

---

<sup>82</sup> Lihat William Leo Lucey, *History : Methods and Interpretation*, Chicago, Loyola University Press, 1958, hlm 22.

<sup>83</sup> Mengenai definisi metode secara umum, lihat juga Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm 740 atau *Webster's Ninth Collegiate Dictionary*, *op.cit.*, hlm 747.

<sup>84</sup> Lihat Gilbert J. Garraghan, *A Guide To Historical Method*, New York, Fordham University Press, 1957, hlm 33.

<sup>85</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm 32.

<sup>86</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 91.

yang hendak diteliti dan pengalaman peneliti terhadap sesuatu hal yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan kedekatan intelektual terkait dengan disiplin ilmu dan kemampuan peneliti dalam menguasai materi ataupun jenis bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik adalah: a) *where*, menunjuk daerah mana yang menjadi objek penelitian, b) *when* menunjuk batasan waktu yang dipilih, c) *who* menunjuk siapa saja yang terlibat di dalamnya, d) *what* menunjuk apa yang dikerjakan oleh pelaku, e) *why* menunjuk pada pertanyaan mengapa pelaku melakukan perbuatan itu, dan f) *how* menunjuk pada pertanyaan bagaimana terjadinya peristiwa itu.<sup>87</sup>

## 1.2. Heuristik

*Heuristik* (heuristics) adalah kegiatan mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dengan topik untuk mendapatkan data-data sejarah.<sup>88</sup> Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a) berdasarkan jenis bahannya, dan b) berdasarkan urutan penyampaiannya. Sumber sejarah menurut jenis bahannya terbagi menjadi dua, yaitu tertulis (dokumen) dan tidak tertulis (artefak). Sedangkan sumber sejarah menurut urutan penyampaiannya dibagi ke dalam sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah disebut primer apabila disampaikan oleh saksi mata atau pelaku sejarah, misalnya catatan rapat, pidato, laporan dari wartawan yang menyaksikan langsung suatu peristiwa atau transkripsi wawancara dengan pelaku sejarah. Sedangkan sumber sejarah dikatakan sebagai sumber

---

<sup>87</sup> Selain pendapat Kuntowijoyo, Louis Gottschalk mengajukan empat perangkat pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam memilih topik, yaitu 1) bersifat *geografis*, yaitu “di mana”, 2) *biografis*, yaitu “siapa”, 3) *kronologis*, yaitu “bilamana”. Pertanyaan ini menunjuk pada periode yang ingin diteliti, dan 4) *fungsiional*, yaitu “apa” yang menunjuk pada jenis kegiatan yang hendak diteliti. Lihat Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm 41.

<sup>88</sup> Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm 86.

sekunder apabila dihasilkan oleh orang yang bukan saksi mata atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder digunakan hanya untuk koreksi atau komparasi dari sumber primer.<sup>89</sup>

### 1.3. Verifikasi

*Verifikasi* adalah uji keabsahan atau kritik sumber. Verifikasi dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah menguji otentitas atau keaslian sumber. Kritik ekstern dapat dilakukan dengan mencermati jenis kertas, sampul, ataupun gaya bahasa sebuah dokumen, sedangkan kritik intern adalah menguji kredibilitas atau kebenaran isi (data-data) yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Untuk memperoleh data-data yang tepat, peneliti melakukan *comparatif* atau perbandingan dengan sumber lainnya, sehingga dapat diketahui apakah data dari sumber tersebut mengandung kontradiksi atau tidak.

### 1.4. Interpretasi

*Interpretasi* adalah penafsiran sumber. Interpretasi terdiri dari tiga bagian, yaitu analisis, sintesis, dan koraborasi. Analisis adalah proses menguraikan data-data dari masing-masing sumber. Sintesis adalah menyatukan seluruh uraian data-data dari sumber yang telah diperoleh. Setelah melakukan analisis dan sintesis, langkah berikutnya adalah koraborasi atau mengukuhkan (menetapkan) sumber yang akan digunakan. Meskipun telah melewati tahap kritik ekstern dan intern, koraborasi dalam penelitian sejarah perlu dilakukan untuk menetapkan sumber sejarah yang memiliki data akurat.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Lihat F. A. Soetjipto, "Beberapa Tindjauan Tentang Sedjarah Lokal" (appendix A), dalam Sartono Kartodirdjo, *Beberapa Masalah dan Metodologi Sedjarah Indonesia*, Yogyakarta, Lembaran Sedjarah, 1970, hlm 39.

<sup>90</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm 114.

### 1.5. Historiografi

*Historiografi* diartikan sebagai penulisan sejarah. Historiografi dipahami sebagai proses rekonstruksi imajinatif peristiwa masa lalu berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber.<sup>91</sup> Pada bagian ini, peneliti harus mampu menyajikan hasil sintesisnya menjadi suatu kisah yang disusun secara kronologis dan sistematis. Untuk menyusun peristiwa sejarah dengan permasalahan yang begitu begitu kompleks, penulis menggunakan jenis penulisan deskriptif analitis,<sup>92</sup> yaitu jenis penulisan yang menggambarkan kejadian dari peristiwa masa lalu dan menguraikannya berdasarkan hubungan sebab akibat. Menurut Sartono Kartodirdjo, penulisan sejarah yang bersifat analitis lebih memusatkan pada pokok permasalahan (*problem oriented*)<sup>93</sup> dengan menguraikan kausalitas dan faktor-faktor kondisional.<sup>94</sup>

### 2. Pendekatan

Metodologi juga menentukan jenis pendekatan sebagai alat analisis yang menuntun sejarawan untuk memecahkan suatu fenomena historis yang begitu kompleks. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional, artinya memandang suatu peristiwa sejarah dan memecahkan permasalahannya dengan meminjam konsep-konsep dari berbagai perspektif ilmu.<sup>95</sup> Pendekatan sosiologi akan menganalisis gejala-gejala yang terjadi dalam

---

<sup>91</sup> *ibid.*, hlm 32.

<sup>92</sup> Mengenai definisi analisis, lihat Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta, Modern English Press, 1991, hlm 61.

<sup>93</sup> Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm 5 & 9.

<sup>94</sup> *ibid.*, hlm 70.

<sup>95</sup> *ibid.*, hlm 71. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm 2-3.



hubungan antar manusia, seperti persaingan dan konflik. Pendekatan psikologi akan menganalisis perilaku manusia dalam menghadapi situasi, tindakan yang diambil dan peneliti menafsirkan kepentingan apa yang dikehendaki, sedangkan pendekatan politik akan menganalisis tentang kekuasaan. Pendekatan ini sangat tepat untuk menghasilkan penulisan sejarah yang bersifat analitis (non naratif).

### **I. Sistematika Penulisan**

BAB I. Menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, dan metodologi penelitian.

BAB II. Menjelaskan dan menganalisis penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro. Bagian ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, perjalanan karir militer Ali Moertopo dan Soemitro. Kedua, perebutan pengaruh dan kedudukan sebagai orang terkuat kedua.

BAB III. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974. Bagian ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, dominasi modal Jepang. Kedua, Soemitro mempengaruhi gerakan mahasiswa, dan ketiga memanfaatkan kunjungan Tanaka.

BAB IV. Menjelaskan dan menganalisis kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974. Bagian ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, membubarkan Aspri dan mengambil alih Pangkopkamtib. Kedua, menyingkirkan Soemitro dan Ali Moertopo.

BAB V. Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari ketiga rumusan masalah.



**BAB II**

**RIVALITAS ANTARA MAYOR JENDERAL ALI MOERTOPO  
DENGAN JENDERAL SOEMITRO**

**A. Perjalanan Karir Militer Ali Moertopo dan Soemitro**

Ali Moertopo dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1924. Mengawali karir prajurit di Resimen 17 Divisi III dalam penumpasan Peristiwa Tiga Daerah di Pekalongan pada tahun 1945-1946. Ia juga aktif dalam perang gerilya pada Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer II tahun 1948. Ia juga terlibat dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, bergerak di daerah Parakan, Wonosobo (Jawa Tengah). Pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Komandan Kompi Batalyon 431 “Banteng Raiders” Komando Operasi Gerakan Banteng IV Resimen XII dengan pangkat letnan satu.<sup>96</sup>

Nama Ali Moertopo dikenal luas di lingkup lokal Jawa Tengah ketika ia menjabat sebagai Asisten V (Urusan Teritorial) Kepala Staf di Territorium (TT) IV/Diponegoro pada tahun 1957 dengan pangkat kapten. Dalam penumpasan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat, Ali Moertopo menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Team Tempur II/Diponegoro dan berperan dalam penumpasan Permesta (Perjuangan Semesta Alam) di Indonesia bagian timur tahun 1958.<sup>97</sup> Pada waktu itu Panglima TT IV/Diponegoro yang kemudian menjadi Kodam Diponegoro pada bulan Agustus 1959 adalah

---

<sup>96</sup> Data ini diambil dari buku Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta, CSIS, 1974, hlm (riwayat hidup).

<sup>97</sup> *loc.it.,.*

mantan Komandan Brigade X/Wehrkreise III dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yaitu Kolonel Soeharto.<sup>98</sup>

Naiknya Soeharto sebagai Panglima TT IV/Diponegoro sejak tanggal 3 Juni 1956 sampai tahun 1958 diceritakan sendiri oleh Ali Moertopo dalam pengantar buku *Memori Jenderal Yoga*,

Pengalaman saya selama dibimbing Pak Harto dan Pak Yoga relatif singkat. Tetapi banyak hal yang saya pelajari secara mendalam dan mempunyai kesan. Kesan pertama sewaktu saya masih menjadi Komandan Banteng Raiders, diminta membantu Pak Yoga melancarkan intelejen untuk mengusahakan supaya Pak Harto diangkat menjadi Panglima. Waktu itu untuk menjadi Panglima tidak seperti sekarang. Dulu lebih banyak alasan politik dari pada teknisnya. Nah, Pak Yoga berusaha mempersiapkan situasi dan image baik di Kodam maupun di Angkatan Darat agar bisa menerima Pak Harto sebagai Panglima Diponegoro. Ini merupakan jasa saya yang pertama, yang kemudian membimbing saya ke staf. Jasa Pak Yoga juga dalam memimpin saya di staf penguasa perang, maka karena itu saya yakin penuh akan pengalamannya....<sup>99</sup>

Selain Ali Moertopo, beberapa perwira menengah di Kodam Diponegoro adalah orang-orang kepercayaan Soeharto, seperti Sudjono Humardhani, Yoga Sugomo, Letan Kolonel (Letkol) Munadi, dan seorang *cukong* bernama Bob Hasan. Ali Moertopo bersama Yoga Sugomo sebagai pembantu politik Soeharto, sedangkan Sudjono Humardhani, Munadi, dan Bob Hasan berperan dalam kegiatan bisnis dan membantu Soeharto mendirikan Yayasan Pembangunan Territorium IV Diponegoro.<sup>100</sup> Kegiatan bisnis ini menjadi isu menghebohkan karena dugaan korupsi dan proyek barter gula dengan beras ke Singapura yang kemudian membawa Soeharto meninggalkan Kodam Diponegoro untuk menjalani

<sup>98</sup> Lihat otobiografinya, sebagaimana dipaparkan G. Dwipayana dan Ramadhan, K. H., *Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Jakarta, Citra Lamtoro Gung, 1989, hlm 89.

<sup>99</sup> Lihat B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin, *Memori Jenderal Yoga*, Jakarta, Bina Rena Pariwara, 1990, hlm 29-30. (transkripsi wawancara B. Wiwoho dengan Ali Moertopo pada tanggal 20 September 1983 di ruang Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Jakarta).

<sup>100</sup> G. Dwipayana dan Ramadhan, K. H., *op.cit.*, hlm 90.

pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) atas rekomendasi Mayor Jenderal Gatot Subroto.<sup>101</sup>

Pada tahun 1961 Mayor Ali Moertopo mendapatkan tugas dari Soeharto untuk memimpin operasi khusus kesatuan intelejen tempur dari pasukan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Caduad) dalam operasi pembebasan Irian Barat atau Komando Mandala Trikora (Tri Komando Rakyat).<sup>102</sup> Kesatuan intelejen tempur yang dibentuk di lingkungan Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) ini kemudian dikenal dengan nama Opsus pada tahun 1964. Pada saat terjadi Konfrontasi Malaysia tahun 1964, Ali Moertopo digunakan kembali oleh Soeharto untuk memimpin Opsus mengadakan hubungan diplomatis rahasia dengan pemimpin militer Malaysia. Hubungan ini bertujuan untuk menghentikan konfrontasi yang berhasil diadakan dalam bulan Agustus dan September tahun 1964.<sup>103</sup> Berikut penuturan Ali Moertopo sebagaimana tertulis dalam buku *Memori Jenderal Yoga,*

Waktu itu saya sesungguhnya di Kopur II di Operasi Mandala Siaga. Pak Noli (red : panggilan akrab Tjokropranolo) di Mandala Siaga dan Pak Yoga di Kostrad. Jadi, hubungan saya dengan Pak Yoga tidak langsung, tapi melalui Mandala Siaga baru ke Kostrad. Namun karena operasi menghentikan konfrontasi itu bersifat rahasia, dan ini melawan arus, maka hanya dibicarakan antara saya, Pak Yoga dan Pak Harto. Jadi bertiga lagi. Di sinilah yang sebetulnya menentukan benar-benar. Kalau dulu kami menentukan di tingkat lokal dan sektoral, sekarang menentukan tingkat nasional dan internasional dengan segala resikonya. Masih dalam proses operasional, tiba-tiba terjadi G30S....<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Lihat P. J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1941-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2004, hlm 73.

<sup>102</sup> Ali Moertopo, *op.cit.*, hlm (riwayat hidup).

<sup>103</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES, 1986, hlm 30.

<sup>104</sup> Untuk keterangannya lebih lengkap, lihat B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin, *op.cit.*, hlm 37-38.

Hubungan Ali Moertopo, Yoga Sugomo, dan Soeharto berlanjut ketika Gerakan 30 September PKI 1965 (G 30 S/PKI) terjadi di Jakarta. Ali Moertopo dan Yoga Sugomo banyak membantu Soeharto di lingkungan Kostrad.<sup>105</sup> Pada saat Soeharto memegang peran dalam penyusunan kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) tahun 1966, Ali Moertopo dan Benny (Leonardus Benjamin) Moerdani masuk dalam delegasi Komando Ganyang Malaysia (Kogam) bersama Kemal Idris untuk berkunjung ke Kuala Lumpur pada tanggal 27 Mei 1966. Tiga hari kemudian Menteri Luar Negari (Menlu) Adam Malik dengan bantuan Des Alwi bertemu para pemimpin Malaysia untuk mencari kesepakatan menghentikan konfrontasi. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak berkunjung ke Jakarta untuk menandatangani persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.<sup>106</sup>

Sebagai pembantu politik kepercayaan Soeharto, perjalanan karir militer Ali Moertopo mengalir mengikuti hubungan antara keduanya. Pada tahun 1966, Ali Moertopo mendapatkan kepercayaan dari Soeharto menjadi anggota Staf Pribadi Presiden (Spri) dengan pangkat kolonel, bersama Alamsjah Ratu Perwiranegara, Soerjo, Yoga Sugomo, dan Sudjono Humardhani. Spri bertugas membantu kerja presiden di luar kabinet resmi dan terkesan sebagai “kabinet bayangan”. Pada tahun 1967, Ali Moertopo melalui Opsus ditugaskan untuk melaksanakan persiapan referendum (penentuan pendapat rakyat) di Irian Jaya yang berhasil diselesaikan pada tahun 1969. Pangkatnya dinaikkan menjadi brigjen.<sup>107</sup> Spri

---

<sup>105</sup> P. J. Suwarno, *op.cit.*, hlm 80-89.

<sup>106</sup> Ulf Sundhausen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, *op.cit.*, hlm 417. Lihat juga keterangan Soeharto sebagaimana dipaparkan G. Dwipayana dan Ramadhan, K. H., *op.cit.*, hlm 180-181.

<sup>107</sup> Ali Moertopo, *op.cit.*, hlm (riwayat hidup).

kemudian dibubarkan tahun 1968 menyusul protes mahasiswa yang dinilai terlalu dominan dalam urusan pemerintahan dan perlindungan terhadap para *cukong*. Namun, Ali Moertopo, Soerjo, dan Sudjono Humardhani tetap dipertahankan sebagai pembantu pribadi presiden dalam organisasi Aspri.

Melalui Aspri, Ali Moertopo dikenal sebagai juru bicara pemerintah karena keahliannya dalam berpidato dan menyumbangkan pemikiran pembangunan yang dikenal dengan nama *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*. Ia juga berperan melalui Opsus dalam mempersiapkan pembentukan ASEAN (Association of South East Asian Nations) tahun 1967 dan pada tahun 1970, ia menganjurkan konsep pembangunan kerja sama segitiga Asia-Pasifik, antara ASEAN, Australia dan Jepang, meskipun visi regional ini tidak menghasilkan respon positif.<sup>108</sup> Reputasi Ali Moertopo diakui oleh Abdul Gafur yang menilai peranannya sangat menonjol dalam percaturan politik. Ali Moertopo adalah orang yang dekat dengan Soeharto dan menjadi orang nomor satu di Opsus sebagai organisasi pengendali infrastruktur politik dan organisasi masyarakat, sehingga menimbulkan kesan pengaruhnya ada di mana-mana.<sup>109</sup>

Mengenai tugas Aspri bagi presiden, Sudjono Humardhani yang dianggap sebagai tokoh penting dalam hubungan bisnis dengan Jepang dan menjadi sekutu Ali Moertopo memberikan keterangan ketika diwawancarai oleh *Tempo*,

Aspri bertugas membantu presiden dalam pemerintahan negara dan pelaksanaan ini dilakukan dengan jalan menjadi penghubung presiden dengan pejabat atau instansi resmi ataupun swasta, dan di samping itu

---

<sup>108</sup> Lihat Michael Leifer, "Ali Moertopo : Regional Visionary and Regional Pragmatist", dalam *The Indonesian Quarterly*, Volume XIII, No. 4, Jakarta, CSIS, Oktober 1985, hlm 526-528.

<sup>109</sup> Abdul Gafur adalah mantan aktivis '66' dan pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada masa orde baru (1983-1988). Lihat Abdul Gafur, *Pak Harto Pandangan Dan Harapannya*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1987, hlm 376.

mencari bahan keterangan yang sekiranya diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas pemerintah bagi presiden serta memberikan penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal yang dianggap perlu mengenai kebijaksanaan pemerintah...<sup>110</sup>

Lain halnya dengan Soemitro yang memiliki karakter *blak-blakan* (terus terang) sebagai orang Jawa Timur, keras, dan emosinya sering tak terkendali. Soemitro dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 13 Januari 1927.<sup>111</sup> Ia berasal dari Kodam Brawijaya, Jawa Timur dan pernah menjabat sebagai Pangdam Mulawarman di Kalimantan Timur pada tahun 1965 dengan pangkat brigjen. Hubungan antara Soemitro dan Soeharto dimulai setelah terjadinya G 30 S/PKI 1965 di Jakarta. Pertemuannya dengan Soeharto untuk pertama kali adalah saat Soeharto menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani menghadiri pelantikannya menjadi Pangdam IX Mulawarman, Kalimantan Timur pada tahun 1965. Menurut penuturan Soemitro dalam otobiografinya, bahwa dirinya tidak pernah mengenal dan menjadi bawahan langsung Soeharto,<sup>112</sup> sebelum dipanggil ke Jakarta dalam pembersihan sisa-sisa PKI.

Pada bulan November tahun 1965, Soemitro ditarik ke Jakarta untuk menjadi Asisten Operasi Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) di bawah pimpinan Soeharto. Selain Soemitro, panglima daerah yang ditarik ke Jakarta adalah Brigjen Amirmachmud yang sebelumnya menjabat panglima di Kalimantan Selatan. Amirmachmud mendapatkan posisi baru sebagai Pangdam Jaya Jakarta menggantikan Mayjen Umar Wirahadikusuma. Selain menjabat

---

<sup>110</sup> Lihat "Aspri Tidak Memiliki Wewenang Eksekutif" (wawancara George Junus Adicondro dengan Mayor Jenderal Sudjono Humardhani), *Tempo*, 19 Januari 1974, hlm 43.

<sup>111</sup> Sebagai referensi pelengkap tentang Soemitro, lihat riwayat hidupnya dalam buku Soemitro, *Mengungkapkan Masalah Menatap Masa Depan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1991, hlm 110.

<sup>112</sup> Lihat Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkoptamtib*, Jakarta, Sinar Harapan, 1994, hlm 14.



Asisten Operasi Menpangad, Soemitro mendapatkan kepercayaan Soeharto untuk merangkap sebagai Pangdam VIII/Brawijaya.<sup>113</sup> Menurut Ulf Sundhaussen, kebijakan ini merupakan bagian strategi Soeharto untuk menempatkan pendukungnya, karena Soemitro dinilai memiliki hubungan yang renggang dengan kelompok radikal di dalam tubuh Angkatan Darat,<sup>114</sup> meskipun ia sangat menghormati Sukarno.

Setelah selesai menjalankan tugasnya di Kodam Brawijaya pada tahun 1967, Soemitro ditarik kembali ke Jakarta sebagai Deputy Operasi dan Kepala Staf Harian (Kashar) Kopkamtib untuk membersihkan sisa-sisa PKI. Pada tahun 1969, Soemitro menjabat sebagai Kepala Staf Hankam (Kashankam) dengan pangkat letnan jenderal, Wakil Panglima Kopkamtib (Wapangkopkamtib), dan tahun 1970 memperoleh pangkat jenderal penuh dalam usia empat puluh tiga tahun. Pada tahun 1971, Soemitro mendapat kepercayaan menjadi Pangkopkamtib menggantikan Jenderal Maraden Panggabean dalam usia empat puluh empat tahun,<sup>115</sup> dan merangkap Wakil Panglima Angkatan Bersenjata (Wapangab).

Dalam sejarah orde baru, Kopkamtib dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1965, melalui hasil kompromi antara Soeharto dengan Sukarno.<sup>116</sup> Menurut Ulf Sundhaussen dalam artikelnya *The Military : Structure Procedures and Effects on Indonesian Society*, Kopkamtib adalah organisasi di dalam pertahanan Indonesia

---

<sup>113</sup> *ibid.*, hlm 57&91.

<sup>114</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, *op.cit.*, hlm 413.

<sup>115</sup> Ada perbedaan tahun saat Soemitro menjadi Pangkopkamtib. Menurut Harold Crouch, Soemitro menjadi Pangkopkamtib pada tahun 1973, sedangkan dalam otobiografi Soemitro, sebagaimana dipaparkan oleh Ramadhan, K. H., Soemitro menjadi Pangkopkamtib pada tahun 1971. Penulis menggunakan sumber Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, *op.cit.*, hlm 224.

<sup>116</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 250.

yang didirikan setelah “kudeta” Letkol Untung pada tahun 1965. Organisasi ini memainkan peran penting dalam pembersihan pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia), baik di dalam maupun di luar organisasi negara, dan melaksanakan pengawasan di bawah pemerintahan orde baru.<sup>117</sup> Di kemudian hari, Kopkamtib tidak hanya sekedar sebagai alat pengendali keamanan tetapi menjadi alat politik Soeharto.

Pada awal pembentukan, Kopkamtib dipimpin langsung oleh Soeharto dan seorang perwira tinggi Kristiani berdarah Batak, yaitu Brigjen Panggabean sebagai wakilnya.<sup>118</sup> Pada tahun 1969, Soeharto menyerahkan jabatan Pangkoptib kepada Panggabean dan Soemitro sebagai wakilnya. Soemitro kemudian dipercaya Soeharto menggantikan Panggabean pada tahun 1971. Kopkamtib tidak hanya digunakan untuk mengawasi sisa-sisa PKI dan organisasi pendukungnya, tetapi digunakan juga untuk mengawasi kelompok-kelompok yang dapat membahayakan eksistensi pemerintah, termasuk mengklasifikasi kejahatan politik, seperti demonstrasi yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan internal negara.<sup>119</sup>

Di bawah kepemimpinan energik Soemitro dan Laksamana Sudomo (kolega lama Soeharto selama misi di Irian Barat) sebagai wakilnya, Kopkamtib menjadi alat untuk mengendalikan negara secara politis dan paling ditakuti, seperti pengawasan pemilu, pers, dan aktifitas mahasiswa. Menurut Dhaniel Dakidae, Kopkamtib hampir sama fungsinya dengan *Gestapo* (Gehime Staatspolizie),

---

<sup>117</sup> Lihat Ulf Sundhaussen, “The Military : Structure Procedures and Effects on Indonesian Society”, *Political Power and Communication in Indonesia* (ed : Karl D. Jackson and Lucian Pye), Berkeley, University California Press, 1978, hlm 62.

<sup>118</sup> *loc.it.*,

<sup>119</sup> *loc.it.*,



sebuah polisi rahasia di Jerman yang digunakan Adolf Hitler untuk melayani kepentingan politiknya.<sup>120</sup>

### **B. Perebutan Pengaruh dan Kedudukan Sebagai Orang Terkuat Kedua.**

Pasca pemilu 1971 muncul rivalitas antara Ali Moertopo dengan Soemitro. Kedua jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai pembantu politik Soeharto ini adalah orang yang sangat berpengaruh pada masa awal orde baru. Panggabean sendiri yang waktu itu menjabat Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata), justru tidak memiliki pengaruh seluas Ali Moertopo dan Soemitro.<sup>121</sup>

Rivalitas itu berkembang menjadi rivalitas antar kelompok. Ali Moertopo dianggap sebagai pemimpin kelompok Aspri dan Soemitro memimpin kelompok para jenderal dari Hankam. Keduanya digambarkan David Jenkins sebagai bagian inti para jenderal kepercayaan Soeharto, meskipun Ali Moertopo bersama Sudjono Humardhani dan Soerjo berada dalam “lingkaran inti sebelah dalam”. Basis pengaruh Ali Moertopo adalah Opsus, Golkar, dan CSIS yang dikelola oleh intelektual Katolik Cina.<sup>122</sup>

Lembaga CSIS dikenal sebagai “ideas factory” atau dapur penyumbang pemikiran masalah strategis yang lahir berkat ide Ali Moertopo dan mendapat restu dari Soeharto. Menurut Harry Tjan Silalahi, Ali Moertopo mendambakan Indonesia memiliki lembaga “ideas factory” yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan orde baru. Berdirinya CSIS terinspirasi oleh lembaga Rand Corporation di Santa Monica, California yang memberikan sumbangan pemikiran

<sup>120</sup> Lihat Dhaniel Dakidae, *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm 224-225.

<sup>121</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 347.

<sup>122</sup> David Jenkins, *op.cit.*, hlm 20-21.

bagi Angkatan Udara Amerika Serikat yang kemudian diperluas dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>123</sup>

Francois Raillon membuat tiga garis besar dalam melihat rivalitas itu *Pertama*, persaingan untuk mendapatkan perhatian presiden atau tempat istimewa di sisi Soeharto. *Kedua*, memaksakan strategi ekonomi, dan *ketiga*, menonjolkan dominasi politik mereka. Dalam sudut pandang kedua, Ali Moertopo lebih mendukung pembangunan sektor swasta melalui simbiosis dengan negara, meniru model ekonomi Jepang dan memilih kapitalisme birokratis, seperti model Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Negara). Konsep ini didukung oleh CSIS dengan arsiteknya Dr. Panglaykim. Sedangkan Soemitro lebih mendukung konsep kelompok teknokrat Widjojo Nitisastro yang lebih mendorong hubungan ekonomi dengan Amerika dan menekan campur tangan pemerintah seminim mungkin.<sup>124</sup>

Melengkapi pendapat Raillon di atas, Ulf Sundhaussen melihat rivalitas itu disebabkan oleh adanya perebutan pengaruh atau pertentangan dua kepribadian yang sangat kuat untuk menonjolkan dominasi politik di antara mereka dan keduanya mencoba untuk menetapkan diri sebagai orang terkuat kedua dalam pemerintahan orde baru,<sup>125</sup> bahkan isu yang beredar keduanya berambisi untuk menggantikan kedudukan Soeharto di kemudian hari.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Lihat tulisan Harry Tjan Silalahi sebagai kontributor dalam buku *Sekar Semerbak Kenangan Untuk Ali Moertopo*, Jakarta, CSIS, 1985, hlm 336-341. Buku ini ditulis oleh para kolega dan beberapa orang yang diketahui pernah menjalin hubungan dengan Ali Moertopo.

<sup>124</sup> Lihat Francois Raillon, *Politik Dan Ideologi Mahasiswa. Pembentukan Dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm 115.

<sup>125</sup> Ulf Sundhaussen, "The Military : Structure Procedures and Effects on Indonesian Society", *op.cit.*, hlm 72.

<sup>126</sup> Rum Aly, *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*, Jakarta, Kompas, 2004, hlm 395.

Ali Moertopo adalah orang kepercayaan Soeharto dalam lembaga-lembaga pengendali politik yang sifatnya informal dan memiliki kepercayaan hampir tidak terbatas, sedangkan Soemitro adalah sosok pribadi yang keras dan berkuasa langsung atas pasukan. Saat menjabat sebagai Pangkopkamtib, Soemitro dipandang publik telah memainkan politik untuk memperkuat pengaruhnya yang sebenarnya tidak disukai Soeharto dan Panggabean.<sup>127</sup> Hubungannya dengan Soeharto lebih pada pekerjaan, bukan secara pribadi.<sup>128</sup> Ia mendapat dukungan dari perwira-perwira tinggi Hankam yang digambarkan Crouch sebagai perwira “profesional berpendirian”, seperti Letjen Sutopo Juwono, Letjen Sarwo Edi Wibowo, Letjen Sajidiman Surjohadiprojo, dan Jenderal Nasution. Meskipun menghendaki adanya perubahan, tetapi mereka tetap menghendaki militerlah yang berkuasa.<sup>129</sup>

Ali Moertopo dianggap sebagai politikus yang cepat memperoleh reputasi dalam Golkar, setelah Soeharto menunjuk Opsus untuk memperkuat konsolidasi Golkar menuju pemilu 1971.<sup>130</sup> Golkar kemudian digunakan sebagai basis kekuatan dan pengaruh Ali Moertopo selama dan sesudah pemilu.<sup>131</sup> Menurut Allan A. Samson dalam artikelnya *Indonesia 1972 : The Solidification of Military Control*, kekuatan sesungguhnya dalam konsolidasi Golkar adalah Hankam yang dipengaruhi oleh Soemitro, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dipimpin

---

<sup>127</sup> Ulf Sundhaussen, “The Military : Structures Procedures and Effects on Indonesian Society”, *op.cit.*, hlm 64.

<sup>128</sup> David Jenkins, *op.cit.*, hlm 24.

<sup>129</sup> Harold Crouch, *op.cit.*, hlm 344-355.

<sup>130</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm 28

<sup>131</sup> William Lidle, *op.cit.*, hlm 140.

Amirmachmud, dan Badan Pemandu Pemilihan Umum (Bappilu) yang dipimpin Ali Moertopo dengan menggunakan Opsus sebagai basis kekuatannya.<sup>132</sup>

Hankam menggunakan kekuatan yang bersifat memaksa dan pengaruhnya tersebar luas dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Lembaga ini berperan sebagai pengawas di berbagai daerah sampai tingkat desa.<sup>133</sup> Dalam pengawasan pemilu, Hankam memiliki personel-personel keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas Golkar. Depdagri menggunakan jaringan administrasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Para camat menjadi “mata rantai” dengan kepala desa dan dukuh. Tujuannya adalah membentuk suatu jaringan yang dapat mempengaruhi orang-orang desa. Organisasi pendukung utamanya disebut Korps Karyawan Kementrian Dalam Negeri (Kokarmendagri) yang bertugas mengikat semua pegawai negeri untuk wajib memilih Golkar.<sup>134</sup>

Bappilu berpusat di Jakarta dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kampanye yang terjalin dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.<sup>135</sup> Kelompok Bappilu berperan besar dalam membawa kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 dengan memperoleh 34 juta suara atau 62 % meninggalkan tiga partai besar, yaitu Nahdatul Ulama (NU) yang memperoleh 10,2 juta suara atau 18,7 % dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) memperoleh 3,8 juta suara atau 6,9 %.<sup>136</sup> Unsur-unsur yang ada di Bappilu didominasi oleh

---

<sup>132</sup> Lihat Allan A. Samson, “Indonesia 1972 : The Solidification Of Military Control”, dalam *Asian Survey*, Volume XIII, No. 2, February 1973, hlm 133.

<sup>133</sup> *loc.it.*,

<sup>134</sup> William Lidle, *op.cit.*, hlm 138-139.

<sup>135</sup> *loc.it.*,

<sup>136</sup> Tentang perolehan suara secara keseluruhan dan proses kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, lihat karya Masashi Nishihara, *Golkar and The Indonesian Elections of 1971*, Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project Monograph Series, 1972, hlm 42.

kelompok Ali Moertopo, termasuk para *cukong*, cendekiawan, pejabat intelejen, dan koran baru *Suara Karya* yang lahir melalui gagasan Ali Moertopo dan diterbitkan sebelum pemilu sebagai pendukung Golkar.<sup>137</sup>

Sukses Ali Moertopo dan Sudjono Humardhani adalah keberhasilannya dalam mendorong organisasi GUPPI masuk sebagai pendukung Golkar pada tahun 1971.<sup>138</sup> Melalui Ali Moertopo, pemerintah orde baru mengambil langkah untuk mengontrol secara ketat kekuatan politik Islam<sup>139</sup> dengan membuka saluran saluran yang cukup bagi aspirasi politik mereka di dalam pengawasan pemerintah. Ali Moertopo dan Sudjono Humardhani duduk sebagai dewan pelindung GUPPI melalui Munas (Musyawarah Nasional) tanggal 27 Januari 1971. Intervensi Opsus dijalankan dalam rapat partai, memanipulasi konvensi partai, dan menciptakan krisis kepemimpinan yang pada intinya mendorong pemerintah untuk memilih pemimpin yang akomodatif dengan pemerintah.

Intervensi Opsus terjadi pada dua partai besar, yaitu PNI dan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Parmusi adalah partai Islam yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1968 dengan bekas orang-orang Masyumi sebagai pendukungnya. Intervensi ini dilakukan dengan cara menempatkan orang-orang yang dianggap lunak dan diharapkan loyal kepada pemerintah. Dalam kasus Konggres PNI di Semarang pada tahun 1970, Ali Moertopo menjamin Hadisubeno yang dikehendaki Soeharto untuk menjadi ketua umumnya.<sup>140</sup> Begitu juga dalam

---

<sup>137</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm 45.

<sup>138</sup> Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm 77-88.

<sup>139</sup> *ibid.*, hlm 10.

<sup>140</sup> Lihat keterangan singkat Hardi (tokoh PNI) sebagai kontributor dalam buku Krisna R. Sempurnadjaja (penyunting), *H. Alamsjah Ratu Perwiranegara 70 Tahun. Pesan dan Kesan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995, hlm 44-45.

Parmusi dengan menempatkan orang-orang yang lebih lunak dengan pemerintah, yaitu Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Dalam kasus ini pemerintah secara ketat mencegah naiknya “gembong-gembong” Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dianggap militan dan kurang loyal terhadap pemerintah.<sup>141</sup>

Ada indikasi, bahwa Ali Moertopo ingin menguasai Golkar sebagai basis dukungan personal dan mengubah menjadi organisasi independen dari Hankam. Hal ini ditentang keras oleh kelompok Hankam dan berniat untuk mencegah Golkar agar tidak tumbuh menjadi basis kekuatan Ali Moertopo.<sup>142</sup> Harold Crouch menilai persaingan antara kelompok ini membentuk suatu pergesekan di lingkungan elit kekuasaan setelah Ali Moertopo sukses menjadikan Golkar sebagai pemenang pada pemilu 1971. Akhirnya, jabatan-jabatan dalam tubuh Golkar terbagi di antara dua kekuatan yang sama kuat pada Munas I Golkar bulan September 1973.<sup>143</sup>

Perpecahan di dalam tubuh Golkar pusat pasca Pemilu 1971 adalah efek dari rivalitas mereka. Meskipun rivalitas Ali Moertopo dengan Soemitro sengaja untuk ditutupi oleh kalangan militer, tetapi salah satu tokoh terkemuka CSIS Harry Tjan Silalahi menilai secara objektif, bahwa perbedaan atau pertentangan antara keduanya memang ada. Harry Tjan Silalahi yang dikenal dekat dengan kelompok Aspri menggambarkan figur Ali Moertopo dan Soemitro memiliki watak pribadi

---

<sup>141</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 278-304.

<sup>142</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm 56 & 62.

<sup>143</sup> Harold Crouch, “The 15 January Affair in Indonesia”, *Dyason House Papers*, 1974, dikutip Ignatius Haryanto, *Indonesia Raya di Bredel*, Yogyakarta, LKIS, 2006, hlm 176.

yang *ekstrovert* (terbuka), terkadang ada tumpang tindih dalam wewenang, sehingga yang menonjol akan keluar.<sup>144</sup>

Pada tahun 1972 perbedaan pandangan antara Ali Moertopo dengan Soemitro mulai tampak ketika Ibu Tien Soeharto mengeluarkan gagasan pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah. Pada awalnya Soemitro kurang begitu setuju karena proyek ini bersifat mercusuar, apalagi dana pembangunannya akan diambil melalui sumbangan para gubernur.<sup>145</sup> Sedangkan Ali Moertopo menempatkan dirinya sebagai pihak yang berada di belakang Ibu Tien dan diketahui sebagai salah satu pendukung utama proyek ini bersama Sudjono Humardhani, Panggabean dan Amirmachmud. Meskipun sempat berseberangan, Soemitro pada akhirnya menerima gagasan ini dan ia melakukan tindak represif terhadap gerakan anti Taman Mini.

Pada tanggal 31 Juli 1973, pemerintah mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk mengganti undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini merupakan hasil tuntutan dari kelompok non Islam yang didukung oleh organisasi Kristen dan kelompok sekuler agar perlindungan hukum perkawinan tidak diatur oleh hukum Islam. Ali Moertopo dan para pendukungnya diduga sebagai perancang undang-undang ini untuk mewujudkan proses sekularisasi politik Islam.<sup>146</sup> Rancangan undang-undang ini ditentang oleh kelompok Islam dan melakukan demonstrasi di Gedung DPR pada sidang Pleno tanggal 27 September 1973. Soemitro diketahui telah memanfaatkan situasi dan

---

<sup>144</sup> *ibid.*, hlm 164.

<sup>145</sup> Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, *op.cit.*, hlm 224-249.

<sup>146</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 352.



berkompromi dengan kelompok Islam untuk menyerang kelompok Ali Moertopo.<sup>147</sup>

Rivalitas antara Ali Moertopo dengan Soemitro semakin tampak bersamaan dengan munculnya gerakan protes mahasiswa pada tahun 1973. Mahasiswa menolak dominasi modal Jepang, korupsi, perlindungan ekonomi terhadap para *cukong* yang di dalamnya melibatkan para jenderal kepercayaan Soeharto. Situasi ini justru menguntungkan bagi Soemitro sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan. Banyak penafsiran muncul, bahwa aksi-aksi protes mahasiswa terhadap strategi pembangunan ekonomi orde baru tidak ditindak tegas oleh Soemitro. Justru situasi itu dimanfaatkan oleh Soemitro dengan mempengaruhi gerakan mahasiswa dalam upaya mencari dukungan untuk menjatuhkan Ali Moertopo. Demikianlah pembahasan pada bab kedua, perkembangan rivalitas antara Soemitro maupun Ali Moertopo akan dibahas dalam bab berikutnya.

---

<sup>147</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm 77-78.



**BAB III**

**FAKTOR PENDORONG KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM  
PERISTIWA 15 JANUARI 1974**

**A. Dominasi Modal Jepang**

Strategi pembangunan ekonomi perlu ditinjau kembali dalam perjalanan sejarah sejak proses peralihan orde lama ke orde baru. Menjelang akhir tahun 1960-an muncul pergeseran orientasi dari masalah pembinaan bangsa yang mengedepankan nasionalisme ke masalah pembangunan ekonomi. Orde baru mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak kapitalis,<sup>148</sup> setelah Soeharto melakukan perombakan total politik luar negeri Indonesia dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sejak orde lama dan mencari upaya untuk mendapatkan bantuan modal asing dengan membina hubungan kembali dengan negara-negara barat yang sempat renggang pada masa pemerintahan Sukarno.<sup>149</sup>

Arus balik kebijakan ini terjadi ketika Indonesia berada dalam keterpurukan ekonomi dan tekanan situasi global pada masa orde lama. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, Soeharto bersama dua tokoh sipil terkemuka, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri Urusan Ekonomi Sri Sultan Hamengku Buwono IX (triumvirat) mengambil kebijakan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, dan Jepang sebagai salah satu negara kuat di

---

<sup>148</sup> Lihat Manuel Kaisiepo, "Dari Kepolitikan Birokratik Ke Korporatime Negara" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm 22.

<sup>149</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, op.cit*, hlm 418.

Asia.<sup>150</sup> Setelah menyelesaikan Konfrontasi Malaysia pada tahun 1966, Indonesia bergabung kembali dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bulan Mei dan IMF (International Monetary Fund) pada bulan April di tahun 1966.<sup>151</sup>

Sebagai institusi keuangan global, IMF memiliki misi membangun dunia yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas. Organisasi internasional ini mendorong Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya untuk membuka proses liberalisasi.<sup>152</sup> Tiga langkah yang ditempuh pemerintah orde baru adalah mengambil kebijakan ekonomi untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara barat, impor komoditi dalam jumlah besar yang dibiayai pinjaman negara-negara barat, dan aliran modal melalui investasi asing.<sup>153</sup>

Pada tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang dibentuk Sukarno. Pemerintah membentuk dewan stabilisasi ekonomi yang dipimpin Soeharto dan secara formal mengangkat para ahli ekonomi (teknokrat) Universitas Indonesia menjadi anggota penasihat pribadinya, seperti Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Emil Salim, Ali Wardhana, Subroto,<sup>154</sup> dan dibantu dua ahli ekonomi senior Indonesia, Soemitro Djohadikusumo dan Sarbini Sumowinoto.

Latar belakang pendidikan para teknokrat (kelompok Widjojo Nitisastro) memberikan peran besar pada pola pembangunan ekonomi orde baru yang “berorientasi ke luar” untuk menarik masyarakat bisnis internasional. Majalah *Far*

<sup>150</sup> Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, op.cit., hlm 74-79.

<sup>151</sup> Lihat M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2005, hlm 569.

<sup>152</sup> Lihat Titus Odong Kusumajati, “Kebijakan Ekonomi Indonesia Di Bawah Bayang Kepentingan Global” *Indonesia Alternatif*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm 133-135.

<sup>153</sup> Lihat Yahya Muhaimin, *Bisnis Dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, 1991, hlm 57.

<sup>154</sup> Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, op.cit, hlm 70.

*Eastern Economic Review* dalam artikelnya yang berjudul “The Berkeley Mafia Meets The Military” memberikan penjelasan singkat tentang teknokrat yang menempuh pendidikan barat. Menurut beberapa pengamat ekonomi, kemunculan teknokrat sudah lama direncanakan oleh kepentingan Amerika Serikat. Mereka mendapatkan sebutan “mafia Berkeley”, mengacu pada tempat para teknokrat menempuh pendidikan di Universitas California University, Berkeley.<sup>155</sup>

Pada tahun 1967 Indonesia menyetujui dibentuknya organisasi negara-negara kreditor non komunis bagi Indonesia atau IGGI (International Governmental Group on Indonesia).<sup>156</sup> Pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menetapkan UU PMA dan UU PMDN untuk melindungi investasi asing. Menurut analisis Mohtar Mas’oed, motif di balik UU PMDN adalah untuk mengarahkan potensi ekonomi Cina di Indonesia yang dipandang memiliki modal dalam jumlah yang besar. Program tersebut hanya mempercepat kebangkitan kembali dominasi ekonomi Cina dan menyingkirkan pengusaha-pengusaha pribumi. Syarat yang ditentukan PMDN tidak mampu diikuti oleh pengusaha-pengusaha pribumi dengan modal yang terbatas.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Artikel tersebut memberi penjelasan, bahwa munculnya para teknokrat tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat dalam ekspansi perusahaan multinasional yang berbasakan barat. Amerika Serikat juga membentuk dua kekuatan, yaitu teknokrat dan militer yang merupakan pendukung dalam mengendalikan kekuatan komunis di Indonesia. Para teknokrat berhasil menempuh studinya di Universitas Berkeley lewat sponsor (beasiswa) For Foundation yang menjanjikan mereka untuk menempuh studi lanjut di Amerika Serikat. Lulusan pertama adalah Widjojo Nitisastro di tahun 1961, Ali Wardhana (Ph.D., Berkeley 1962), J. B. Sumarlin (Ph.D., Berkeley) dan Emil Salim (Ph.D., Berkeley 1964) sedangkan Subroto bersama Mohammad Sadli menerima Ph.D., di Universitas Indonesia. Keterangan mengenai teknokrat orde baru, lihat Guy Sacerdoti, “The Berkeley Mafia Meets The Military” *Far Eastern Economic Review*, May 16 1980, hlm 49.

<sup>156</sup> M. C. Ricklefs, *op.cit*, hlm 572.

<sup>157</sup> Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, *op.cit*, hlm 99.

Setelah disahkannya UU PMA, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang begitu pesat. Pada bulan April 1967, muncul perusahaan Freeport Sulfur Inc yang bertujuan mengeksplorasi dan menambah cadangan tembaga di Irian Jaya.<sup>158</sup> Dalam waktu yang sama muncul beberapa perusahaan yang dikembangkan melalui kerja sama antara sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat dengan para *cukong*, seperti: Tri Usaha Bhakti, Bank Windhu Kentjana, PT. Garuda Mataram, dan Mandala Airlines.<sup>159</sup>

Undang-Undang PMA menempatkan Amerika Serikat dan Jepang menjadi negara yang mendominasi penanaman modal di Indonesia. Menurut keterangan Thee Kian Wie, Amerika Serikat menduduki posisi teratas dalam penanaman modal di sektor minyak, baik dalam jumlah proyek maupun nilai modalnya. Sedangkan Jepang menduduki posisi teratas, khususnya dalam sektor manufaktur, baik dari nilai investasi maupun jumlah proyeknya, diikuti sembilan negara lainnya, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, Jerman Barat, Belanda, Taiwan, Singapura, Australia, India, dan Inggris.<sup>160</sup> Posisi Jepang pada peringkat pertama dalam penanaman modal di sektor manufaktur memberikan kesan, bahwa Jepang mendominasi di seluruh sektor penanaman modal di Indonesia.

---

<sup>158</sup> Freeport Sulfur Inc kemudian berubah nama menjadi Freeport Indonesia Inc. Tidak seperti penanaman modal asing lainnya, Freeport Sulfur Inc mendapatkan lisensi langsung dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Menurut Ingrid Palmer sebagaimana dikutip oleh Yahya Muhaimin, masuknya Freeport Sulfur Inc adalah hasil *lobbying* yang dilakukan oleh Ali Boediardjo, kawan lama Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm 139.

<sup>159</sup> Kegiatan bisnis ini dijalankan oleh perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Apabila pada periode 1958-1965, Angkatan Darat terlibat dalam berbagai perusahaan negara, maka sejak tahun 1967 mereka memainkan peran penting dalam sektor usaha swasta dengan memanfaatkan posisi dalam birokrasi. Keterangan lebih lanjut mengenai perusahaan ini lihat "Kaum Militer Dalam Business" *Tempo*, 3 Oktober 1970. Keterangan singkat mengenai PT. Tri Usaha Bhakti lihat Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm 191 (catatan kaki).

<sup>160</sup> Lihat Thee Kian Wie, "Menyikapi Peranan Modal Jepang" dalam *Prisma*, Tahun XII, No. 7, Juli 1983, hlm 28-30 (baca tabel 2).

Penanaman modal Jepang di sektor manufaktur pasca UU PMA berkembang pesat di tahun 1970 sampai 1974. Penanaman modal Jepang dibagi dalam tiga jenis, yaitu investasi yang dioprasionalkan untuk meningkatkan produksi sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang, substitusi impor yang diusahakan untuk menghasilkan produk bagi pasar dalam negeri Jepang, termasuk Indonesia, dan investasi langsung dengan tujuan ekspor yang diusahakan untuk membangun industri manufaktur, baik bagi pasar luar negeri maupun dalam negeri negara penanam modal. Pada umumnya investasi diusahakan di negara-negara dengan upah yang relatif rendah.<sup>161</sup>

Di bawah pemerintahan Tanaka yang menggantikan Perdana Menteri Sato Eisaku pada bulan Juli tahun 1972<sup>162</sup>, Jepang berupaya melakukan program politik untuk mewujudkan “Doktrin Tanaka”. Inti dari program politik Tanaka adalah relokasi industri dari daerah-daerah di sekitar Tokyo-Yokohama (Kanto) dan Osaka-Kobe (Kansai) serta kerja sama dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk usaha menstabilkan harga, suplai energi, dan restrukturisasi. Program politik ini disambut baik oleh swasta Jepang sebagai usaha ekspansi ekonomi dengan bantuan pemerintah.<sup>163</sup>

Di samping ingin memperluas pasar, Jepang sangat berminat untuk mencari sumber bahan mentah bagi perkembangan industri Jepang.<sup>164</sup> Kebijakan ekonomi ini terjadi setelah Jepang mengalami krisis minyak pada tahun 1973-1974 dan

---

<sup>161</sup> *ibid*, hlm 32.

<sup>162</sup> Sato Eisaku menjadi Perdana Menteri Jepang sejak 1964-1972. Dilahirkan di Yamaguchi, 27 Maret 1901 dan meninggal di Tokyo 2 Juni 1975.

<sup>163</sup> Lihat Hero Kuntjoro Jakti, “Kepentingan Jepang” dalam *Prisma*, Tahun XVII No. 9, 1998, hlm 60.

<sup>164</sup> *ibid*, hlm 61.

akan mengurangi ketergantungannya pada negara-negara di Timur Tengah.<sup>165</sup> Untuk merealisasikannya, Jepang mulai memperhatikan hubungan ekonominya dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Isu penolakan modal Jepang (anti Jepang) mulai tahun 1973 hingga 1974 merupakan gejala regional. Gejala ini dirasakan juga di Bangkok (Thailand) karena Jepang di bawah pemerintahan Tanaka mulai mengembangkan sayapnya terhadap negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Pada tahun 1973 dominasi modal Jepang semakin meningkat dengan berkembangnya produk-produk Jepang dan posisinya sebagai negara yang paling mendominasi sektor penanaman modal manufaktur di Indonesia. Ini menunjukkan, bahwa Jepang telah melakukan ekspansi ekonominya dan menjadi pesaing terkuat Amerika Serikat.

Kerja sama ekonomi Jepang terhadap negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dipahami sebagai usaha mencari sumber daya alam baru (minyak) dan relokasi industri yang dikehendaki masyarakat di Jepang akibat negatif dari proses industrialisasi.<sup>166</sup> Pandangan ini tercermin dalam pidato “pernyataan diri mahasiswa” yang disampaikan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Hariman Siregar dalam “malam keperihatinan” tanggal 31 Desember 1974 di Jakarta. Dalam pidato itu, Hariman Siregar mengatakan,

Apabila kita kembalikan kepada masalah saling ketergantungan antara bangsa khususnya antara Jepang dan Indonesia, maka ada masalah yang akan timbul. Dari Jepang sebagai suatu negara dengan tingkatan teknologi dan industri, pengalihan keahlian pengolahan dan penggalian sumber-sumber alam, dan lain-lain. Sedangkan dari Indonesia, diharapkan memberikan sumber-sumber alam bagi industri-industri Jepang dan sebagai pasar dari barang-barang industri Jepang. Akan tetapi di balik

---

<sup>165</sup> Lihat, J. A. A. Stockwin, *Pluralisme Politik Dan Kemajuan Ekonomi Jepang*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1984, hlm 338.

<sup>166</sup> “Ayo Bermain Dengan Jepang”, *Tempo*, *op.cit*, hlm 41.

semua itu, ada cerita tersendiri mengenai Jepang ini. Upah buruh yang terus menanjak dan pengotoran udara memaksa pengalihan pabrik-pabrik dengan padat karya ke negara-negara lain, antara lain pabrik tekstil di Indonesia...<sup>167</sup>

Mahasiswa menilai dominasi modal Jepang akan membawa ketergantungan dan mengakibatkan lemahnya kedaulatan negara. Mereka melihat gejala ini pernah dialami negara-negara di Amerika Latin terhadap Amerika Serikat. Dalam pidato yang sama Hariman Siregar mengatakan,

Ini yang kami khawatirkan akan terjadi dalam hubungan antara Indonesia dan Jepang. Apalagi Jepang telah menunjukkan kebuasan dalam cara-cara mengeruk keuntungan. Dengan demikian, sebenarnya hubungan Indonesia dan Jepang bukan saling menguntungkan akan tetapi ketergantungan sepihak yaitu dari Indonesia terhadap Jepang. Dan apalagi tidak ditinjau kembali kami kira jangan-jangan Indonesia akan sama dengan nasib negara-negara Amerika Latin tersebut di atas...<sup>168</sup>

Salah satu sasaran protes mahasiswa adalah keterlibatan sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang memainkan peran penting dalam kegiatan bisnis dengan para *cukong* dan intervensi yang terlalu dominan dalam pemerintahan. Ini sudah terjadi sejak Soeharto membentuk Spri yang digambarkan sebagai “super kabinet”, sehingga Nasution menilai perkembangan yang terjadi tidak sejalan dengan tekad orde baru untuk melaksanakan UUD secara murni dan konsekuen<sup>169</sup>

Ricard Robinson dalam artikelnya *Toward A Clas Analysis Of The Indonesian Military Bureaucratic State* menilai sekelompok militer yang mendapatkan keistimewaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan para *cukong* pada masa orde baru menempatkan mereka sebagai pengelola sektor-sektor ekonomi yang

---

<sup>167</sup> Lihat Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta, Mentika Media Utama, 1994, hlm (Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa).

<sup>168</sup> *ibid.*

<sup>169</sup> Lihat Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jilid 7. *Masa Konsolidasi Orde Baru*, Jakarta, Masagung, 1988, hlm 201.



memberikan pemasukan besar bagi negara. Robinson menyebut masa orde baru sebagai “birokrasi kapitalis” yang menempatkan sekelompok militer sebagai pihak yang memanfaatkan berbagai macam akses untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.<sup>170</sup>

Pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru menempatkan mereka bukan hanya sebagai penjaga modal, lebih dari itu, militer juga berperan sebagai pengelola modal. Contoh paling nyata adalah kasus Jenderal Ibnu Sutowo yang memiliki otonomi khusus di Pertamina sejak tahun 1968, sebuah perusahaan minyak yang berkembang dengan modal pengusaha Jepang.<sup>171</sup> Sutowo berkuasa penuh terhadap komoditi ekspor minyak dan berhasil mengembangkan kegiatan bisnis di Astra, Tunas Group, perhotelan, dan properti dengan para *cukong*,<sup>172</sup> sehingga Donald K. Emerson memberi istilah “durian runtuh” untuk menggambarkan keuntungan minyak yang dimanfaatkan Sutowo hingga tahun 1975.<sup>173</sup>

Pertamina dan Bulog (Badan Urusan Logistik) yang dikelola Jenderal Ahmad Tirtosudiro adalah dua contoh instansi negara yang begitu gencar diprotes mahasiswa sebagai sarang eksploitasi kekayaan negara.<sup>174</sup> Pada tahun 1970

---

<sup>170</sup> Dalam tulisan Richard Robinson, keluarga Cendana (Cendana Group) memiliki bisnis besar, baik sebagai pemegang saham sendiri maupun “join” (kerja sama) dengan para *cukong* (Liom Sioe Liong). Aliansi bisnis dengan kelompok bisnis Cina, antara lain; Kostrad, Cendana, Opsus, Sultan, Ibnu Sutowo, dan Pemerintah Jakarta. Mengenai analisis birokrasi kapitalis yang ditopang oleh kelompok militer dan hubungan mereka dengan para *cukong*, lihat Richard Robinson, “Toward A Class Analysis Of The Indonesian Military Bureaucratic State” dalam *Indonesia* No. 25, Cornell Modern Indonesia Project, April 1978, hlm 23-37.

<sup>171</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 310-312.

<sup>172</sup> Richard Robinson, *op.cit.*, hlm 34.

<sup>173</sup> Donald K. Emerson “The Bureaucracy in Political Context” dalam Karld. D. Jackson and Lucian Pye (ed), *Political Power and Communications in Indonesia*, Berkeley, California University Press, 1978, hlm 114.

<sup>174</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm 313-314.



muncul gerakan protes mahasiswa untuk menentang praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Di Jakarta sejumlah aktivis mahasiswa yang dipelopori Arif Budiman dan Hadji Cornelius Princen melancarkan aksi “mahasiswa menggugat”. Soeharto kemudian membentuk tim anti korupsi (komisi 4) yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Wilopo, Ignatius Johannes Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Profesor Ir. Johannes, Sutopo Juwono, dan Mohammad Hatta. Tim anti korupsi yang terdiri dari para tokoh nasional ini dipandang tidak mampu berbuat banyak karena Soeharto sendiri masih mengandalkan mereka untuk membangun kekuatan ekonomi orde baru.<sup>175</sup>

Isu korupsi dan keprihatinan terhadap praktek politik dan bisnis para jenderal kepercayaan Soeharto berlanjut pada tahun 1973. Mahasiswa menuntut dibubarkannya Aspri yang merupakan kelanjutan protes mahasiswa terhadap organisasi Spri pada tahun 1968.<sup>176</sup> Para jenderal pembantu pribadi presiden yang terdiri dari Ali Moertopo, Soerjo, dan Sudjono Humardhani ini digambarkan David Jenkins sebagai kelompok “pragmatis politis” karena keterlibatannya dalam berbagai intervensi politik, perlindungan terhadap para *cukong*, hubungan bisnis dengan Jepang, dan berpengaruh dalam hubungan ke istana.<sup>177</sup>

### **B. Soemitro Mempengaruhi Gerakan Mahasiswa**

Gerakan protes mahasiswa diwujudkan dengan berbagai dialog yang muncul dari dalam kampus, khususnya di beberapa perguruan tinggi di Jawa. Salah satu gerakan protes mahasiswa itu menghasilkan “Petisi 24 Oktober 1973” yang disampaikan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, di Taman Makam

---

<sup>175</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 81.

<sup>176</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm 346.

<sup>177</sup> David Jenkins, *op.cit.*, hlm 29-30.

Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beberapa tokoh mahasiswa yang merumuskan petisi ini adalah Judil Herry dan Theo L. Sambuaga.<sup>178</sup> Aksi mahasiswa dilanjutkan tanggal 11 November 1973, ketika Ketua IGGI dan Menteri Kerjasama Belanda, Jan Pronk berkunjung ke Indonesia selama 10 hari.

Menurut keterangan *Tempo*, kunjungan Pronk adalah meninjau kembali bantuan asing yang diberikan IGGI terhadap Indonesia. Kunjungan Pronk di Jakarta dimanfaatkan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia untuk menyampaikan setangkai bunga putih dan memorandum keprihatinan mahasiswa terhadap modal asing yang diberikan langsung oleh Jajang Pamontjak.<sup>179</sup> Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 17 November 1973, ketika Pronk hadir dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.<sup>180</sup>

Setelah kunjungan Pronk, Hariman Siregar bersama Gurmilang Kartasasmita menyelenggarakan kegiatan diskusi di kampus Salemba 4, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia untuk membuka komunikasi dari dalam kampus. Bersama dosen muda ekonomi, Dorojatun Kuntjorojakti, kegiatan diskusi yang diberi nama “kuliah kebun Dorojatun” mengangkat tema seputar modal asing, pola pembangunan, dan ketimpangan sosial di Indonesia. Menurut Dorojatun Kuntjorojakti, pola pembangunan orde baru telah menghasilkan ketimpangan pembagian kekayaan antar golongan dan daerah dalam negara yang melimpah hasil buminya.<sup>181</sup>

---

<sup>178</sup> B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin, *op.cit.*, hlm 228

<sup>179</sup> “Setangkai Bunga Putih Untuk Pronk” *Tempo*, Tahun III No. 37, 17 November 1973, hlm 6.

<sup>180</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 317-320.

<sup>181</sup> “Setangkai Bunga Putih Untuk Pronk” *Tempo, op.cit.*, hlm 7.

Ketika tekanan mahasiswa semakin memuncak dengan tuntutan dibubarkannya Aspri dan perubahan terhadap strategi pembangunan ekonomi yang didominasi oleh modal Jepang, Soemitro sebagai Pangkopkamtib justru memanfaatkan situasi, sedangkan Sudomo telah mengeluarkan peringatan keras terhadap demonstrasi mahasiswa. Soemitro tidak bertindak tegas dalam menghadapi aksi mahasiswa. Justru pada bulan November 1973, ia melakukan kunjungan ke berbagai kampus di Jawa.<sup>182</sup> Dalam kunjungannya itu, ia mengemukakan kata-kata dari pidato presiden pada hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1973 dengan menjanjikan “pola kepemimpinan baru”, dan berwacana “komunikasi dua arah” antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>183</sup>

Menurut Garry Hansen dalam tulisannya *Indonesia 1974 : A Momentous Year*, Soemitro secara terbuka mengakui, bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap pandangan masyarakat. Ia membuka opini “pola kepemimpinan baru” untuk mengkritisi kebijakan pemerintah agar lebih tanggap terhadap keperluan masyarakat.<sup>184</sup> Dari opini ini ada dua penafsiran, apakah ia berharap tindakannya akan meredakan permintaan mahasiswa atau sebaliknya, Soemitro berupaya mempengaruhi mahasiswa untuk mencari dukungan dan menempatkan dirinya berhadapan secara langsung dengan Ali Moertopo.<sup>185</sup>

Pada bulan Desember 1973 aksi-aksi mahasiswa muncul di Jakarta dan Bandung sebagai bentuk penolakan mereka terhadap modal Jepang, korupsi, hubungan bisnis sekelompok jenderal Angkatan Darat, bahkan sudah

---

<sup>182</sup> Francois Raillon, *op.cit.*, hlm 115. Lihat juga *Tempo* 8 Desember 1973, hlm 5-7.

<sup>183</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm 353.

<sup>184</sup> Lihat Garry Hansen, “Indonesia 1974 : A Momentous Years”, dalam *Asian Survey*, Volume XV No. 1, University of California Press, January 1975, hlm 150-151.

<sup>185</sup> *loc.it.*,

menyinggung kepemimpinan Soeharto, seperti yang disampaikan Hariman Siregar pada “malam keprihatinan” tanggal 31 Desember 1973. Dalam “pidato Pernyataan diri mahasiswa” itu ia mengatakan,

Perkembangan ekonomi yang sangat mengejutkan akhir-akhir ini tentu bukan hanya akibat dari suatu strategi pembangunan ekonomi semata-mata, tetapi juga disebabkan oleh strategi politik yang dilancarkan sejak 1966. Setelah secara moral dan konstitusional Jenderal Soeharto menjadi Presiden di negeri ini, maka pembangunan ekonomi telah dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan mitos baru yang banyak menimbulkan harapan. Tetapi ternyata perkembangan ekonomi telah menolak kemauan penguasa untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai alat legitimasi dan mitos politik semata. Hal ini disebabkan karena sikap penguasa yang demikian itu akan selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang menguntungkan kelompok yang ada di sekitar kekuasaan..<sup>186</sup>

Strategi pembangunan ekonomi yang didominasi oleh modal Jepang menuntut mahasiswa untuk bergerak sebagai agen perubahan masyarakat. Dalam pidato “pernyataan diri mahasiswa”, Hariman Siregar menyatakan :

Rekan-rekan, kalau ini yang terjadi tahun 1974 dan seterusnya hanyalah pengulangan sejarah sebelum kemerdekaan ketika kita dijajah Jepang. Sudah tentu bentuknya berlainan karena bila dulu yang ada adalah Kempetai Jepang, maka sekarang namanya menjadi toyota, mitsubishi, mitsui, dan lain-lain. Kempetai dan mitsubishi antara lain mempunyai tugas menghisap bangsa, kekayaan alam dan darah rakyat Indonesia. Sebagaimana kita dulu menolak Kempetai, sekarang kita pun harus bangkit melawan dominasi Jepang...<sup>187</sup>

### C. Memanfaatkan Kunjungan Tanaka

Sejak kunjungan Soemitro ke berbagai kampus di Jawa, gerakan mahasiswa menunjukkan grafik meningkat karena Soemitro berhasil mempengaruhi mahasiswa dengan membuka ruang bagi gerakan mereka. Soeharto merasakan,

---

<sup>186</sup> Hariman Siregar, *op.cit.*, hlm (Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa). Laporan singkat mengenai pernyataan diri mahasiswa dalam “malam keprihatinan” tanggal 31 Desember 1973, lihat *Tempo*, “H + SG + S = PSI”, Tahun III No. 45, 12 Januari 1974, hlm 6.

<sup>187</sup> Hariman Siregar, *op.cit.*, hlm (pidato “pernyataan diri mahasiswa”).

bahwa rivalitas para jenderal kepercayaannya itu mulai mencapai titik klimaks. Pada tanggal 31 Desember 1973, Soeharto mengadakan pertemuan dengan para jenderal kepercayaannya untuk mengklarifikasikan kepada pers, bahwa persaingan ini sebetulnya tidak ada. Pada pertemuan berikutnya, tanggal 2 Januari 1974 di Cendana, Soemitro diminta Soeharto untuk berbicara di depan pers terkait dengan rivalitas itu. Soemitro dalam otobiografinya mengatakan,

Saya kemukakan, bahwa isu-isu yang menyebutkan akan ada pergantian pimpinan nasional bulan April atau pertengahan tahun ini adalah isu yang aneh, keterlaluhan, dan kotor. Isu itu kemungkinan telah disadap dari dialog-dialog yang saya lakukan belakangan ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang ditangkap salah dan dikhayalkan secara salah, diomongkan secara salah. Isu itu keterlaluhan. Masa kami tidak tahu undang-undang kita, kata saya. Saya kira, itu permainan politik...<sup>188</sup>

Berkaitan dengan isu kepemimpinan nasional yang ramai dibicarakan publik, Soemitro dalam otobiografinya mengatakan, "*Waktu itu tidak jauh dari saya ada Ali Moertopo. Maka sambil menunjuk Ali Moertopo, saya katakan di depan pers : Saya dan dia diisukan akan mengganti Presiden Soeharto. Saya diadakan dengan Jenderal Ali Moertopo. Kemudian Jenderal Ali Moertopo diadakan dengan Pak Topo (Sutopo Juwono). Keterlaluhan...*"<sup>189</sup>

Pada tanggal 9 Januari 1974, mahasiswa di Bandung membakar boneka Tanaka dan sebuah boneka yang bertuliskan "Dulu Haji Peking,<sup>190</sup> Sekarang Haji Tokyo". Tulisan ini sebenarnya menyindir tokoh Aspri Sudjono Humardhani yang dianggap sebagai penghubung bisnis dengan Jepang. Menjelang akhir Desember 1973 mahasiswa dari Bandung dan Jakarta melakukan demonstrasi di Cendana.

<sup>188</sup> Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, op.cit., hlm 310.

<sup>189</sup> *loc.it.*, (nama dalam kurung dari penulis).

<sup>190</sup> "Haji Peking" menyebut nama orang kepercayaan Presiden Sukarno, yaitu Dr. Soebandrio.

Mereka menyampaikan tuntutan untuk bertemu dengan Soeharto, namun tuntutan itu gagal karena ketatnya barisan pengamanan di Cendana.<sup>191</sup>

Keinginan mahasiswa untuk bertemu Soeharto baru terwujud pada tanggal 11 Januari 1974. Dalam pertemuan yang berlangsung di Bina Graha Jakarta, 7 Dewan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di luar Jakarta dan 15 Dewan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta menyampaikan protes kepada Soeharto terhadap kekayaan para pejabat negara, peran Opsus, dan organisasi inkonstitusional Aspri yang berada di bawah pengaruh Ali Moertopo. Dialog ini tidak menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi mahasiswa.<sup>192</sup>

Menanggapi hasil dari dialog itu, Hatta Albanik mengatakan, *“ini bukan satu-satunya cara, kita akan cari jawaban dengan cara lain, entahlah, barangkali akan ada aksi”*. Di Luar Gedung Bina Graha, sejumlah mahasiswa yang tidak mendapatkan undangan melakukan serangkaian aksi kecil yang secara eksplisit menyinggung Tanaka dan Aspri. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan dengan gaya Betawi seakan-akan menunggu kunjungan Tanaka, *“Tanaka, e-e-e- Tanaka, kenapa ente diem-diem aje, mangkanya aye diem-diem aje, karena aye punya Aspri. Aspri, e-e-e Aspri, kenape ente tenang-tenang aje, mangkanya aye tenang-tenang aje, karna aye punya komisi”*.<sup>193</sup>

Ketika tekanan mahasiswa semakin kuat, Ali Moertopo menempatkan pendukungnya untuk memecah suara mahasiswa yang diduga mendukung

---

<sup>191</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 339-349.

<sup>192</sup> *ibid*, hlm 341-342.

<sup>193</sup> Dalam dialog itu, mahasiswa juga mengajukan pertanyaan tentang pembangunan Istana Kalitan di Surakarta, pemilik saham PT. Wana, PT. Bogasari, dan peran Ali Moertopo yang diisukan sebagai “calo” politik. Keterangan lebih lengkap mengenai situasi dialog mahasiswa dengan Presiden Soeharto di Bina Graha, lihat “Katakanlah Dengan Senyum”, *Tempo*, Tahun III, No. 46, 19 Januari 1974, hlm 5-6.

Soemitro. Ali Moertopo memang tidak memiliki banyak massa dari mahasiswa, justru ia menjadi sasaran dari aksi-aksi itu. Majalah *Tempo*, tanggal 12 Januari memberikan laporan singkat mengenai situasi di dalam tubuh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, terkait dengan adanya penolakan sepuluh mahasiswa terhadap kepemimpinan Hariman Siregar. Menurut kelompok pendukung Hariman Siregar, sepuluh orang mahasiswa itu adalah orang-orang binaan Ali Moertopo yang diatur dari luar.<sup>194</sup>

Pada tanggal 14 Januari 1974 sekelompok mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta, sejak sore hingga malam hari bergerak menuju Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kunjungan Tanaka. Menurut Rum Aly, para demonstran berasal dari tujuh belas perguruan tinggi di Jakarta di bawah koordinasi lapangan Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Ada kesan kedatangan Tanaka pada malam hari memang sudah diatur untuk menghindari demonstrasi mahasiswa.<sup>195</sup> Perlu menjadi catatan, bahwa aksi turun ke jalan ini tidak diikuti oleh mahasiswa dari Bandung. Dalam pandangan mereka ada skenario khusus yang dimanfaatkan pihak dari luar kampus untuk menjatuhkan gerakan mahasiswa. Mereka justru menyelenggarakan “apel duka” menyambut kunjungan Tanaka di Universitas Padjajaran, Bandung.<sup>196</sup>

Pada tanggal 15 Januari 1974, sejak pukul 09.00 WIB, sebagian mahasiswa telah berkumpul di depan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mereka menyambut pertemuan kenegaraan antara Soeharto dan Tanaka dengan membawa poster-poster yang bertuliskan “tolak dominasi modal Jepang”, menyebut ‘Tanaka

---

<sup>194</sup> “H + SG + S = PSI”, *Tempo*, 12 Januari 1974, *op.cit.*, hlm 7.

<sup>195</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 359-360.

<sup>196</sup> *ibid.*, hlm 369-370.



sebagai kolonialis”, dan “tolak keberadaan Aspri”. Para mahasiswa kemudian mengadakan upacara pengibaran bendera setengah tiang dengan memproklamkan “Tritura 1974” yang isinya bubarkan Aspri, turunkan harga, dan ganyang korupsi.<sup>197</sup> Sebelum kunjungannya Tanaka di Jakarta dalam misi terakhirnya di Asia Tenggara, gambar Tanaka dibakar di Bangkok (Thailand) dan mahasiswa di Kuala Lumpur (Malaysia) mementaskan pertunjukan boneka berlabel Tanaka.<sup>198</sup>

Pada pukul 10.00 WIB ratusan mahasiswa Universitas Indonesia dan IKIP (Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan) Jakarta bergerak ke arah Monumen Nasional. Sepanjang perjalanan, peserta aksi semakin besar dengan bergabungnya barisan pelajar dari beberapa sekolah di Jakarta. Sebuah bendera Jepang yang berdampingan dengan bendera merah putih di Jalan Merdeka Selatan berhasil diturunkan oleh mahasiswa. Sampai di Jalan Merdeka Barat, barisan mahasiswa mendapat pengawalan ketat dari barisan pengamanan yang menolak bendera merah putih diturunkan setengah tiang. Menghadapi tebalnya barisan pengamanan di sekitar Istana Negara, barisan mahasiswa dan pelajar berputar menuju Tanah Abang dan bergerak menuju kampus Trisakti (Grogol).<sup>199</sup>

Kejadian lain justru terjadi di sekitar istana negara, setelah mahasiswa melakukan upacara di Universitas Trisakti. Menurut laporan *Tempo*, ratusan massa yang umumnya terdiri dari pemuda tanggung, lusuh, dan *compang-camping* yang tidak jelas dari mana datangnya, seolah-olah digerakkan untuk menggantikan mahasiswa yang setelah bubar appel di Universitas Trisakti

---

<sup>197</sup> *ibid.*, hlm 362.

<sup>198</sup> “Hot Time for Tanaka in Indonesia”, *Time*, January 28, 1974.

<sup>199</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 363.

kembali ke kampus masing-masing. Mereka kemudian bergerak dari arah jalan Pecenongan menuju Monumen Nasional dan melakukan perusakan sejumlah kendaraan buatan Jepang. PT. Astra yang menjadi simbol usaha Jepang di Indonesia menjadi salah satu sasaran massa. Dalam kerusuhan itu identitas dari para pelaku tidak dapat diketahui dengan jelas.<sup>200</sup>

Kerusuhan terus berlanjut sampai petang hari tanggal 16 Januari 1974. Tercatat sebelas orang meninggal dunia dengan korban terbanyak terjadi di hari pertama. Dalam laporan *Tempo*, tercatat dua orang tewas tertembak di depan Departemen Pertanian dan sampai tengah malam, kedua mayat tersebut masih berada di bagian belakang sebuah jeep Toyota B-9151 P milik PT. Pertamina Tongkang. Salah satu korban itu bernama Maryo, bekerja sebagai pembantu di Salemba Utan Kayu, Jakarta.<sup>201</sup> Kerusuhan anti Jepang ini dinilai dua puluh kali lebih besar dari demonstrasi anti Jepang di Bangkok.<sup>202</sup>

Beragam pernyataan dalam menanggapi terjadinya peristiwa itu. Ali Moertopo yang menjadi sasaran protes mahasiswa menyebut kelompok simpatisan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) ikut terlibat dalam kerusuhan itu untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945 dan kepemimpinan nasional yang sah.<sup>203</sup> Buku *Memori Jenderal Yoga*, menyebut peristiwa itu sebagai puncak aksi ekstra parlementer dari generasi muda, mahasiswa, dan pelajar yang mengarah pada perbuatan makar terhadap

---

<sup>200</sup> “Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah” dalam *Tempo, op.cit.*, hlm 5.

<sup>201</sup> *ibid.*, hlm 5-6.

<sup>202</sup> “Jepang. Setelah Asia Tenggara”, *Tempo*, 2 Februari 1974, hlm 12.

<sup>203</sup> “Musibah Bagi Golongan & Bawah” *Tempo, op.cit.*, hlm 8.

kepemimpinan nasional dan mengubah UUD 1945. Buku ini juga menunjuk kelompok eks PSI dan DI/TII berada di balik kerusuhan itu.<sup>204</sup>

Jenderal Soemitro yang dipandang publik telah mempengaruhi gerakan mahasiswa untuk kepentingan politiknya mengatakan dalam otobiografinya,

Setelah terjadi pembakaran, perampokan di Glodok, Senen, dan lain-lain, saya minta pertanggungjawaban Hariman. Tapi dia menjawab : “bukan itu tujuan saya” Marah saya ketika ia berkata begitu. “Tangkap dia sekarang juga!” perintah saya. Saya pikir :“ tidak boleh ada seorang calon pemimpin cuci tangan. Saya tidak suka pada orang yang mau cuci tangan. Apalagi kalau orang itu kelihatan mau jadi pemimpin. Mestinya Hariman minta maaf. Kalau saja dia minta maaf waktu itu, akan saya maafkan. Tapi jangan cuci tangan itu tidak bertanggung jawab....<sup>205</sup>

Dari keterangan ini, Soemitro menunjuk Hariman Siregar sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kerusuhan itu.

Heru Cahyono dalam penelitiannya mengungkapkan secara eksplisit, bahwa mahasiswa bukanlah pelaku dalam kerusuhan itu. Dari berbagai sumber yang berhasil diperolehnya, Ali Moertopo disebut-sebut sebagai aktor intelektual utama yang menciptakan situasi untuk menjatuhkan reputasi Soemitro dan mendeskreditkan mahasiswa. Ali Moertopo berhasil memobilisasi anggota tidak resmi GUPPI dan eks DI/TII yang sebelum terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974 sudah melakukan rapat-rapat tertutup di Jakarta.<sup>206</sup>

Baru-baru ini, Hariman Siregar ketika diminta keterangan oleh *Republika* menjelang peringatan ke tiga puluh dua tahun Peristiwa 15 Januari 1974

---

<sup>204</sup> B. Wiwoho dan Banjar Chaerudin, *op.cit.*, hlm 224.

<sup>205</sup> Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, *op.cit.*, hlm 331.

<sup>206</sup> Dalam penelitiannya, Heru Cahyono menggunakan sumber wawancara dengan beberapa tokoh yang dianggap memahami seputar permasalahan Peristiwa 15 Januari 1974. Menurut Heru Cahyono, kerusuhan itu dilakukan oleh orang-orang binaan Ali Moertopo dan Sudjono Humardhani yang berasal dari anggota tidak resmi GUPPI. Orang-orang binaan Ali Moertopo itulah yang menggerakkan pemuda-pemuda pengangguran untuk melakukan pembakaran dan penjarahan pada tanggal 15 Januari 1974. Lihat Heru Cahyono, *op.cit.*, hlm 153-170.

mengatakan, “Soal siapa yang melakukan pembakaran kan sudah terungkap belakangan ini. Ali Moertopo menodai gerakan-gerakan yang mereka tuduh sebagai gerakan Masyumi. Kelompok-kelompok GUPPI yang digerakkan Ali Moertopo dan CSIS itu yang melakukannya...”<sup>207</sup>

Ali Sadikin yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur dan dikenal dekat dengan mahasiswa dalam biografinya *Bang Ali Demi Jakarta*, sebagaimana dipaparkan oleh Ramadhan K. H., tidak meyakini bila mahasiswa bertindak begitu jauh. Selama memimpin Jakarta, ia tidak tahu siapa yang melakukan kerusuhan itu.<sup>208</sup> Menurut pengakuan Hariman Siregar, kerusuhan terjadi pada pukul 17.00 hingga 18.00 WIB, sedangkan mahasiswa praktis sudah berada di kampus pada pukul 15.00 hingga 16.00 WIB.<sup>209</sup>

Dalam kabut yang menyelimuti siapa pelaku utama kerusuhan itu, Hariman Siregar, Sjahrir, dan Muhammad Aini Chalid dari Yogyakarta diajukan ke pengadilan. Dalam buku *30 Tahun Indonesia Merdeka*, mereka dianggap tokoh-tokoh yang harus bertanggung jawab terhadap kerusuhan di Jakarta.<sup>210</sup> Pada tanggal 2 Agustus 1974 Hariman Siregar diajukan ke pengadilan dengan tuduhan sebagai pemimpin dan organisator dalam menumbangkan pemerintahan. Ia dituduh melakukan tindak subversi sejak bulan Oktober, November, Desember 1973 dan Januari 1974. Ia juga dituduh menyinggung kepemimpinan Soeharto pada tanggal 24 November dan Desember 1973. Hariman kemudian mendapat

---

<sup>207</sup> Lihat “Rezim Berganti Tetap Sama” *Republika*, 14 Januari 2006.

<sup>208</sup> Lihat Ramadhan, K. H., *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, Jakarta, Sinar Harapan, 1992, hlm 379-381.

<sup>209</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 365 (catatan kaki).

<sup>210</sup> *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975* (penanggung jawab naskah Nugroho Notosusanto), Jakarta, Citra Lamtoro Gung, 1986, hlm 28.

hukuman selama enam tahun<sup>211</sup> Sjahrir dituduh sebagai otak dan penghasut gerakan,<sup>212</sup> sedangkan Aini Chalid dituduh sebagai penyeleweng ideologi Pancasila serta menyebarkan permusuhan di kalangan masyarakat.<sup>213</sup>

Pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat bila mahasiswa telah melakukan kerusuhan di Jakarta. Meskipun demikian penulis menilai, bahwa gerakan mahasiswa di bawah komando Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi salah satu aktor yang ikut bermain dalam peristiwa itu. Tuduhan yang ditujukan kepada Hariman Siregar, Sjahrir, dan Aini Chalid dinilai terlalu berlebihan, meskipun pernyataan Hariman Siregar yang menyinggung Soeharto memang diungkapkannya dalam “malam keprihatinan” yang diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 1973. Majalah *Tempo* juga menuliskan secara singkat pernyataan itu. Tidak ada unsur untuk mengganti atau merusak ideologi Pancasila seperti yang dituduhkan kepada Sjahrir dan Aini Chalid. Sedangkan isu keterlibatan orang-orang yang dikenal dekat dengan PSI hanya sebatas pada dialog biasa.<sup>214</sup>

Dalam kerusuhan itu diperkirakan delapan ratus orang berhasil ditangkap. Menurut keterangan Wapangkopkamtib Sudomo kepada pers, bahwa tanggal 15 dan 16 Januari 1974 telah dilakukan penangkapan terhadap empat ratus tujuh puluh dua orang. Jumlah ini terdiri dari empat belas orang mahasiswa, dua ratus

---

<sup>211</sup> Lihat “Hariman Dituduh Merongrong Pemerintahan Yang Syah”, *Kompas*, 2 Agustus 1974.

Lihat pula “Enam Tahun Penjara Untuk Hariman Siregar”, *Kompas*, Senin 23 Desember 1974.

<sup>212</sup> Sjahrir menilai kemungkinan penahanan terhadap dirinya yang hampir empat tahun juga dilatar belakangi oleh hubungan dekatnya dengan kalangan wartawan dan intelektual di Indonesia. Lihat Sjahrir, *Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1968-1982*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm 77 (catatan kaki).

<sup>213</sup> Seperti dijelaskan Rum Aly, tuduhan-tuduhan makar yang diajukan dalam pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat. Ada kesengajaan dalam pengadilan tersebut untuk mendeskreditkan mahasiswa, sedangkan konflik internal antara Ali Moertopo dan Soemitro, serta pengakuan dari sejumlah saksi pembela sidang Hariman, Sjahrir, dan Aini Chalid tidak diperhatikan. Rum Aly, *op.cit.*, hlm 403-408.

<sup>214</sup> Francois Raillon, *op.cit.*, hlm 113.

lima puluh buruh, dua puluh delapan pedagang, delapan puluh tiga pelajar, empat puluh satu pemuda, dua tukang becak, satu pengangguran, dan dua puluh enam gelandangan. Jumlah ini ditambah tiga ratus tiga puluh orang di hari berikutnya. Dari keseluruhan yang ditahan, empat puluh dua orang dikategorikan telah melakukan tindak pidana subversi.<sup>215</sup>

Mereka yang ditangkap antara lain Hariman Siregar, Gurmilang Kartasasmita, Theo L. Sambuaga, Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Salim Hutajulu, Dorojatun Kuntjorojakti, Fahmi Idris, Sugeng Surjadi, Marsillam Simanjuntak, ahli hukum Adnan Buyung Nasution, aktivis HAM Hadji Cornelius Princen, Imam Walujo, Jusuf A.R., Yessy Moninca, Sjahrir, ahli ekonomi senior Universitas Indonesia Sarbini Sumowinoto, dan tokoh PSI Soebadio Sastrotomo.<sup>216</sup> Beberapa media massa juga ditutup izin cetak dan terbitnya, seperti *Nusantara*, *Mahasiswa Indonesia*, *Harian Kami*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *Jakarta Times*, *Suluh Berita* yang terbit di Surabaya, *Ekspres*, *Pedoman*, dan *Wenang*. Alasan resmi untuk mencabut surat izin terbit karena media massa ini melakukan provokasi-provokasi yang mengganggu ketertiban dan keamanan<sup>217</sup>, meskipun alasan itu dinilai berlebihan.

---

<sup>215</sup> Mengenai keterangan singkat Wapangkopkamtib Sudomo, lihat “Peristiwa 15 Januari Dengan Percikan Api”, *Tempo*, 2 Maret 1974, hlm 6.

<sup>216</sup> Rum Aly, *op.cit*, hlm 373-374.

<sup>217</sup> Francois Raillon, *op.cit.*, hlm 113. Lihat juga “SIT & SIC”, *Tempo*, 2 Februari 1974, hlm 6.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN PRESIDEN SOEHARTO DALAM MENANGGAPI  
TERJADINYA PERISTIWA 15 JANUARI 1974**

**A. Membubarkan Aspri dan Mengambil Alih Pangkoptik**

Tepat seminggu setelah Peristiwa 15 Januari 1974, sidang dewan stabilisasi nasional yang dipimpin Soeharto mengeluarkan tiga keputusan penting tentang pola hidup sederhana. Keputusan ini hendak menjawab tuntutan mahasiswa dalam dialog dengan presiden pada awal Januari tahun 1974 dan menempatkan tuntutan mereka sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan. Tiga keputusan itu meliputi pola hidup sederhana berkaitan dengan perayaan seremonial bagi instansi negara, pola hidup sederhana bagi para pejabat negara, dan penghematan penggunaan uang negara untuk kunjungan kerja di daerah.<sup>218</sup>

Dua dari tiga keputusan tentang pola hidup sederhana itu dikeluarkan melalui keputusan presiden, masing-masing bertanggal 5 Maret 1974. Keputusan itu menentukan batasan bagi para pegawai negeri sipil dan anggota ABRI untuk dapat bekerja hanya pada perusahaan milik negara atau swasta resmi yang mempunyai tujuan dan fungsi sosial, baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas, dan pegawai biasa yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan istri dari pegawai pemerintah yang duduk sebagai pengurus dalam badan sosial harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.<sup>219</sup>

Kebijakan lain dari Soeharto yang justru lebih menarik untuk diinterpretasikan adalah keputusannya untuk menggeser posisi sejumlah jenderal Angkatan Darat

---

<sup>218</sup> Lihat "Tiga Keputusan Presiden", *Tempo*, 2 Februari 1974, hlm 7.

<sup>219</sup> Lihat "Hidup Sederhana. Yang Dagang & Pemegang Saham", *Tempo*, 16 Maret 1974, hlm 5.



yang menjadi alat politiknya. Menurut keterangan *Kompas* dalam artikelnya “Presiden Sendiri Sekarang Pangkoptim dan Aspri Ditiadakan”, bahwa Soeharto telah membubarkan Aspri sejak tanggal 18 Januari 1974 dan memegang langsung jabatan Pangkoptim. Dengan demikian Soemitro tidak lagi memegang jabatan itu. Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, keputusan penting itu dilakukan setelah Soeharto mengadakan serangkaian pertemuan dengan Panggabean, Soemitro, Sudomo, Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta pertemuannya dengan Kepala Bakin Sutopo Juwono dan calon Kepala Bakin yang baru Mayor Jenderal Yoga Sugomo.<sup>220</sup>

Merujuk pada keterangan Sudharmono, Soeharto telah mengambil keputusan dalam rangka penanganan masalah keamanan dan ketertiban umum, khususnya dalam mengatasi sebab-sebab dan akibat terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974. Selain memegang langsung jabatan Pangkoptim, Soeharto memandang keadaan sekarang tidak perlu lagi ada jabatan Aspri. Para anggota Aspri dikembalikan pada jabatan-jabatan yang lain. Ali Moertopo tetap sebagai Wakil Bakin, Sudjono Humardhani sebagai anggota DPR/MPR, Soerjo ditempatkan sebagai Direktur Utama PT. Hotel Indonesia International, dan Tjokropranolo menjadi Sekretaris Militer Kepresidenan. Dalam menjalankan tugas sebagai Pangkoptim, Soeharto menunjuk Sudomo sebagai Kepala Staf dan jabatan Wapangkoptim dihapus.<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup> Lihat “Presiden Sendiri Sekarang Pangkoptim dan Aspri Ditiadakan”, *Kompas*, 19 Januari 1974 dan “Presiden Adalah Pangkoptim (Dan Tanpa Aspri)”, *Tempo*, Tahun III No. 48, 2 Februari 1974, hlm 5.

<sup>221</sup> *loc.it.*

Posisi Kepala Bakin juga mengalami perubahan. Pejabat lama Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Sugomo, kolega Soeharto sejak di Kodam Diponegoro. Ia adalah perwira tinggi intelejen Angkatan Darat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Duta Besar PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) di New York dan pernah berjasa dalam mempromosikan Soeharto sebagai Pangdam Diponegoro. Sedangkan Sutopo Juwono yang pernah menempuh pendidikan di Seskoad tahun 1956, Kepala Staf Kodam V Jaya Jakarta tahun 1966 hingga menjadi Kepala Bakin sejak tahun 1970 ini ditempatkan Soeharto untuk mengisi pos Duta Besar di Negeri Belanda menggantikan posisi mantan koordinator Spri, Letjen Alamsjah Ratu Perwiranegara.<sup>222</sup>

### **B. Menyingkirkan Soemitro dan Ali Moertopo**

Beberapa saat setelah Soeharto mengambil alih jabatan Pangkopkamtib, Soemitro justru memilih berhenti dari karir militernya dan mempersiapkan diri untuk memasuki masa pensiun. Ia menyerahkan jabatan Wapangab kepada Panggabean di Aula Departemen Hankam pada tanggal 21 Maret 1974. Menurut keterangan Panggabean kepada *Kompas*, permohonan pengunduran diri Soemitro itu disampaikan secara tertulis kepada Soeharto tanggal 6 Maret 1974 dan mendapat persetujuan pada tanggal 15 Maret 1974.<sup>223</sup>

Soemitro dalam otobiografinya menceritakan, bahwa Soeharto pernah memberikan tawaran kepada dirinya untuk mengisi jabatan duta besar sebagai tugas kekaryaan ABRI. Dalam otobiografinya dikatakan, “*saya minta (Soeharto)*

---

<sup>222</sup> Lihat “Pengangkatan Sutopo Juwono Jadi Dubes Belanda Disetujui”, *Kompas*, Sabtu 6 April 1974.

<sup>223</sup> Lihat “Jenderal Sumitro Meletakkan Jabatan Atas Permohonan Sendiri”, *Kompas*, Jumat 22 Maret 1974.

*Mitro mengalah sementara. Saya minta keikhlasan Mitro untuk menjadi Duta Besar di Washington...*” (nama dalam kurung dari penulis). Terkesan kecewa, Soemitro mengatakan kepada Soeharto, “*aneh ya pak, saya ini bintang empat, kok nasib saya ditentukan orang di tepi jalan...*”. Soemitro sendiri menolak tawaran Soeharto dan memilih berhenti dari karir militernya (pensiun) <sup>224</sup>

Soeharto sendiri dalam otobiografinya sama sekali tidak menceritakan tentang Peristiwa 15 Januari 1974 atau keputusannya terhadap para jenderal kepercayaannya itu. Padahal, ia banyak menceritakan tentang peristiwa penting lain semasa hidupnya, seperti Serangan Umum (SO) 1 Maret 1949, Supersemar, *falsafah mikul duwur mendem jero* untuk Bung Karno, <sup>225</sup> Taman Mini Indonesia Indah yang memicu protes mahasiswa, kasus Timor Timur, dan masalah ‘Petrus’ (Penembakan Misterius). <sup>226</sup>

Salah satu sumber yang perlu dipertimbangkan untuk menafsirkan keputusannya itu adalah pidato kenegaraannya di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 15 Agustus 1974. Dalam pidatonya itu ia mengatakan, “*akan meniadakan sumber-sumber dan akibat negatif dari peristiwa itu...*” <sup>227</sup> Apa yang diungkapkan Soeharto itu dapat ditafsirkan, bahwa ia telah menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai salah satu sumber terjadinya peristiwa yang telah memalukan itu, termasuk Soemitro dan Ali Moertopo.

---

<sup>224</sup> Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, *op.cit*, hlm 325.

<sup>225</sup> *Mikul dhuwur mendhem jero* adalah falsafah Jawa yang arti harafiahnya adalah menjunjung tinggi nama baik orang tua, khususnya yang sudah meninggal dengan mengangkat kebaikannya (mikul) dan menutup dalam-dalam segala keburukannya (jero). G. Dwipayana dan Ramadhan, K. H., *op.cit.*, hlm 576.

<sup>226</sup> Pembersihan para *preman* yang mengganggu keamanan masyarakat pada era 1980 an.

<sup>227</sup> Lihat *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat*, 15 Agustus 1974, Jakarta, Departemen Penerangan Republik Indonesia, hlm 27.

Kebijakan Soeharto itu secara implisit dijawab pula oleh Sjahrir yang diketahui sebagai salah satu tokoh dari peristiwa itu. Ia menilai, bahwa pasca Peristiwa 15 Januari 1974 telah terjadi pengaturan politik bagi pihak-pihak yang bertikai.<sup>228</sup> Senada dengan pendapat Sjahrir, Rum Aly menilai Soeharto telah melakukan pembersihan selektif terhadap para jenderal kepercayaannya untuk menjaga keseimbangan sehingga lebih memperkuat posisinya di puncak kekuasaan rezim orde baru.<sup>229</sup> Dari sisi Soeharto, Peristiwa 15 Januari 1974 adalah bagian dari rencana pembersihan selektif di lingkaran kekuasaan, di mana para jenderal terkemuka Angkatan Darat itu dianggap sebagai sumber ancaman bagi kedudukannya.<sup>230</sup>

Fakta tersingkirnya Soemitro dan Sutopo Juwono perlu dipahami sebagai kebijakan Soeharto untuk memaksa mereka “naik ke garis tepi” atau melempar jauh dari lingkaran kepercayaannya.<sup>231</sup> Soeharto setidaknya mengetahui segala aktivitas Soemitro dalam membuka wacana bagi mahasiswa untuk menentang kebijakan pemerintah ketika ia melakukan kunjungan ke berbagai kampus di Jawa dan mendorong gerakan mereka pada saat kunjungan Tanaka.<sup>232</sup> Dalam pandangan Soeharto, Soemitro dianggap memiliki ambisi politik yang kemudian hari dapat mengancam kedudukannya. Begitu juga penilaiannya terhadap Sutopo Juwono yang diketahui mendukung Soemitro. Ia dinilai gagal dalam menjalankan fungsi intelejen karena dukungannya terhadap Soemitro.

---

<sup>228</sup> Sjahrir, *op.cit.*, hlm 83.

<sup>229</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 391.

<sup>230</sup> *ibid.*, hlm 392.

<sup>231</sup> David Jenkins, *op.cit.*, hlm 21.

<sup>232</sup> Ulf Sundhaussen, “The Military : Structures Procedures and Effects on Indonesia Society”, *op.cit.*, hlm 71.

Kasus serupa juga dilakukan Soeharto terhadap Sarwo Edi Wibowo, mantan Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang membantu Soeharto dalam pembersihan unsur-unsur komunis di Jawa Tengah. Pasca Peristiwa 15 Januari 1974, Sarwo Edi diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Akademi Angkatan Bersenjata di Magelang dan dikirim sebagai Duta Besar di Korea Selatan pada tahun 1974. Ia diketahui mendukung Soemitro dan digolongkan sebagai perwira idealis.<sup>233</sup> Pendukung Soemitro lainnya seperti Sajidiman Suryohadiprojo dipindahkan ke Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan kemudian dikirim sebagai Duta Besar di Jepang pada tahun 1978. Sedangkan Charis Suhud diangkat sebagai Ketua Kontingen Indonesia di Vietnam.<sup>234</sup>

Dengan cara yang khas dari pendekatan Soeharto, posisi duta besar adalah tempat yang paling tepat bagi mereka yang dianggap kritis dan membahayakan bagi kedudukannya. Menurut Ann Gregory, cara-cara yang dilakukan Soeharto dalam membina kesatuan di dalam tubuh militer adalah: a) memberhentikan mereka yang dianggap “kiri”, b) memindahkan pemimpin-pemimpin faksi yang bertikai ke daerah yang jauh (luar negeri) atau diberi kedudukan yang tidak penting dalam staf militer pusat, termasuk birokrasi sipil, c) menggunakan lembaga-lembaga dalam militer untuk menyalurkan kritik, d) mendukung faksi politik yang loyal, dan e) mengubah struktur organisasi militer.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> Lihat Michael Vatikiotis, *Indonesia Politics Under Soeharto*, London and New York, 1993, hlm 75-76.

<sup>234</sup> Harold Crouch, *Militer Dan Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm 355.

<sup>235</sup> Lihat Ann Gregory, *Recruitment and Factional Pattern of The Indonesia Elite*, Ph. D. Dissertation, Columbia University, 1976, hlm 514-515, sebagaimana dikutip oleh Mohtar Masoed, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, op.cit.*, hlm 154.

Ali Moertopo tidak jauh berbeda dari Soemitro. Meskipun tampak sebagai orang yang loyal, Ali Moertopo dicatat publik memiliki kemampuan berpolitik dan memiliki ambisi ingin memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan orde baru. Beberapa saat pasca peristiwa itu, ia masih bertahan dalam percaturan politik dan tidak pernah tersisih dari gelanggang politik nasional,<sup>236</sup> tetapi pengaruhnya semakin tidak berarti dari sisi Soeharto. Setelah dikembalikan di posisi Wakil Bakin pasca Peristiwa 15 Januari 1974, Ali Moertopo kemudian dipindahkan ke lembaga sipil di DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Banyak pengamat menilai, kebijakan ini dilakukan Soeharto untuk menyingkirkan pengaruh Ali Moertopo yang berambisi ingin menjadi presiden.<sup>237</sup>

Meskipun Peristiwa 15 Januari 1974 menyudutkan Ali Moertopo, banyak penilaian datang terhadap dirinya. Ia dinilai memiliki daya tahan politik yang baik dalam menghadapi segala permasalahan. Ketika beberapa orang pasca peristiwa itu mulai kehilangan pengaruhnya, Ali Moertopo dapat bertahan dalam percaturan politik nasional, seperti peran aktifnya dalam kepengurusan Golkar pusat, Ketua Dewan Kehormatan CSIS, dan pernah menjadi Menteri Penerangan. Ia dikenal memiliki jaringan politik yang luas dan mampu mengorbitkan politisi dan perwira muda.

Sudjono Humardhani hingga tahun 1986 tetap menjadi sahabat baik Soeharto, meskipun Sudjono tidak memegang jabatan militer setelah peristiwa itu. Ia dipercaya memiliki hubungan dekat, bahkan dianggap sebagai pamong spiritual Soeharto. Menurut Dr. Budyapradipta, pakar sastra Jawa dari Universitas

---

<sup>236</sup> Rum Aly, *op.cit.*, hlm 402.

<sup>237</sup> Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*, *op.cit.*, hlm 253.

Indonesia yang juga pernah menjadi sekretaris pribadi Sudjono Humardhani, bahwa hubungan dunia kebatinan keduanya dimulai pada tahun 1957 ketika Soeharto dan Sudjono bertugas di Kodam Diponegoro.<sup>238</sup> Kebenaran hubungan kebatinan keduanya memang diakui Soeharto, meskipun ia menolak bila Sudjono Humardhani disebut sebagai pamong spiritualnya. Dalam otobiografinya dikatakan, “yang mengira bahwa Djono itu guru kebatinan saya, kecele. Sangkaan begitu tidak benar. Mengenai ilmu kebatinan, Djono lebih banyak bertanya kepada saya daripada sebaliknya...”<sup>239</sup>

Soemitro yang dinilai kalah dalam rivalitas, justru memilih berhenti dari karir militernya. Soemitro kemudian menekuni kegiatan bisnis dan dikenal sebagai jenderal (purnawirawan) pemikir dengan menuangkan berbagai gagasannya dalam bentuk artikel tentang demokrasi dan pembangunan nasional. Dari gagasannya tampak, bahwa Soemitro sebenarnya menghendaki agar proses demokrasi yang diwujudkan melalui proses suksesi nasional terjadi di tahun 1993.

Setelah jabatan Pangkopkamtib diambil alih oleh Soeharto, pelaksana fungsi harian Kopkamtib dipercayakan kepada Sudomo. Sosok Sudomo bukanlah nama baru, meskipun ia bukan berasal dari Angkatan Darat. Sudomo pernah menjalin kerjasama dengan Soeharto sebagai komandan laut pembebasan Irian Barat. Tanggung jawab yang dipercayakan Soeharto kepada Sudomo dilandasi penilaian akan loyalitas terhadap dirinya. Sudomo diberi posisi sebagai Kaskopkamtib dan terus bertahan hingga ia naik menjadi Wapangab dari tahun 1978 sampai 1983.<sup>240</sup>

---

<sup>238</sup> Lihat “Soedjono dan Orde Dhawuh” (jejak spiritual edisi khusus Soeharto), *Tempo*, 10 Februari 2008, hlm 97-98.

<sup>239</sup> G. Dwipayana dan Ramadhan, K. H., *op.cit.*, hlm 441.

<sup>240</sup> Sudomo juga menjabat sebagai Panglima Kopkamtib pada tahun 1978.



Posisi yang ditinggalkan Sutopo Juwono akhirnya dipercayakan kepada Yoga Sugomo untuk mengisi posisi sebagai Kepala Bakin dan kemudian mengabdikan sebagai Kaskopkamtib dari tahun 1978 sampai tahun 1980.<sup>241</sup> Pasca peristiwa itu, Benny Moerdani perwira intelejen muda yang melejit pada saat Konfrontasi Malaysia dipanggil ke Jakarta untuk membenahi jaringan intelejen dalam negeri. Pada saat Benny dipanggil ke Jakarta, ia bukanlah perwira dalam jajaran komando, tetapi hanya bertugas sebagai seorang diplomat. Dipilihnya Benny Moerdani dijelaskan dalam karya Julius Pour karena dinilai tidak tercemar oleh rivalitas dua jenderal itu,<sup>242</sup> meskipun Benny memiliki hubungan dekat dengan Ali Moertopo. Nama Benny Moerdani terus menjadi kepercayaan Soeharto hingga akhir tahun 1980 an.

Kebijakan Soeharto ini menjadi bukti, bahwa ia telah menguasai militer dan menyingkirkan para jenderal kepercayaannya yang dianggap potensial<sup>243</sup> menjadi lawan politiknya. Soeharto tetap mempertahankan orang-orang yang dianggapnya tidak memiliki ambisi atau kecil kemungkinan untuk menentang dirinya. Panggabean dan Sudomo tetap dipertahankan di lingkaran kepercayaannya karena dua orang ini memiliki kriteria itu di mata Soeharto. Begitu juga dengan pandangan Soeharto terhadap Yoga Sugomo dan Benny Moerdani yang dianggap dapat menjalin kerja sama dengan baik.

---

<sup>241</sup> Yoga Sugomo ditempatkan sebagai Kepala Staf Kopkamtib tanpa harus kehilangan posisinya sebagai Kepala Bakin.

<sup>242</sup> Lihat Julius Pour, *Benny Moerdani : Profil Prajurit Negarawan*, Jakarta, Yayasan Pangsar Sudirman, 1993, hlm .

<sup>243</sup> David Jenkins, *op.cit.*, hlm 22.

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro karena ambisi masing-masing pihak untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan sebagai orang terkuat kedua setelah Soeharto. Rivalitas mereka mulai tampak dalam Sekber Golkar pasca pemilu 1971 dan semakin meningkat pada saat terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 1973 hingga 1974. Ali Moertopo memiliki basis kekuatan di Opsus, Sekber Golkar, dan lembaga CSIS. Sedangkan Soemitro menguasai langsung pasukan di lapangan dalam wadah Kopkamtib.

2. Keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974 didorong oleh pengaruh Jenderal Soemitro dengan membuka ruang bagi gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan rivalnya Mayor Jenderal Ali Moertopo. Gerakan mahasiswa yang sudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik ini mencapai puncaknya pada pertemuan kenegaraan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tanaka pada tanggal 15 Januari 1974. Tujuan demonstrasi ini tidak hanya menolak dominasi modal Jepang saja, tetapi menuntut dibubarkannya organisasi Aspri yang berada di bawah pengaruh Ali Moertopo. Dalam peristiwa itu, mahasiswa menjadi salah satu aktor, selain Soemitro dan Ali Moertopo.

3. Kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974 adalah menyingkirkan Mayor Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro dari pusat kekuasaan dengan membubarkan Aspri dan mengambil alih Pangkopkamtib. Keduanya dinilai Soeharto memiliki ambisi yang kemudian hari dapat membahayakan bagi kedudukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur. 1987. *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah. Pendapat-Pendapat Tentang Sejarah Kritis*. Jakarta : Gramedia.
- Baskara T. Wardaya. 2007. *Membongkar Supersemar. Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*. Yogyakarta : Galang Press.
- Berkhofer, Robert F. Jr., 1969. *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York : The Free Press.
- Crouch, Harold. 1995. *Militer Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Dakidae, Dhaniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta : Gramedia.
- Dedy Djamaludin Malik (ed). 1998. *Gejolak Reformasi Menolak Anarki*. Bandung : Zaman.
- Dwi Narwoko, J., dan Bagong Suyanto (ed). 2006. *Sosiologi. Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Dwipayana, G., dan Ramadhan, K. H. 1989. *Soeharto : Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta : Citra Lamtoro Gung.
- Eisentadt, S.N. 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta : Rajawali.
- Garraghan, Gilbert J., 1957. *A Guide to Historical Method*. New York : Fordham University Press.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Haryanto, Ignatius. 2006. *Indonesia Raya Di Brendel*. Yogyakarta : LKIS.
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Heru Cahyono. 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980. Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Hoffer, Eric. 1988. *Gerakan Massa*. Jakarta : Obor.
- Ian Chalmers. 1996. *Konglomerasi : Negara dan Modal Dalam Modal Industri Otomotif Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Igbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia.
- Jackson, Karl and Lucian Pye (ed). 1979. *Political Power and Communication in Indonesia*. Berkeley : Univerity California Press.
- Jenkins, David. 1984. *Suharto His General Indonesia Military Politics 1975-1983*. New York : Cornel Modern Indonesia Project.

- Kemal Fasya, Teuku. 2005. *Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme*. Yogyakarta : Buku Baik.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang Budaya.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jilid 1. Jakarta : Grafindo Persada.
- , 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jilid 2. Jakarta : Grafindo Persada.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru*. Jakarta : Grafiti Utama Press.
- Maswadi Rauf. 2001. *Konflik-Konsensus dan Politik*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Miriam Budiardjo (penyunting). 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Mohtar Mas'ood. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.
- Nishihara, Masashi. 1972. *Golkar and The Indonesian Elections of 1971*. Ithaca : Cornel Modern Indonesia Project Monograph Series.
- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR, 15 Agustus 1974*. Jakarta : Departemen Penerangan.
- Plano, C Jack, dkk. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Pour, Julius. 1993. *Benny Moerdani : Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta : Yayasan Pangsar Sudirman.
- Ramadhan, K.H. 1992. *Bang Ali Demi Jakarta (1966-1977)*. Jakarta : Sinar Harapan.
- , 1994. *Soemitro. Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Raillon, Francois. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa. Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta : LP3ES.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.
- Ritter, Herry. 1986. *Dictionary of Concept in Histori*. No.3. USA : Greenwood Press.
- Rum Aly. 2004. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik 1970-1974*. Jakarta : Kompas.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- , 1982. *Pemikiran Historiografi Indonesia. Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia.

- Siagian, P Sondang. 1988. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Bina Aksara.
- (penyunting). 1984. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Siraisi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta : Obor.
- Siregar, Hariman. 1994. *Hati Nurani Seorang Demonstran*. Jakarta : Mentika Media Utama.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.
- Soemarsaid Moertono. 1985. *Usaha dan Bina Negara di Jawa Masa Lampau. Studi Tentang Mataram II Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta : Obor.
- Staggenborg, Suzanne. 2003. *Gender, Keluarga, dan Gerakan-Gerakan Sosial*. Jakarta : Mediatar.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta : LP3ES.
- Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer*. Jakarta : LP3ES.
- Suwarno, P.J. 2004. *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1941-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*. Yogyakarta : Univ. Sanata Dharma.
- Team Dokumentasi Presiden Republik Indonesia (ed : G. Dwipayana dan Nazaruddin Sjamsuddin). 1991. *Jejak Langkah Pak Harto. 1 Oktober 1965-27 Maret 1968*. Jakarta : Citra Lamtoro Gung.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Vatikiotis, Michael. 1993. *Indonesia Politics Under Soeharto*. London and New York.
- Wanandi, Jusuf. 2005. "The Center for Strategic and International", *Indonesia in the Soeharto Years, Issue, Incident and Images*, Jakarta, Lontar.
- Webster's Ninth New Collegiate Dictionary in History*, No. 3, 1986. USA : Miriam Webster inc.
- Wiwoho, B., dan Banjar Chaerudin. 1990. *Memori Jenderal Yoga*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Yahya Muhaimin. 1991. *Bisnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta : LP3ES.

#### **Artikel Dalam Jurnal Berkala.**

- Arif Budiman. 1976. "Peranan Mahasiswa Sebagai Intelegensia" dalam *Prisma* No.V, 11 November.

- Dian Purba, Silvia. 1993. "Mengenal Kekuasaan Dalam Kepemimpinan" dalam *Media Unika*. No. 11-12. Tahun 4. Sumatera Utara : Universitas Katolik Santo Thomas.
- Eep Saefulloh Fatah. 1992. "Unjuk Rasa, Gerakan Massa, dan Demokratisasi" dalam *Prisma* No. 4. Tahun XXIII. April.
- . 1994. "Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi" dalam *Prisma*. No. 8. 8 Agustus.
- Hansen, Garry. 1975. "Indonesia 1974 : A Momentous Year" dalam *Asian Survey* Januari 1975 Volume XV No. 1. University of California Press.
- Hero Kuntjorojakti. 1998. "Kepentingan Jepang" dalam *Prisma*. No. 9 Tahun XVII.
- Leifer, Michael. 1985. "Ali Moertopo : Regional Visionary and Regional Pragmatist" dalam *The Indonesian Quarterly*. Volume XIII. No. 4. Oktober. CSIS : Jakarta.
- Malley, Michael. 1989. "Soedjono Hoemardhani and Indonesia Japanese Relations 1966-1974" dalam *Indonesia*. Southeast Asia Program : Cornell.
- Masmiar Mangiang. 1981. "Mahasiswa, Ilusi Tentang Sebuah Kekuatan" dalam *Prisma*. No. 12-Desember. Tahun X.
- Robinson, Richard. 1978. "Toward A Class Analysis of The Indonesian Military Bureaucratic State" dalam *Indonesia*. Southeast Asian Program : Cornell.
- Samson, A. Allan. 1972. "Indonesia 1972 : The Solidification of Military Control" dalam *Asian Survey*. February 1973. Volume XIII. No. 2.
- Sutoro Eko Yunanto. 1998. "Mendobrak Otoritarianisme Orde Baru di Medan Mahasiswa" dalam *Analisis CSIS*. No. 4 Tahun XXVII. Oktober-Desember.
- Thee Kian Wie. 1983. "Menyikapi Peranan Modal Jepang" dalam *Prisma*. No. 7 Tahun XII -Juli.

#### **Artikel Dalam Surat Kabar**

- "Presiden Sendiri Sekarang Pangkoptim dan Aspri Ditiadakan" dalam *Kompas*. 19 Januari 1974.
- "Yoga dan Sutopo Temui Presiden" dalam *Kompas*. 19 Januari 1974.
- "Jenderal Sumitro Meletakkan Jabatan Atas Permohonan Sendiri" dalam *Kompas* 22 Maret 1974.
- "Pengangkatan Sutopo Juwono Jadi Dubes Belanda Disetujui" dalam *Kompas* 6 April 1974.



- “Hariman Dituduh Merongrong Pemerintahan Yang Syah” dalam *Kompas*. 2 Agustus 1974.
- “Sidang Keempatpuluhtiga Perkara Hariman : Orang Yang Sudah Kena Tampar Jangan Ditampar Lagi!” dalam *Kompas*. 8 Oktober 1974.
- “Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Enam Tahun Penjara Hariman Siregar” dalam *Kompas*. 23 Desember 1974.
- “Kaum Militer Dalam Business” dalam *Tempo*. 3 Oktober 1970.
- “Indonesia Konflik Dalam Hajatan” dalam *Tempo*. 30 Desember 1973.
- “Setangkai Bunga Putih Untuk Pronk” dalam *Tempo*. 17 November 1973.
- “Demonstrasi. Ke Alamat Terakhir” dalam *Tempo*. 5 Januari 1974.
- “H + SG + S = PSI” dalam *Tempo*. 12 Januari 1974.
- “Kopkamtib. Pelajaran Jenderal Mitro” dalam *Tempo*. 12 Januari 1974.
- “Ayo Bermain Dengan Jepang” dalam *Tempo*. 19 Januari 1974.
- “Katakanlah Dengan Senyum” dalam *Tempo*. 19 Januari 1974.
- “Tri Tura Baru 1974” dalam *Tempo*. 19 Januari 1974.
- “Aspri Tidak Memiliki Wewenang Eksekutif” dalam *Tempo*. 19 Januari 1974.
- “Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah” dalam *Tempo*. 26 Januari 1974.
- “Setelah Suasana Anarki” dalam *Tempo*. 26 Januari 1974.
- “Jepang Setelah Asia Tenggara” dalam *Tempo*. 2 Februari 1974.
- “Tiga Keputusan Presiden” dalam *Tempo*. 2 Februari 1974.
- “Presiden Adalah Pangkopkamtib (Dan Tanpa Aspri)” dalam *Tempo*. 2 Februari 1974.
- “Tanahpun Jadi Kokoh” dalam *Tempo*. 2 Februari 1974.
- “Peristiwa 15 Januari Dengan Percikan Api” dalam *Tempo*. 2 Maret 1974.
- “Hot Time for Tanaka in Indonesia” dalam *Time*. January 28 1974.
- Asvi Warwan Adam. “Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah”. *Kompas*. Kamis 16 Januari 2003.
- Guy, Sacerdoti. “The Berkeley Mafia Meets The Military”. *Far Eastern Economics Review*. May 16 1980.
- Sadli, M. “Tentang Pasar dan Ekonomi Soeharto” dalam *Tempo*. 10 Februari 2008.
- “Penerimaan RAPBN 1973/1974” dalam *Business News*. 12 Januari 1973.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



## LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1 : MAYOR JENDERAL ALI MOERTOPO**

Sumber : *Ensikolpedi Nasional Indonesia. Nomor 10 MYRAD. Jakarta. Cipta Adi Pustaka. 1991.*



**LAMPIRAN 2 : JENDERAL SOEMITRO**

Sumber : Ramadhan, K. H., *Soemitro Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib*. Jakarta. Sinar Harapan. 1994.





*Kerusuhan tidak terbatas hanya pada luapan-luapan anti Jepang. Pusat pertokoan pasar Senen setelah di-terdu dan dibakar, disertai dengan pencurian dan perampakan barang dagangan. Gerakan-gerakan pengrusakan juga dilakukan terhadap pabrik-pabrik, toko-toko, dan tempat-tempat umum di kota Jakarta. Gambar atas memperlihatkan pusat pertokoan pasar Senen setelah pembakaran dan pengrusakan itu.*



*Di Jalan Gajah Mada sepeda motor buatan Jepang dirampas begitu saja dari pemiliknya lalu ditamparlah ke Sungai Ciliwung.*

**LAMPIRAN 3 : Kerusakan yang terjadi di Pasar Senen dan Jalan Gajah Mada, di sepanjang Sungai Ciliwung.**

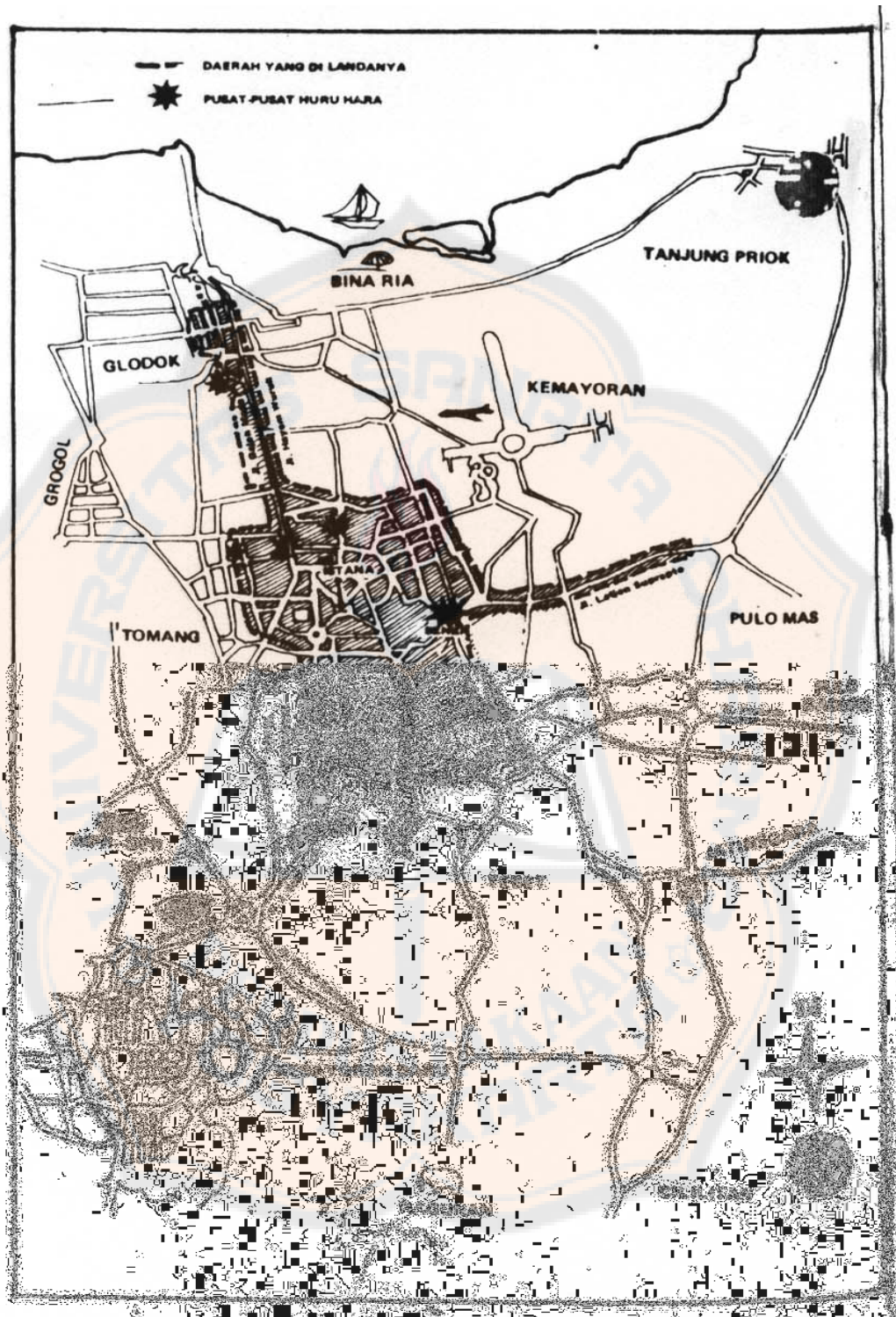
Sumber : *30 Tahun Indonesia Merdeka 1974-1975*. Jakarta. Tira Pustaka. 1981.



**LAMPIRAN 4 : Pembakaran dan perusakan kendaraan buatan Jepang yang terjadi di Jalan Pecenongan, Sudirman, dan Glodok.**

Sumber : *Tempo*, 26 Januari 1974.





LAMPIRAN 5 : Peta Lokasi Kerusakan Peristiwa 15 Januari 1974

Sumber : *Tempo*, 26 Januari 1974.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### Lampiran 6.

#### SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Mata Pelajaran : Sejarah  
 Satuan Pendidikan : SMA  
 Kelas / Semester : XII/IPS/Semester 1  
 Tahun Pelajaran : 2007/2008  
 Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Perjuangan Sejak Orde Baru Sampai Dengan Reformasi

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Belajar	Indikator	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber Bahan / Media
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
2.1 Menganalisis perkembangan pemerintahan orde baru.	A. Penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro 1. Perjalanan karir militer Ali Moertopo dan Soemitro 2. Perebutan pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.</li> </ul>	Menjelaskan penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.	Non tes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil diskusi siswa.</li> <li>Lembar pengamatan/observasi</li> </ul>	1. Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.  2. Lihat lembar observasi (RPP)	1 X 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crouch, Harold, 1986, <i>Militer Dan Politik Di Indonesia</i>, Sinar Harapan, Jakarta.</li> <li>Heru Cahyono, 1992, <i>Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980 Dari Pemilu Sampai Malari</i>, Sinar Harapan, Jakarta.</li> <li>Jackson, D Karl</li> </ul>



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	dan kedudukan orang terkuat kedua.				si (untuk guru)			and Lucian Pye (ed), 1979, <i>Political Power and Communication in Indonesia</i> , University California Press.
B.	Faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974 1. Dominasi modal Jepang 2. Soemitro mempengaruhi gerakan mahasiswa 3. Memanfaatkan kunjungan Tanaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.</li> </ul>	Menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.	Non tes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil diskusi siswa.</li> <li>Lembar pengamatan/observasi (untuk guru)</li> </ul>	3. Siswa menyerahkan laporan hasil diskusi tentang faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974. 4. Lihat lembar observasi (RPP)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenkins, David, 1984, <i>Suharto and His General : Indonesia Military Politics 1975-1983</i>, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca.</li> <li>Raillon, Francois, 1985, <i>Politik Dan Ideologi Mahasiswa. Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974</i>, LP3ES, Jakarta.</li> </ul>
C.	Kebijakan Presiden Soeharto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mendiskusikan</li> </ul>	Menjelaskan kebijakan Presiden	Non tes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil</li> </ul>	5. Siswa menyerahkan laporan hasil		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricklefs, M. C. 2005. <i>Sejarah</i></li> </ul>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membubarkan Aspri dan mengambil alih Pangkoptamtib</li> <li>2. Menyingkirkan Soemitro dan Ali Moertopo</li> </ol> <p><b>Refleksi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Peristiwa 15 Januari 1974.</li> </ol>	<p>dan mempresentasikan di depan kelas tentang kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan tentang nilai-nilai penting yang dapat diambil dari</li> </ul>	<p>Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.</p> <p>Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil oleh siswa dari Peristiwa 15 Januari 1974.</p>	<p>Tes</p>	<p>diskusi siswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar pengamatan/observasi (untuk guru).</li> </ul> <p>Lisan</p>	<p>diskusi tentang kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.</p> <p>6. Lihat lembar observasi (RPP).</p> <p>1. Jelaskan nilai-nilai penting yang dapat anda peroleh dari Peristiwa 15 Januari 1974?</p>	<p><i>Indonesia Modern 1200-2004</i>, Serambi, Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rum Aly, 2004, <i>Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik 1970-1974</i>, Kompas, Jakarta.</li> <li>• Peta lokasi kerusuhan</li> <li>• Foto-Foto</li> </ul>
--	---	--	---	------------	--	--	--

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p><b>Aplikasi :</b></p> <p>1. Menghubungkan Peristiwa 15 Januari 1974 dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p>	<p>Peristiwa 15 Januari 1974.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan dampak sosial dari Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</li> </ul>	<p>Menjelaskan dampak sosial dari Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p>	<p>Tes</p>	<p>Lisan</p>	<p>2. Berilah contoh dampak sosial yang dialami masyarakat dari Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.</p>		
	<p><b>Afektif :</b></p> <p>1. Menghayati arti rivalitas (persaingan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa menunjukkan contoh rivalitas</li> </ul>	<p>Menunjukkan contoh rivalitas positif yang</p>	<p>Tes</p>	<p>Lisan</p>	<p>3. Berilah contoh rivalitas positif yang dapat</p>		

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		positif yang dapat diterapkan untuk mengembangkan jati diri.	dapat diterapkan oleh siswa untuk mengembangkan jati diri.			diterapkan untuk mengembangkan jati diri anda.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui,

Kepala Sekolah

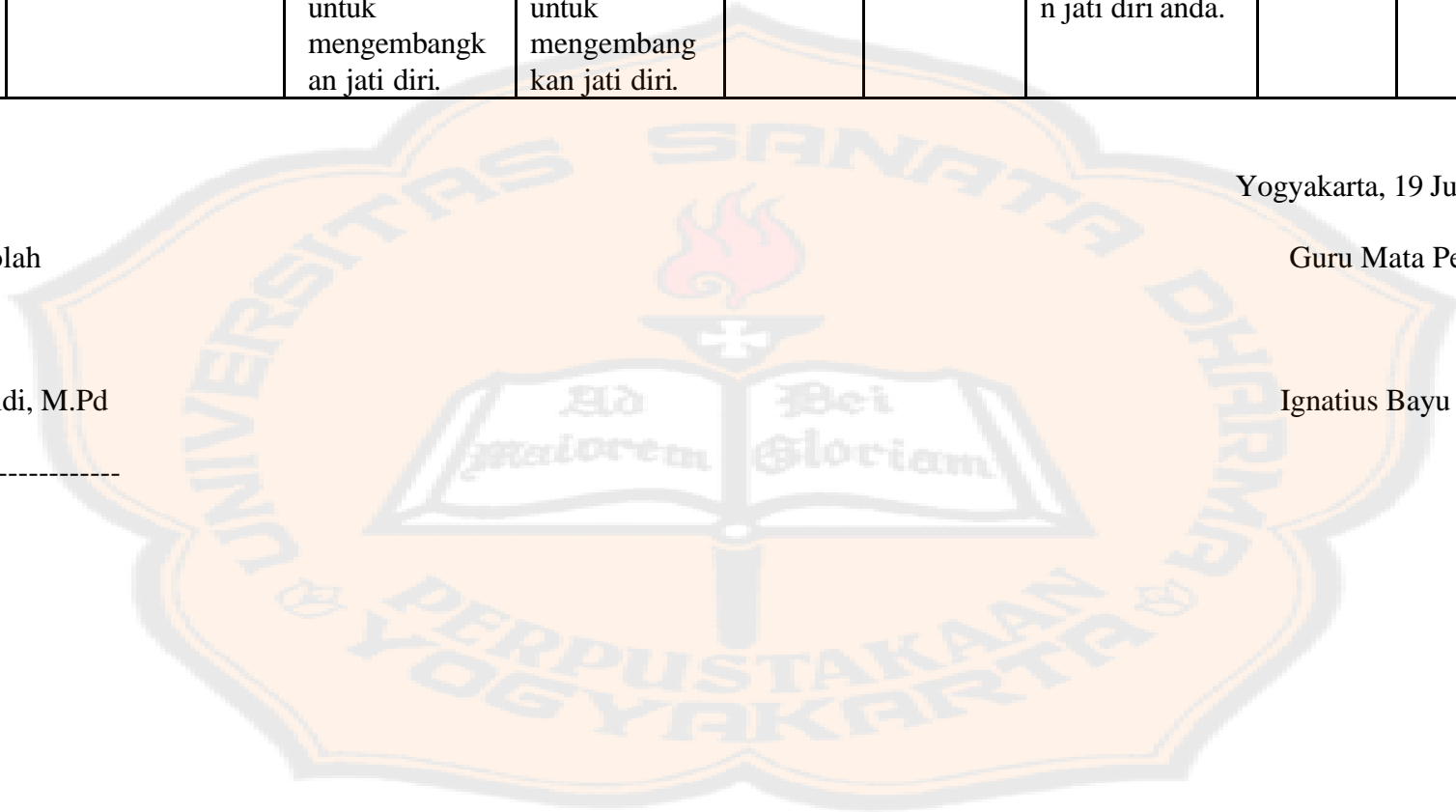
Drs. B. Musidi, M.Pd

NIP-----

Yogyakarta, 19 Juni 2008

Guru Mata Pelajaran

Ignatius Bayu Sudibyو



**Lampiran 7**

**RENCANA PEMBELAJARAN  
(RPP)**

**Mata Pelajaran : Sejarah**  
**Satuan Pendidikan : SMA**  
**Kelas/Semester : XII/IPS/Semester 1**  
**Tahun Pelajaran : 2007/2008**  
**Alokasi Waktu : 1 x 45 menit.**

**I. Standar Kompetensi**

Menganalisis perjuangan sejak orde baru sampai dengan reformasi.

**II. Kompetensi Dasar**

Menganalisis perkembangan pemerintahan orde baru.

**III. Materi Pokok**

1. Penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.
2. Faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.
3. Kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

**IV. Indikator**

1. Menjelaskan penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.
2. Menjelaskan faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.
3. Menjelaskan kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.
4. Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Peristiwa 15 Januari 1974.
5. Menjelaskan dampak sosial dari Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.
6. Menunjukkan contoh rivalitas positif yang dapat diterapkan untuk mengembangkan jati diri siswa.

**V. Kegiatan Belajar**

1. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro.
2. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974.
3. Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan di depan kelas tentang kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan tentang nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Peristiwa 15 Januari 1974.
5. Siswa mencari dan menyebutkan secara lisan tentang dampak sosial yang dialami masyarakat dari Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini.
6. Siswa menunjukkan contoh rivalitas positif yang dapat diterapkan untuk mengembangkan jati diri.

### **VI. Langkah-Langkah Pembelajaran**

#### **A. Pendahuluan (Apersepsi)**

- Guru memeriksa kehadiran siswa.
- Guru menginformasikan esensi kompetensi dan relevansi bahan ajar.
- Guru mencoba menarik minat siswa tentang sejarah Peristiwa 15 Januari 1974.

#### **B. Kegiatan Inti**

##### 1. Orientasi

- Guru memberikan penjelasan tentang materi yang dibahas.

##### 2. Latihan (diskusi)

- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang.
- Setiap kelompok diberi tugas untuk membahas permasalahan yang berbeda dalam waktu 30 menit. Permasalahan yang dibahas adalah:
  1. Jelaskan penyebab rivalitas antara Mayor Jenderal Ali Moertopo dengan Jenderal Soemitro?
  2. Jelaskan faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam Peristiwa 15 Januari 1974?
  3. Jelaskan kebijakan Presiden Soeharto dalam menanggapi terjadinya Peristiwa 15 Januari 1974?
- Setiap kelompok membahas satu permasalahan dalam waktu yang telah ditentukan dan menuliskan hasil diskusi kelompok dalam format laporan tidak resmi.
- Setiap kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

##### 3. Umpan Balik

Setiap kelompok menyerahkan laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, baik antar kelompok maupun dengan guru.

##### 4. Tindak Lanjut Guru

- Guru memberi penguatan atas hasil diskusi.
- Guru meminta pendapat secara lisan kepada siswa tentang permasalahan-permasalahan berikut:
  1. Jelaskan nilai-nilai penting yang dapat anda peroleh dari Peristiwa 15 Januari 1974?



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Berilah contoh dampak sosial yang dialami masyarakat akibat Peristiwa 15 Januari 1974 dan hubungkan dengan kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia pada saat ini?
3. Tunjukkan contoh rivalitas positif yang diterapkan untuk mengembangkan jati diri anda?

### C. Penutup

- Guru memberi kesimpulan isi materi yang dibahas.
- Guru memberi tugas untuk menyusun laporan ilmiah dari hasil diskusi.
- Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya.

### VII. Metode Belajar

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Presentasi
4. Tanya Jawab

### VIII. Media dan Sumber Belajar

#### a. Media

Viewer/OHP, foto-foto, dan peta lokasi kerusuhan

#### b. Sumber belajar

- Crouch, Harold. 1995. *Militer Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Heru Cahyono, 1992. *Peranan Ulama Dalam Golkar. Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Jenkins, David. 1984. *Suharto His General Military Politics 1975-1983*. New York : Cornel Modern Indonesia Project.
- Raillon, Francois, 1985. *Politik Dan Ideologi Mahasiswa. Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta : LP3ES.
- Ricklefs, M. C., 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi.
- Rum Aly, 2004. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter. Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik 1970-1974*. Jakarta : Kompas.
- Sundhaussen, Ulf, "The Military : Structures Procedures and Effects on Indonesian Society", *Political Power and Communication in Indonesia* (ed : Karl D. Jackson and Lucian Pye). 1978. Berkeley : University California Press.
- *Tempo* dan *Kompas* yang memuat laporan tentang Peristiwa 15 Januari 1974.